



-  @KEMENKESRI
-  @KEMENKES_RI
-  KEMKES.GO.ID
-  KEMENTERIAN KESEHATAN RI
-  KEMENTERIAN KESEHATAN RI
-  SIARAN RADIO KESEHATAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**BIRO KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK**

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025

20
25



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (Lkj) Instansi Pemerintah Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan wujud implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dengan tujuan untuk mencerminkan komitmen Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam mewujudkan akuntabilitas yang merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana kinerja yang telah dicapai selama periode ini. Hal tersebut menjadi bukti pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam memahami proses dan capaian yang telah diraih serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan penciptaan inovasi yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan.

Jakarta, Desember 2025

Kepala Biro Komunikasi dan
Informasi Publik



Aji Muhawarman, ST, MKM

NIP. 197712122002121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ringkasan Tingkat Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik berada di bawah tanggung jawab Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit kerja mendukung Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan nomenklatur tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik, dengan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2025 mengalami perubahan yang didasari oleh Rencana Strategis Kementerian Kesehatan TA 2022-2024. Adapun pada Desember 2025, Perjanjian Kinerja mengalami perubahan beriringan dengan disahkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan TA 2025-2029. Berikut adalah matriks yang menjabarkan target dan realisasi indikator kinerja di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2025 sebelum dan sesudah pengesahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan TA 2025-2029.

**Tabel Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2025**

SASARAN	INDIKATOR	TA 2025	
		TARGET	REALISASI
Sebelum Pengesahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan TA 2025-2029			
Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83	89,67
	Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	40	41

Sesudah Pengesahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan TA 2025-2029			
Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	77	85,79
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	77	81,47
	Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	40	41

Di sisi lain, peningkatan kualitas kinerja unit kerja dapat dilihat dari berbagai apresiasi yang diterima dalam bidang komunikasi dan informasi publik sepanjang tahun 2025, di antaranya sebagai berikut:

a. Penghargaan *Gold Winner* Kategori Pelayanan Publik

Kementerian Kesehatan meraih penghargaan *Gold Winner* pada kategori Pelayanan Publik dalam ajang Makaravox *PR Award* yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada sektor Informasi Pelayanan Publik.

Gambar Foto Penghargaan *Gold Winner* Kategori Pelayanan Publik



b. Penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital

Kementerian Kesehatan, bersama dengan 4 (empat) kementerian lainnya memperoleh penghargaan sebagai instansi teraktif dalam mengamplifikasikan narasi tunggal melalui media sosial resmi instansi.

Gambar Foto Penghargaan Instansi Interatif



c. Predikat Informatif (Kategori Kementerian) untuk PPID Kementerian Kesehatan

PPID Kementerian Kesehatan meraih predikat Informatif pada kategori Kementerian dalam kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik dengan perolehan nilai 95,37.

Gambar Foto Penghargaan Predikat Informatif PPID Kementerian Kesehatan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	2
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	10
BAB I: PENDAHULUAN.....	12
A. Latar Belakang.....	12
B. Tugas, Fungsi dan Struktur.....	12
C. Struktur Organisasi.....	13
D. Sistematika Laporan.....	18
BAB II: PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. Perencanaan Kinerja.....	20
B. Perjanjian Kinerja 2025.....	27
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja (3 Tahun Terakhir).....	30
1. Definisi Operasional Indikator.....	31
2. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Indikator.....	47
B. Analisis Capaian Kinerja.....	177
1. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target.....	177
2. Permasalahan.....	178
3. Pemecahan Masalah.....	178
4. Rencana Tindak Lanjut.....	179
C. Inovasi Kinerja.....	179
D. Sumber Daya/Realisasi Anggaran.....	180
1. Sumber Daya Manusia.....	180
2. Sumber Daya Anggaran.....	187
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	190
E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	195
BAB IV: KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT.....	201
A. Kesimpulan.....	201
B. Tindak Lanjut.....	202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik.....	13
Gambar 1. 2 Kegiatan Pokok dan Indikatif Biro Komunikai dan Informasi Publik	16
Gambar 1. 3 Crosscutting Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik	18
Gambar 2 1 Proses Bisnis Komunikasi dan Informasi Publik.....	20
Gambar 2 2 Sasaran Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik.....	23
Gambar 2 3 Strategi Publikasi Komunikasi dan Pelayanan Publik.....	23
Gambar 2 4 Dokumen Perjanjian Kinerja TA 2025 antara Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan Sekretaris Jenderal	27
Gambar 3. 1 Skema Kepatuhan Interaksi Layanan Kemenkes RI	36
Gambar 3. 2 Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Survei Interaksi Layanan	40
Gambar 3. 3 Pelaksanaan Survei Kepatuhan Interaksi Pelayanan Publik Poltekes Maluku	40
Gambar 3. 4 Dokumentasi Pemaparan Hasil SKPL Kemenkes Tahun 2025	44
Gambar 3. 5 Media Monitoring Tools.....	50
Gambar 3. 6 Pelaksanaan Workshop Penguatan Kapasitas Komunikasi Risiko.....	51
Gambar 3. 7 Dokumentasi Produksi Konten Kemencast	52
Gambar 3. 8 Tampilan Aplikasi Streaming Siaran Radio Kesehatan	53
Gambar 3. 9 Konten Live Instagram Talkshow Siaran Sehat.....	53
Gambar 3. 10 Dokumentasi Siaran Radio Kesehatan.....	54
Gambar 3. 11 Dokumentasi Program Talkshow Keluarga Sehat di Radio Kesehatan	54
Gambar 3. 12 Dokumentasi Program Talkshow Eksklusif di Radio Kesehatan	55
Gambar 3. 13 Program Talkshow Eksklusif di Radio Kesehatan	55
Gambar 3. 14 Dokumentasi Sound file ILM radio	56
Gambar 3. 15 Dokumentasi Naskah Adlibs	56
Gambar 3. 16 Dokumentasi Konten Spotify Radio Kesehatan.....	57
Gambar 3. 17 Pelaksanaan Talkshow pada Siaran Off Air Radio Kesehatan	57
Gambar 3. 18 Konten di Instagram Kemenkes RI.....	59
Gambar 3. 19 Akun Twitter Kemenkes RI.....	60
Gambar 3. 20 Akun dan Konten TikTok Kemenkes RI.....	60
Gambar 3. 21 Akun Facebook Kemenkes RI.....	61
Gambar 3. 22 Publikasi Konten pada Whatsapp Channel	61
Gambar 3. 23 Publikasi Q&A Melalui Live Instagram.....	62
Gambar 3. 24 Contoh Komik Animasi Produksi 2025	63
Gambar 3. 25 Live Streaming dan short pada YouTube Kemenkes	64
Gambar 3. 26 Kegiatan Workshop Konten Media Digital	65

Gambar 3. 27 Publikasi Berita Kesehatan melalui Kerjasama dengan Majelis Lucu Indonesia	66
Gambar 3. 28 Pemasangan Iklan OOH di KRL Commuter Line dan MRT	66
Gambar 3. 29 Penayangan Advertorial terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).....	67
Gambar 3. 30 Amplifikasi konten media sosial dan jumlah viewers	68
Gambar 3. 31 Tampilan Album Foto Flickr Sehat Negeriku	68
Gambar 3. 32 Publikasi Video YouTube Kemenkes RI.....	69
Gambar 3. 33 Publikasi Rilis pada Website	70
Gambar 3. 34 Dokumentasi Hasil Penilaian PEKPPP Nasional 2025.....	76
Gambar 3. 35 Kegiatan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik	77
Gambar 3. 36 Logo Halo Kemenkes.....	77
Gambar 3. 37 Petugas Halo Kemenkes dalam memberikan layanan	78
Gambar 3. 38 Dashboard Ecentrix Halo Kemenkes Kanal Telepon.....	79
Gambar 3. 39 Aplikasi telephony Microsip.....	79
Gambar 3. 40 Dashboard Omnix Halo Kemenkes Kanal Telepon	80
Gambar 3. 41 Dashboard Pemantauan Service Level	80
Gambar 3. 42 Dashboard Pemantauan Service Level Grafana Omnix	80
Gambar 3. 43 Tampilan Dashboard Ecentrix untuk Service Level Monitoring.....	82
Gambar 3. 44 Tampilan dashboard OMNIX untuk layanan email	82
Gambar 3. 45 Struktur Organisasi PPID Kemenkes RI.....	84
Gambar 3. 46 Dokumentasi Kegiatan PPID Periode Januari - Juni 2025.....	93
Gambar 3. 47 Feed Instagram PPID Kemenkes RI	93
Gambar 3. 48 Diagram Postingan dan Interaksi Direct Messages Instagram PPID Kemenkes RI Tahun 2025.....	94
Gambar 3. 49 Diagram Permohonan Informasi Via Email PPID Kemenkes RI Tahun 2025	94
Gambar 3. 50 Diagram Permohonan Informasi melalui Surat Tahun 2025	95
Gambar 3. 51 Pelaksanaan Bimbingan Teknis PPID Kemenkes RI.....	96
Gambar 3. 52 Dokumentasi Rapat Kerja Dengan Komisi IX DPR RI.....	100
Gambar 3. 53 Dokumentasi Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI	105
Gambar 3. 54 Dokumentasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik, Reses dan Panja Komisi IX DPR RI	110
Gambar 3. 55 Dokumentasi Kegiatan Temu Media	112
Gambar 3. 56 Kegiatan Media Coaching	114
Gambar 3. 57 Dokumentasi Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan di Media Konvensional (Talkshow TV/Radio)	115

Gambar 3. 58 Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Korwil Provinsi Bali	116
Gambar 3. 59 Core Value ASN: BerAKHLAK	116
Gambar 3. 60 Produksi Konten CAPSAY bersama UPT Kemenkes RI	118
Gambar 3. 61 Sharing Session Pengelolaan Media Sosial melalui LMS Pelataran Sehat .	119
Gambar 3. 62 Pelaksanaan Challenge Konten TiTok Mahasiswa	120
Gambar 3. 63 Poster Promosi Challenge Konten TiTok Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes	121
Gambar 3. 64 Webinar "Award Kehumasan: Challenge Konten TikTok Cek Kesehatan Gratis bagi Mahasiswa Poltekkes"	122
Gambar 3. 65 Diagram Publikasi Konten di Akun @lifeatkemenkes	124
Gambar 3. 66 Feed Instagram @lifeatkemenkes.....	124
Gambar 3. 67 Pertemuan Kehumasan Unit Utama Kementerian Kesehatan	127
Gambar 3. 68 Dokumentasi Pertemuan Kehumasan.....	130
Gambar 3. 69 SK Penetapan JFT Pranata Humas Pratama.....	131
Gambar 3. 70 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pranata Humas	133
Gambar 3. 71 Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Cybertroops Kemenkes RI	134
Gambar 3. 72 Forum Tematik Kehumasan (Bakohumas).....	137
Gambar 3. 73 Website Kementerian Kesehatan	138
Gambar 3. 74 Publikasi Konten di Website Sekretariat Jenderal	140
Gambar 3. 75 Kegiatan Sharing Knowledge "Akreditasi Perpustakaan"	141
Gambar 3. 76 Kegiatan SAPA Rokom Tema "Perpustakaan"	141
Gambar 3. 77 Pemilihan Perpustakaan Berinovasi Di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025	145
Gambar 3. 78 Bimbingan Teknis Persiapan Akreditasi dan Pengelolaan Perpustakaan....	146
Gambar 3. 79 Workshop Perpustakaan Khusus Basic of Information Literacy (19 Juni 2025)	147
Gambar 3. 80 Pedoman Komunikasi Risiko	149
Gambar 3. 81 Penerbitan "Buku Saku bagi Orang Tua dan Pendamping Penyandang Disabilitas tentang Kesehatan Seksual dan Reproduksi"	150
Gambar 3. 82 Benchmarking Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan.....	152
Gambar 3. 83 Benchmarking Kementerian Agama RI ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan	153
<i>Gambar 3. 84 Grafik Pengunjung Offline Perpustakaan Kemenkes.....</i>	<i>155</i>
Gambar 3. 85 Grafik Pengunjung E-Likes Perpustakaan Kemenkes.....	156
Gambar 3. 86 Grafik Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan Kemenkes.....	156

Gambar 3. 87 Dokumentasi Pengunjung Perpustakaan	157
Gambar 3. 88 Kegiatan Pustakawan Bercerita	157
Gambar 3. 89 Diagram Permohonan KDT dan ISBN Tahun 2025.....	159
Gambar 3. 90 Dokumentasi Rilis berita Kegiatan Perpustakaan.....	160
Gambar 3. 91 Dokumentasi Bimbingan Pemustaka	162
Gambar 3. 92 Data Pengolah Bahan Pustaka Tahun 2025	163
Gambar 3. 93 Pameran Perpustakaan di Hari KemerdekaanRI yang ke-80 dan kegiatan Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK) di Buperta Cibubur	167
Gambar 3. 94 Pameran Perpustakaan di Auditorium Siwabessy Gedung Suyudi Kemenkes bertepatan dengan Bibliobattle Eselon II Kemenkes	167
Gambar 3. 95 Pameran Perpustakaan ketiga memperingati HKN ke 61 dan Health Artificial Intelligence Festival (HAI FEST) 2025 tanggal 07-09 Desember 2025 di Kartini Expo Balai Kartini	167
Gambar 3. 96 Proses Penjurian Bibliobattle Hari SakaBakti Husada (SBH) ke-40 Tahun 2025	168
Gambar 3. 97 Pelaksanaan Bibliobattle CASN dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan Tahun 2025	170
Gambar 3. 98 Pelaksanaan Bibliobattle Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025	171
Gambar 3. 99 Sosialisasi Penggunaan Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan	173
Gambar 3. 100 Fumigasi Perpustakaan Kemenkes.....	173
Gambar 3. 101 Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Grand Design Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029	176
Gambar 3. 102 Diagram Jumlah Pegawai Menurut Jabatan.....	181
Gambar 3. 103 Diagram Jumlah Pegawai Menurut Golongan	181
Gambar 3. 104 Diagram Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	182
Gambar 3. 105 Laporan Barang Milik Negara Tahun 2025.....	190

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Matriks Perbandingan Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2022-2025 (Sebelum Penerbitan Rencana Strategis 2022-2025)	24
Tabel 2 2 Matriks Perbandingan Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2022-2025 (Sesudah Penerbitan Rencana Strategis 2025-2029)	24
Tabel 3. 1 Matriks Target dan Capaian Kinerja TA 2025	31
Tabel 3. 2 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	32
Tabel 3. 3 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah UPT Kemenkes dengan Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	36
Tabel 3. 4 Kriteria Penilaian Kualitas Pelayanan Publik	37
Tabel 3. 5 Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	42
Tabel 3. 6 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (IKK) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	45
Tabel 3. 7 Publikasi Seluruh Program Siaran Radio Kesehatan	58
Tabel 3. 8 Tren Jumlah Konten pada Media Sosial Kementerian Kesehatan	59
Tabel 3. 9 Jumlah Publikasi Konten pada Media Sosial Kemenkes RI	62
Tabel 3. 10 Publikasi Q&A Melalui Live Instagram	62
Tabel 3. 11 Jumlah Produksi Konten Komik Animasi	64
Tabel 3. 12 Publikasi Live Streaming dan Short YouTube	65
Tabel 3. 13 Jumlah Publikasi Album Foto pada Flickr Tahun 2025	68
Tabel 3. 14 Jumlah Kegiatan Pameran Foto Tahun 2025	69
Tabel 3. 15 Jumlah Publikasi Video Liputan dan Pembangunan Kesehatan di YouTube Tahun 2025	69
Tabel 3. 16 Jumlah Video Taping Tahun 2025	70
Tabel 3. 17 Jumlah Publikasi Rilis Berita Kesehatan	70
Tabel 3. 18 Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) UPT Kementerian Kesehatan	71
Tabel 3. 19 Jumlah Layanan Telepon Halo Kemenkes Januari – Desember 2025	79
Tabel 3. 20 Jumlah Pengguna Layanan SMS Halo Kemenkes Periode Januari-Desember 2025	81
Tabel 3. 21 Jumlah Pengguna Layanan Email Halo Kemenkes	81
Tabel 3. 22 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Per Unsur	83
Tabel 3. 23 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Halo Kemenkes 2025	83
Tabel 3. 24 Rekapitulasi Koordinasi PPID Tahun 2025	85

Tabel 3. 25 Jumlah Permohonan Informasi melalui Pojok Informasi Tahun 2025	93
Tabel 3. 26 Jumlah Permohonan Informasi melalui Instagram PPID Kemenkes RI Tahun 2025	94
Tabel 3. 27 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025	95
Tabel 3. 28 Laporan Terdisposisi melalui Admin Instansi	97
Tabel 3. 29 Laporan Form Manual Admin UPT	97
Tabel 3. 30 Daftar Loker Unit Layanan Terpadu (ULT)	99
Tabel 3. 31 Jumlah Pelayanan Informasi Per Loker Tahun 2025	99
Tabel 3. 32 Rekapitulasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja DPR RI	101
Tabel 3. 33 Rekapitulasi Kunjungan Kerja Spesifik, Reses dan Panja Komisi IX DPR RI ..	106
Tabel 3. 34 Rekapitulasi Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI	110
Tabel 3. 35 Kegiatan Temu Media	112
Tabel 3. 36 Rekapitulasi Produksi dan Penayangan Filler Sosialisasi Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2025	115
Tabel 3. 37 Publikasi Konten di Whatsapp Blast “Sehat Negeriku”	123
Tabel 3. 38 Top Content Performance @lifeatkemenkes Januari s.d Desember 2025	125
Tabel 3. 39 Komposisi Redistribusi dan Bezzeting 2025	131
Tabel 3. 40 Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Pertemuan Cybertroops	135
Tabel 3. 41 Jumlah Publikasi Konten di Website Sekretariat Jenderal	139
Tabel 3. 42 Laporan Pengunjung Offline Perpustakaan Kemenkes Bulan Januari s.d Desember 2025	154
Tabel 3. 43 Laporan Pengunjung E-Likes Perpustakaan Kemenkes	155
Tabel 3. 44 Rekapitulasi Topik Pathfinder Tahun 2025	159
Tabel 3. 45 Bibliografi Terbitan Tahun 2025	164
Tabel 3. 46 Daftar Pelatihan Tahun 2025 Biro Komunikasi dan Informasi Publik	182
Tabel 3. 47 Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025	187
Tabel 3. 48 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024-2025	187
Tabel 3. 49 Rincian Realisasi Anggaran per Output	188
Tabel 3. 50 Matriks Target Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2025	188
Tabel 3. 51 Daftar Peralatan dan Mesin di Biro Komunikasi dan Informasi Publik	191
Tabel 3. 52 Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 4	195
Tabel 3. 53 Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2	195
Tabel 3. 54 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Kegiatan TA 2025	197
Tabel 3. 55 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Capaian IKK	198
Tabel 3. 56 Matriks Keterkaitan Indikator dan Rincian Output	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah menjadi elemen krusial dalam meraih tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang terus digalakkan di berbagai sektor pemerintahan. Sistem ini mengedepankan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-based management*) yang menekankan pada hasil yang dapat diukur dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat, sehingga penerapan sistem ini tidak hanya berguna untuk pengukuran kinerja tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah dapat menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Pendekatan ini mengharuskan instansi untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, yang nantinya akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi aspek efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Di era digital dan keterbukaan informasi ini, kebutuhan akan transparansi kinerja sangat mendesak. Masyarakat berekspektasi agar setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Masyarakat menginginkan adanya bukti nyata mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara serta dampak positif yang dihasilkan dari setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah. Tanpa transparansi, ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan akan terus berkembang, sehingga dapat berimbas pada penurunan partisipasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh capaian program, kinerja dan pertanggungjawaban suatu entitas dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada Rencana Strategis tahun 2025-2029 ditetapkan visi, misi, tujuan dan strategi baru yang didasarkan pada perubahan struktur organisasi, sasaran prioritas nasional, serta fokus pada penguatan Transformasi Kesehatan yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya. Dalam Rencana Strategis baru, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki satu Indikator Kinerja Program (IKP) yang mendukung transformasi tersebut yaitu “Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan” dan dua Indikator Kinerja Kegiatan yaitu: (1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal; dan (2) Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan, disebutkan bahwa tugas Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan memedomani peraturan tersebut,

Kementerian Kesehatan selanjutnya melakukan penataan atau penyesuaian nomenklatur organisasi, tugas, dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024, Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada pasal 25 disebutkan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informasi layanan publik, dengan menyelenggarakan fungsi: a) pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi, komunikasi risiko dan indeks kepuasan masyarakat terhadap berita dan publikasi kesehatan; b) pengelolaan publikasi di media konvensional dan digital; c) pelaksanaan liputan dan dokumentasi program dan kebijakan kesehatan; d) pengelolaan layanan informasi, keterbukaan informasi publik dan pengaduan masyarakat; e) koordinasi penguatan pelayanan publik dan kepatuhan standar perilaku interaksi layanan publik; f) pengelolaan komunikasi internal dan eksternal serta sinergi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah; g) pengelolaan perpustakaan; dan h) pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan i) pelaksanaan urusan administrasi Biro. Peraturan ini juga mengatur mengenai Organisasi Tata Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari: a) Kepala Unit Kerja; b) Kelompok Jabatan Fungsional; dan c) Kelompok Jabatan Pelaksana.

C. Struktur Organisasi

Merujuk pada peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan rentang kendali dalam operasional pelaksanaan kegiatan, dibentuk tim kerja pada setiap unit kerja. Setiap tim kerja dipimpin oleh seorang ketua, sedangkan jumlah anggota tim kerja tidak dibatasi. Tim kerja yang dibentuk mempunyai tugas yaitu: 1) menyusun perencanaan tim kerja; 2) melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja; 3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim; 4) menyusun laporan kegiatan tim; dan 5) melakukan koordinasi antar tim kerja dalam pekerjaan insidental/pengutusan.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik



Di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik ditetapkan 9 (sembilan) Tim Kerja dengan lingkup tugas sebagai berikut:

1. Tim Kerja Strategi Komunikasi

Lingkup Tugas:

Penyusunan strategi komunikasi kebijakan/program kesehatan, pengelolaan isu publik dengan melakukan media *monitoring* baik media massa maupun media sosial secara berkala, *agenda setting*, penguatan kapasitas komunikasi risiko pada krisis kesehatan, dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi Kementerian Kesehatan.

2. Tim Kerja Peliputan Dan Dokumentasi

Lingkup Tugas:

Peliputan dan dokumentasi bagi Pimpinan Kemenkes (Menteri, Wamen, Sekjen dan DWP/SERUNI), produksi video dan naskah *taping* bagi pimpinan Kemenkes, produksi video kebijakan dan program kesehatan, membuat konten infografis *vcard/greeting* bagi Pimpinan Kemenkes, sosialisasi kegiatan Kemenkes melalui penyedia *display* foto secara periodik, produksi rilis berita program kesehatan, pengelolaan website.kemkes.go.id

3. Tim Kerja Publikasi Media

Lingkup Tugas:

Sosialisasi program dan edukasi kesehatan, penerbitan majalah Kemenkes (Mediakom), pengelolaan Siaran Radio Kesehatan (SRK), pengelolaan *Podcast* Kemenkes (Kemencast), pengelolaan media sosial Kemenkes, produksi konten media sosial terkait edukasi kesehatan, publikasi *paid media* melalui advertorial dan *talkshow*, penyusunan Buku Kinerja Kementerian Kesehatan.

4. Tim Kerja Hubungan Media Dan Kelembagaan

Lingkup Tugas:

Penyelenggaraan konferensi pers atau *media briefing* serta peliputan kegiatan Kementerian Kesehatan bersama jurnalis/media, pelaksanaan *media visit* ke perusahaan pers, pelaksanaan *media coaching* bagi pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, penyiapan bahan pimpinan (*talking point/briefing sheet*) terkait audiensi, penyelenggaraan *media coaching* bagi pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, koordinasi dan fasilitasi rohaniawan, koordinasi dan fasilitasi eksternal Kementerian/Lembaga/Organisasi non-pemerintah lainnya, fasilitasi kegiatan DPR (Raker, RDP, Kunjungan Kerja dan Sosialisasi GERMAS), *monitoring* bulanan atas tindak lanjut hasil Raker/RDP ke unit terkait serta koordinasi dan fasilitasi pembinaan wilayah provinsi oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

5. Tim Kerja Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

Lingkup Tugas:

Pengelolaan informasi (Pojok Info, Halo Kemkes, Unit Layanan Terpadu (ULT), penayangan *signage* di lingkungan Kementerian Kesehatan), pengelolaan pengaduan masyarakat (unjuk rasa, Ombudsman, SP4N-LAPOR, dan media sosial pengaduan), penanggungjawab dalam penilaian kepatuhan standar layanan publik oleh Ombudsman, pengelolaan dan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik, penyelenggaraan pemberian penghargaan terkait pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

6. Tim Kerja Penguatan Pelayanan Publik

Lingkup Tugas:

Pengelolaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), fasilitasi penilaian indeks pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), pengelolaan forum konsultasi pelayanan publik, pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pelaksanaan survei kepatuhan interaksi pelayanan publik, pengawasan, pengelolaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di unit utama dan unit pelaksana teknis Kemenkes.

7. Tim Kerja Komunikasi Internal Dan Kehumasan

Lingkup Tugas:

Program pengembangan karir untuk jabatan fungsional pranata humas dan pengelola kehumasan, peningkatan kapasitas untuk jabatan fungsional pranata humas dan pengelola kehumasan, koordinasi dengan Bakohumas dan Humas K/L lain, pengelolaan *cybertroops* di lingkungan Kemenkes, pelaksanaan *award* kehumasan, pengelolaan komunikasi internal terkait transformasi internal, pengelolaan konten terkait Biro Komunikasi dan Informasi Publik di *website* Sekretariat Jenderal.

8. Tim Kerja Pengelolaan Perpustakaan

Lingkup Tugas:

Pengembangan NSPK kepustakawanan, pengembangan karir untuk jabatan fungsional pustakawan, pengelolaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, peningkatan kapasitas untuk jabatan fungsional pustakawan, pembinaan dana akreditasi perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, koordinasi dengan Perpustakaan Nasional dan K/L lainnya terkait kepustakawanan, pengorganisasian bahan pustaka perpustakaan Kementerian Kesehatan, pengelolaan *repository* Kementerian Kesehatan.

9. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Lingkup Tugas:

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Biro, pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Biro, pengelolaan layanan sumber daya manusia dan organisasi tata laksana, koordinasi pengelolaan kearsipan, koordinasi pengelolaan urusan rumah tangga, *monitoring* dan evaluasi kegiatan Biro, penyelesaian tindak lanjut hasil audit BPK sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan.

Untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan Prioritas Nasional Bidang Kesehatan serta Rencana Aksi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, maka dilaksanakan strategi yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pokok dan indikatif pengelolaan komunikasi publik tahun 2025 yaitu:

Gambar 1. 2 Kegiatan Pokok dan Indikatif Biro Komunikai dan Informasi Publik



1) Pengelolaan Strategi Komunikasi

Kegiatan indikatif ini fokus untuk memonitor berbagai isu/opini kesehatan yang beredar di berbagai media pemberitaan, beberapa bentuk kegiatan yang dirancang seperti rapat, pertemuan evaluasi, konsinyasi, survei dan lain-lain.

2) Publikasi Melalui Media

Kegiatan indikatif ini mencakup semua bentuk publikasi atau penyebarluasan informasi kebijakan/program Kesehatan kepada publik melalui media cetak, elektronik dan digital. Berbagai bentuk kegiatan dapat dirancang seperti advertorial, *talkshow*, *gathering* media, penulisan di Mediakom, temu media, *Podcast*, reportase berita kesehatan, ekspose pembangunan kesehatan di daerah bersama media, peliputan dan dokumentasi kegiatan kesehatan dan lain-lain.

3) **Peliputan dan Dokumentasi**

Kegiatan indikatif mencakup penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, sekaligus peliputan, dokumentasi, serta produksi berbagai konten komunikasi (video, naskah, infografis, rilis berita, dan *taping*) bagi pimpinan Kemenkes. Selain itu, tim juga melakukan sosialisasi program kesehatan melalui *display* foto, konten media, serta pengelolaan website kemkes.go.id

4) **Pengelolaan Hubungan dengan Media dan Kelembagaan**

Kegiatan indikatif mencakup komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta lembaga non pemerintah. Kegiatan lain dengan mitra yang difasilitasi oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik antara lain seperti rapat, pendampingan pimpinan dalam Raker/RDP dengan DPR/DPD, pendampingan pimpinan dalam kunjungan kerja bersama dewan, serta pendampingan pimpinan pada wilayah binaan.

5) **Pengelolaan Komunikasi Internal dan Kehumasan**

Kegiatan indikatif mencakup pengembangan karir serta peningkatan kapasitas pranata humas dan pengelola kehumasan, sekaligus berkoordinasi dengan Bakohumas dan Humas K/L lainnya. Selain itu, tim kerja juga mengelola *cybertroops*, komunikasi internal, konten *website*, serta penyelenggara melaksanakan berbagai penghargaan di bidang kehumasan.

6) **Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat**

Kegiatan indikatif mencakup semua bentuk layanan informasi dan pengaduan masyarakat yang diberikan sesuai dengan permintaan publik. Kegiatan yang diselenggarakan meliputi pelayanan informasi melalui *signage*, *contact center* 1500567, PPID, LAPOR, Pojok Info, dan ULT.

7) **Penguatan Pelayanan Publik**

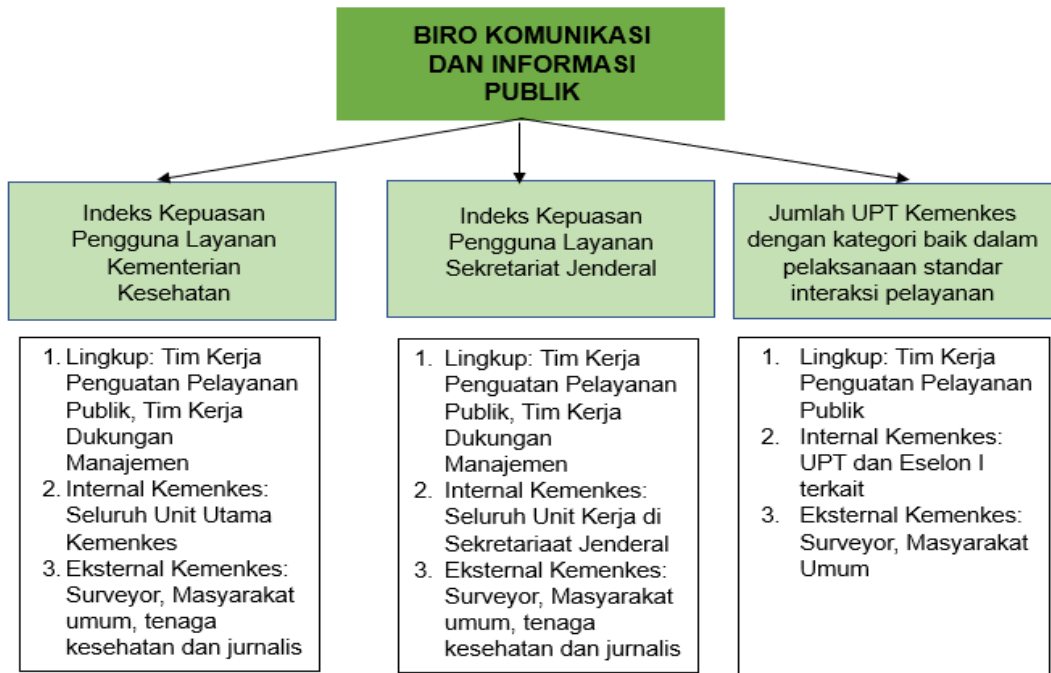
Kegiatan indikatif mencakup pemantauan, evaluasi, serta pengelolaan penilaian kinerja dan reformasi birokrasi pelayanan publik yang termasuk kepatuhan standar layanan, indeks pelayanan, serta survei perilaku interaksi. Selain itu, tim kerja juga melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik dan menyelenggarakan penghargaan terkait pelayanan publik di lingkungan Kemenkes.

8) **Dukungan Manajemen**

Kegiatan indikatif ini mencakup penyusunan rencana kegiatan dan pengelolaan anggaran, Barang Milik Negara (BMN), Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi tata laksana, kearsipan, serta urusan rumah tangga Biro. Melaksanakan pemantauan *monitoring* dan evaluasi kinerja, penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), serta penindaklanjutan hasil audit.

Dalam upaya mencapai RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan dan program di lingkup Sekretariat Jenderal serta Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik maka disusunlah *crosscutting* kinerja di unit kerja sebagai berikut:

Gambar 1. 3 Crosscutting Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik



D. Sistematika Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2025 disusun untuk menggambarkan pencapaian kinerja biro selama tahun berjalan dan membandingkan capaian indikator kinerja tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga memberikan perspektif mengenai tren dan perkembangan organisasi. Perbandingan ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja unit kerja secara keseluruhan. Melalui analisis capaian kinerja, laporan ini juga mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi biro. Dengan pendekatan analitis tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik disusun sebagai berikut:

1. Bab I (Pendahuluan):

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, serta sistematika penyajian laporan.

2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja):

Menjelaskan Perencanaan Kinerja (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, DO Indikator Kinerja Kegiatan) dan Perjanjian Kinerja 2025 Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja):

Menjelaskan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir, analisis capaian kinerja Tahun 2025, sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik selama Tahun 2025.

4. Bab IV (Kesimpulan dan Tindak Lanjut):

Berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025 dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem ini tidak hanya menjadi alat pemantauan kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai pendekatan manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Laporan Kinerja memberikan kerangka kerja yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian sasaran organisasi yang dikalkulasi berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan relevan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik, sebagai entitas yang bertanggung jawab menjalankan fungsi strategis sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah menetapkan proses bisnis dan indikator yang berorientasi pada pencapaian *outcome* dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Pentingnya perencanaan kinerja di Biro Komunikasi dan Informasi Publik terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan program yang dijalankan selaras dengan tujuan strategis organisasi. Perencanaan kinerja yang terstruktur memungkinkan pengalokasian sumber daya secara optimal, penetapan prioritas yang jelas serta antisipasi terhadap tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Dengan demikian, proses *monitoring* dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efektif. Proses bisnis unit kerja digambarkan dalam diagram di bawah ini:

Gambar 2 1 Proses Bisnis Komunikasi dan Informasi Publik



1. Visi dan Misi

Pada Kabinet Merah Putih, visi dan misi Kementerian Kesehatan yaitu “Masyarakat yang Sehat Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas”, adapun upaya mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan melalui 7 (tujuh) misi Kementerian Kesehatan yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup.
- 2) Membudayakan gaya hidup sehat.
- 3) Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil dan terjangkau.
- 4) Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif
- 5) Memperkuat tata kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
- 6) Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju.
- 7) Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Visi dan Misi tersebut merupakan visi misi bersama semua unit di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Tujuan dan Sasaran

2.1 Tujuan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi untuk tercapainya visi. Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta tujuan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik perlu mempublikasikan, mengkomunikasikan kebijakan/program pada semua *stakeholder* dan masyarakat luas secara masif termasuk hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai. Semua hal ini dituangkan dalam rencana kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik, untuk itu telah ditetapkan tujuan strategis dalam perencanaan kinerja pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik:

- 1) Penguatan pengelolaan manajemen isu, strategi komunikasi dan komunikasi risiko.
- 2) Penguatan pengelolaan publikasi (media konvensional dan digital).
- 3) Peningkatan layanan informasi, pengaduan masyarakat, peliputan dan pendokumentasian hasil-hasil pembangunan kesehatan.
- 4) Penguatan hubungan media massa dan pengelolaan media sosial secara profesional.
- 5) Penguatan koordinasi hubungan komunikasi dan jejaring antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.
- 6) Peningkatan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Pustakawan.
- 7) Pengelolaan tata kelola administrasi umum Biro dengan baik, bersih dan transparan.

2.2.Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan untuk Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan promotif dan preventif
- 2) Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit
- 3) Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat
- 4) Meningkatnya kapasitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan, dan laboratorium kesehatan
- 5) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
- 6) Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan
- 7) Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah
- 8) Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan
- 9) Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi Kesehatan
- 10) Meningkatnya kuantitas dan kualitas uji klinis
- 11) Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

Sebagai unit yang diberikan tugas pengelolaan publikasi dan pelayanan publik kementerian, maka sasaran kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik yaitu dengan: **“Meningkatkan akses dan kualitas publikasi komunikasi dan pelayanan publik menuju layanan prima dengan penekanan penguatan strategi komunikasi, penyediaan produk komunikasi berkualitas, SDM Pranata Humas dan Pustakawan yang kompeten, penguatan koordinasi antar lembaga dan pengembangan jejaring dengan didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”**.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut dapat tercapai untuk kurun lima tahun ke depan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu:

Gambar 2 2 Sasaran Strategis Biro Komunikasi dan Informasi Publik



3. Strategi

Untuk mewujudkan agenda pembangunan dalam RPJMN, maka Biro Komunikasi dan Informasi Publik menuangkan strategi dalam Rencana Aksi Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai berikut:

Gambar 2 3 Strategi Publikasi Komunikasi dan Pelayanan Publik



4. Indikator Kinerja

Merujuk pada revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan ditetapkan bahwa Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen satuan kerja. Dalam rangka mencapai sasaran program yang dimaksud, Biro Komunikasi dan Informasi Publik diberikan amanah dalam menjaga citra dan reputasi Kementerian Kesehatan melalui penyelenggaraan kegiatan pengelolaan publikasi dan pelayanan publik. Sehubungan Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan 2025-2029 ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2025, maka indikator pencapaian sasaran yang berlaku sampai dengan triwulan III masih mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan TA 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2 1 Matriks Perbandingan Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2022-2025 (Sebelum Penerbitan Rencana Strategis 2022-2025)

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	2022		2023		2024		2025	
			T	R	T	R	T	R	T	R
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	82	B06: 85,34 B12: 86,28	83	B06: 88,20 B12: 89,36	83	B06: 89,36 B12: 90,17	83	89,67
		Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	30	25	37	46	40	44	40	41

Sejak ditetapkannya Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel 2 2 Matriks Perbandingan Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2022-2025 (Sesudah Penerbitan Rencana Strategis 2025-2029)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI
		2025	2026	2027	2028	2029	2025
Meningkatnya Pelayanan dan Pengelolaan Komunikasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	77	78	80	82	85	85,79

SASARAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI
		2025	2026	2027	2028	2029	2025
dan Informasi Publik	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN						
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	77	78	80	82	85	81,47
	Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	40	70	105	140	166	41

5. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Untuk memudahkan perhitungan Indikator Kinerja berdasarkan Rencana Strategis 2022-2024 maka disusun definisi operasional kedua IKK sebagai berikut:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi (berita/publikasi) kesehatan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Cara Perhitungan: Pengukuran melalui survei dengan nilai IKM kategori Baik sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan

Definisi Operasional: Kategori baik adalah jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka penilaian di atas 70.

Cara Perhitungan: Melakukan penilaian melalui survei dengan angka *range* standar penilaian sebagai berikut : 91-100 Prima; 81-90 Sangat Baik; 71-80 Baik; 61-70 Cukup; 51-60 Kurang; dan 0-50 Buruk.

Sehubungan dengan revisi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Indikator Kinerja yang saat ini berlaku mengalami perubahan sesuai dengan penjabaran di bawah ini:

1) INDIKATOR KINERJA PROGRAM

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan hasil penilaian kepuasan pengguna layanan (internal dan eksternal) dari seluruh unit utama Kementerian Kesehatan yang diperoleh melalui berdasarkan survei kepada responden terpilih dari 8 unit utama dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait PermenpanRB tersebut.

Cara Perhitungan: Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei dari seluruh unit utama Kementerian Kesehatan berdasarkan 9 unsur layanan dengan *range* standar penilaian sesuai peraturan sebagai berikut: 88,31-100 Sangat Baik; 76,61-88,30 Baik; 65,00-76,60 Kurang Baik; dan 25,00-64,49 Tidak Baik

2) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan hasil penilaian kepuasan pengguna layanan (internal dan eksternal) di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang diperoleh melalui berdasarkan survei kepada responden terpilih dari 8 unit utama dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait PermenpanRB tersebut.

Cara Perhitungan: Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan diperoleh dengan cara menghitung hasil survei dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan 9 unsur layanan dengan *range* standar penilaian sesuai peraturan sebagai berikut: 88,31-100 Sangat Baik; 76,61-88,30 Baik; 65,00-76,60 Kurang Baik; dan 25,00-64,49 Tidak Baik.

b. Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan

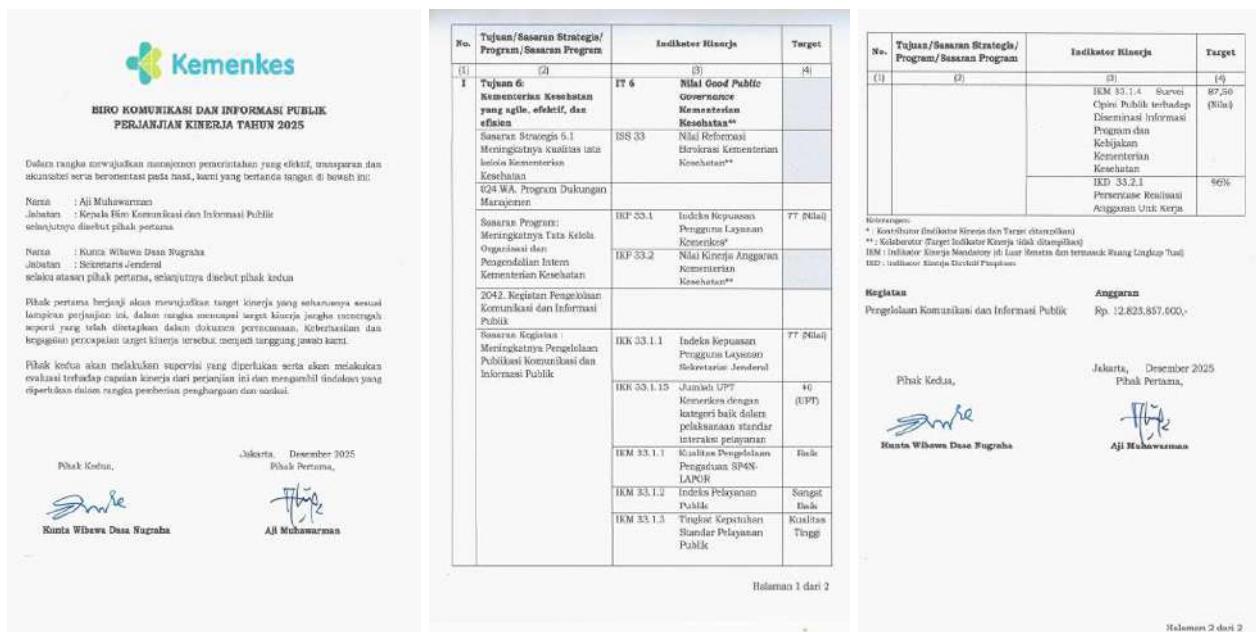
Definisi Operasional: Kategori baik adalah jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka penilaian di atas 70.

Cara Perhitungan: Melakukan penilaian melalui survei dengan angka *range* standar penilaian sebagai berikut : 91-100 Prima; 81-90 Sangat Baik; 71-80 Baik; 61-70 Cukup; 51-60 Kurang; dan 0-50 Buruk.

B. Perjanjian Kinerja 2025

Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan telah ditetapkan target-target sasaran indikator kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis 2025-2029.

Gambar 2 4 Dokumen Perjanjian Kinerja TA 2025 antara Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan Sekretaris Jenderal



The image shows two pages of a Performance Agreement (PK) document for 2025. The left page is the cover page, and the right page is the main content page. Both pages feature the Kemenkes logo at the top left. The cover page includes the title 'BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025' and the names of the signatories: Rima Wibawa Dasa Nugraha (Head of the Office) and Aji Muhawarman (Secretary General). The main content page contains a table with columns for No., Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program, Indikator Kinerja, and Target. The table lists various strategic goals and programs, such as 'Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien' and 'Sasaran Strategis 5.1: Meningkatkan kualitas tata laksana Kementerian Kesehatan'. The table also includes specific indicators like 'Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan**' and 'Nilai Referensi Birokrasi Kementerian Kesehatan**', along with their respective targets. The document is signed by Rima Wibawa Dasa Nugraha and Aji Muhawarman on December 2025. The page number 'Halaman 1 dari 2' is visible at the bottom of the first page, and 'Halaman 2 dari 2' is visible at the bottom of the second page.

Target capaian indikator kinerja kegiatan untuk tercapainya sasaran meningkatkan pengelolaan komunikasi publik dari program kegiatan pengelolaan komunikasi publik adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis

Sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan dimaknai sebagai penguatan sistem pengelolaan organisasi yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Peningkatan tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik berkontribusi dalam penguatan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan melalui salah satu pencapaian indikator “Indeks Pelayanan Publik”. Indikator ini mencerminkan kualitas tata kelola organisasi, efektivitas manajemen kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

b. Sasaran Program

Sasaran program meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan diarahkan pada penguatan sistem manajemen, pengawasan, dan pengendalian internal agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Pencapaian sasaran program di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes sebagai cerminan kualitas pelayanan publik, serta Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kesehatan yang diampu oleh Biro Keuangan dan BMN untuk menggambarkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.

c. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan meningkatnya pengelolaan publikasi komunikasi dan informasi publik diarahkan untuk memastikan tersedianya layanan komunikasi dan informasi yang berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui beberapa indikator yaitu:

- 1) Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra Kemenkes
 - a) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal
 - b) Jumlah UPT Kementerian Kesehatan dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan
- 2) Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Perjanjian Kinerja
 - a) Kualitas pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR
 - b) Indeks pelayanan publik
 - c) Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik

- d) Survei opini publik terhadap diseminasi informasi program dan kebijakan Kementerian Kesehatan
- e) Persentase realisasi anggaran unit kerja yang diampu oleh Biro Keuangan dan BMN

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengukur kinerja nyata pengelolaan publikasi komunikasi dan informasi publik, baik dari sisi kualitas layanan, kepatuhan standar, maupun efektivitas penggunaan anggaran. Capaian yang diperoleh menjadi dasar penilaian kinerja unit kerja serta bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan bagian esensial dari manajemen yang bertujuan untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja melalui perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan dengan menganalisis kesesuaian target dan realisasi dari setiap indikator kinerja kegiatan yang telah dirumuskan. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme evaluasi yang memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan strategis yang ditentukan.

Didasarkan atas informasi kinerja atau gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator yang diukur, maka akan ditindaklanjuti sebagai bagian pembinaan dan perencanaan kedepan sehingga setiap program atau kegiatan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Biro Komunikasi dan Informasi Publik melakukan pengukuran kinerja secara periodik dan dibahas dalam rapat koordinasi staf rutin yang dihadiri pimpinan unit kerja, ketua tim kerja dan staf.

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik yaitu:

MENINGKATNYA PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Program dan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan (IKP);
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal (IKK); dan
3. Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan (IKK)

Adapun sebelum disahkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 pada Oktober 2025, indikator yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja masih mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2022–2024, sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi; dan

2. Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan (IKK)

B. DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

Pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan pada kurun waktu Renstra, namun demikian perubahan setiap tahun akan terlihat dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Tabel 3. 1 Matriks Target dan Capaian Kinerja TA 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	T	R
			2025	2025
Sebelum Pengesahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029				
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83	89,67
		Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40	41
Setelah Pengesahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029				
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Indikator Kinerja Program		
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes	77	85,79
		Indikator Kinerja Kegiatan		
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	77	81,47

		Jumlah UPT Kemenkes dengan Kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40	41
--	--	--	----	----

Dilihat dari capaian masing-masing indikator tahun 2025, Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat melaksanakan dan mencapai sasaran kinerja dengan baik. Adapun uraian capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pertama (Sebelum Pengesahan RENSTRA)

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi

Tabel 3. 2 Matriks Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pengelolaan Komunikasi dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi	83	89,67

Definisi Operasional Indikator

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan informasi (berita/publikasi) kesehatan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tujuan Pelaksanaan Indikator

- Mengukur tingkat kepuasan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi kebijakan kesehatan yang telah dilakukan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik satu kali dalam satu tahun anggaran;
- Mengetahui perubahan (peningkatan/penurunan) kepuasan masyarakat dari periode sebelumnya;
- Menginventarisasi area layanan publikasi yang perlu diperbaiki;

- d) Mengetahui kebutuhan dan keinginan (*need and want*) masyarakat terhadap informasi kesehatan; dan
- e) Mengetahui kebiasaan masyarakat dalam merespon isu kesehatan dan berita/informasi yang berpotensi hoaks.

Cara Perhitungan Indikator

Dalam mengukur IKM, indikator dan parameter merujuk PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 indikator/unsur yang terdiri dari:

- a) Persyaratan
- b) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- c) Waktu Penyelesaian
- d) Biaya/Tarif
- e) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f) Kompetensi Pelaksana
- g) Perilaku Pelaksana
- h) Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan
- i) Sarana dan Prasarana

Guna mencapai tujuan indikator, maka parameter dari 9 unsur tersebut dapat dikembangkan agar mencerminkan aspek layanan terkait pemberitaan dan publikasi secara lebih spesifik dan relevan. Dengan demikian, hasil survei menjadi lebih akurat dalam menilai efektivitas pengelolaan berita dan publikasi di berbagai *platform* yang digunakan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu: survei kuantitatif dengan metode *cross sectional study* yang menggunakan teknik survei dengan *purposive random sampling* dengan *margin error* maksimal 5%, dan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert (dengan nilai interval sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017). Responden terdiri dari tenaga kesehatan, jurnalis dan masyarakat umum. Nilai IKM Total 2025 mencapai 3,59 (skala 4) atau 89,67 (skala 100), tergolong sangat baik. Jika diamati sejak tahun 2023, performa pengelolaan media Kemenkes sudah dinilai sangat baik dan mengalami peningkatan, meskipun di tahun ini mengalami sedikit penurunan (0,01 poin). Masyarakat umum menilai performa media Kemenkes semakin baik setiap tahunnya. Diantara tiga kelompok responden, jurnalis yang paling kritis dalam menilai performa pengelolaan media Kemenkes. Data-data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dengan formulasi yang sudah ditetapkan dalam PermenPANRB. Kemudian, dianalisis untuk mengetahui area dari parameter yang menjadi prioritas untuk dipertahankan atau yang harus diperbaiki.

Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target IKK

Untuk mencapai target IKK yang ditetapkan, telah dilakukan kegiatan publikasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran *Paid, Earned, Shared, dan Owned (PESO) Media*:

- a) Publikasi Berita di *website.kemkes.go.id*
- b) Publikasi Konten di Akun Media Sosial Kemenkes (Facebook, X.com, Instagram, YouTube, TikTok).
- c) Wawancara media dengan juru bicara atau pejabat Kemenkes
- d) *Media Briefing* dan Jumpa Pers
- e) Reportase Berita
- f) Peliputan dan Dokumentasi
- g) Siaran Radio Kesehatan
- h) *Podcast* Kemencast
- i) Penerbitan Majalah Mediakom
- j) Pelibatan *Influencer* atau Pemengaruh di Media Sosial
- k) Publikasi Advertorial di Media Cetak dan Media Sosial
- l) *Talkshow* di TV dan Radio

Hasil/Keluaran

- a) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- b) Evaluasi dan rekomendasi terkait perbaikan layanan

Analisis Keberhasilan / kegagalan Pencapaian Indikator:

a) Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target

Untuk mencapai target indikator yang ditetapkan, telah dilakukan kegiatan publikasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media (*PESO media*) sebagai berikut:

- 1) Publikasi Berita di *website* Kemenkes
- 2) Publikasi Konten di Akun Media Sosial Kemenkes (Facebook, X.com, Instagram, YouTube, TikTok).
- 3) Wawancara media dengan juru bicara atau pejabat Kemenkes
- 4) *Media Briefing* dan Jumpa Pers
- 5) Reportase Berita
- 6) Peliputan dan Dokumentasi
- 7) Siaran Radio Kesehatan

- 8) *Podcast* Kemencast
- 9) Penerbitan Majalah Mediakom
- 10) Pelibatan *Influencer* atau Pemengaruh di Media Sosial
- 11) Publikasi Advertorial di Media Cetak dan Media Sosial
- 12) *Talkshow* di TV dan Radio

b) Permasalahan

Dalam pelaksanaan survei IKM, terdapat beberapa tantangan/permasalahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan hasil survei berikutnya yakni masih ada rekomendasi yang diberikan pada survei IKM tahun 2024 belum sepenuhnya dilakukan di lingkup Biro Komunikasi dan Informasi Publik, sehingga perlu dukungan Humas Unit Utama untuk berkontribusi secara aktif dalam melakukan taktik komunikasi yang terintegrasi.

c) Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan bahwa rekomendasi dari survei IKM tahun 2024 belum sepenuhnya dilaksanakan, perlu dilakukan akselerasi progres implementasi rekomendasi tersebut di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Selain itu, dilakukan juga evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan spesifik, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, atau penyusunan prioritas implementasi.

d) Rencana Tindak Lanjut

Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja bersama, pelatihan peningkatan kapasitas SDM humas, serta pembentukan forum komunikasi lintas unit yang fokus pada implementasi hasil survei IKM. Selain itu, akan dijadwalkan pertemuan rutin antara humas untuk berbagi praktik baik dan memantau kemajuan secara kolektif.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kedua (Sesudah Pengesahan RENSTRA)

Jumlah UPT Kemenkes dengan Kayegori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan

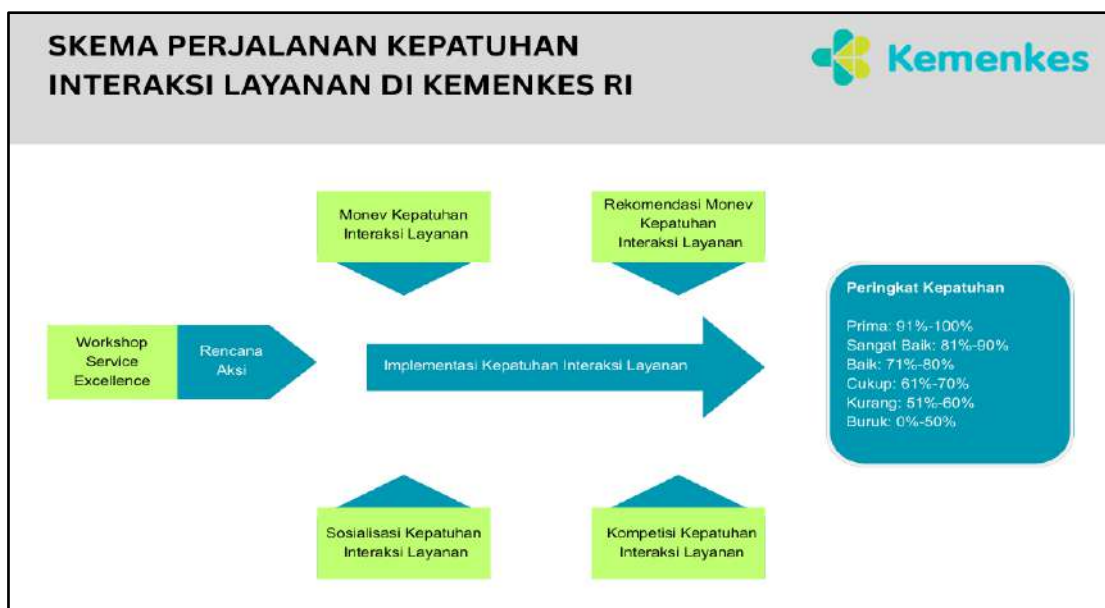
Tabel 3. 3 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah UPT Kemenkes dengan Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik	Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori Baik dalam Pelaksanaan Standar Interaksi Pelayanan	40 UPT	41 UPT

Definisi Operasional:

Kategori “Baik” dalam indikator ini didefinisikan sebagai jumlah UPT Kemenkes yang telah menerapkan interaksi pelayanan publik sesuai Permenkes No. 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan dan memperoleh angka penilaian di atas 77. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan tahun 2025 mempunyai target 40 UPT dengan realisasi sebanyak 41 UPT dengan nilai “Baik”, “Sangat Baik” dan “Prima”. Indikator Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah jumlah UPT dengan minimal kategori “Baik” ketika dilakukan monev berupa survei kepatuhan interaksi perilaku pelayanan publik. Untuk mengukur tingkat kepatuhan tersebut telah dilakukan beberapa pemilahan kriteria calon Unit Lokus Evaluasi (ULE). Adapun skema tahapannya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 3. 1 Skema Kepatuhan Interaksi Layanan Kemenkes RI



Seluruh UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan telah terpapar dengan prinsip *service excellence* agar UPT mampu menyusun rencana aksi peningkatan standar perilaku interaksi layanan sehingga *monitoring* standar perilaku interaksi layanan dapat dilakukan. Selanjutnya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menjalankan pengawasan standar perilaku interaksi layanan sehingga pelaksanaan standar perilaku interaksi layanan yang dilakukan pada satuan kerja tersebut dapat dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode

- a) Survei kepatuhan layanan interaksi ini menggunakan metode *mystery guest* atau *mystery shopping*.
- b) *Mystery guest* adalah salah satu teknik survei dalam menilai kualitas pelayanan publik dengan cara menugaskan surveyor untuk berkunjung ke unit pelayanan dengan berpura-pura sebagai pengguna jasa untuk mengalami, mengamati, dan menilai kesesuaian layanan dengan standar pelayanan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no 31 Tahun 2014).

Tabel 3. 4 Kriteria Penilaian Kualitas Pelayanan Publik

Nilai	Kriteria
91%-100%	Prima
81%-90%	Sangat Baik
71%-80%	Baik
61%-70%	Cukup
51%-60%	Kurang
0%-50%	Buruk

Objek Survei Penilaian Standar Perilaku Interaksi Layanan Tahun 2025

Terdapat 58 UPT yang menjadi lokus/lokasi target penilaian pada tahun 2025, adapun daftar lokus/lokasi survei kepatuhan sebagai berikut:

Rumah Sakit

- 1) RS Stroke Dr. Mohammad Hatta Bukit Tinggi
- 2) RSUP Dr. Mohammad Hosein Palembang
- 3) RSAB Harapan Kita Jakarta
- 4) RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

- 5) RSUP Hasan Sadikin Bandung
- 6) RSKO Cibubur
- 7) RSUP Persahabatan Jakarta
- 8) RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta
- 9) RSUP H. Adam Malik Medan
- 10) RSUP Ratatotok Buyat
- 11) RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado
- 12) RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
- 13) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
- 14) RS Mata Makassar

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta

Balai Laboratorium Kesehatan

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala Sulawesi Tengah

Balai Kekarantinaan Kesehatan

- 1) BKK Kelas II Pangkal Pinang
- 2) BKK Kelas I Tanjung Pinang
- 3) BKK Kelas II Lhoksumawe Aceh
- 4) BKK Kelas I Bandung
- 5) BKK Kelas I Mataram
- 6) BKK Kelas II Jambi
- 7) BKK Kelas II Bitung
- 8) BKK Kelas I Banjarmasin
- 9) BKK Kelas I Padang
- 10) BKK Kelas I Banda Aceh
- 11) BKK Kelas II Bengkulu
- 12) BKK Kelas I Semarang
- 13) BKK Kelas II Biak
- 14) BKK Kelas I Kupang
- 15) BKK Kelas II Poso
- 16) BKK Kelas II Palangkaraya

Balai Pelatihan Kesehatan

- 1) Bapelkes Mataram
- 2) Bapelkes Cikarang
- 3) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta
- 4) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto

Politeknik Kesehatan Kemenkes

- 1) Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- 2) Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang
- 3) Poltekkes Kemenkes Surakarta
- 4) Poltekkes Kemenkes Bengkulu
- 5) Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- 6) Poltekkes Kemenkes Bandung
- 7) Poltekkes Kemenkes Semarang
- 8) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
- 9) Poltekkes Kemenkes Denpasar
- 10) Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang
- 11) Poltekkes Kemenkes Medan
- 12) Poltekkes Kemenkes Banda Aceh
- 13) Poltekkes Kemenkes Jambi
- 14) Poltekkes Kemenkes Palu
- 15) Poltekkes Kemenkes Jayapura
- 16) Poltekkes Kemenkes Malang
- 17) Poltekkes Kemenkes Manado
- 18) Poltekkes Kemenkes Mataram
- 19) Poltekkes Kemenkes Kupang
- 20) Poltekkes Kemenkes Ternate
- 21) Poltekkes Kemenkes Sorong
- 22) Poltekkes Kemenkes Ambon

Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepatuhan Interaksi

Diawali penentuan lokus penilaian dan pembuatan *timeline* kegiatan. Dilanjutkan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penguatan secara daring oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Selanjutnya dilakukan pengambilan data survei lapangan, pengolahan data, analisis dan rekomendasi perbaikan sesuai butir instrumen penilaian.

Gambar 3. 2 Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Survei Interaksi Layanan



Rekrutmen surveyor untuk pelaksanaan kepatuhan interaksi pelayanan publik menggunakan jasa pihak ketiga. Surveyor yang akan berperan sebagai tamu misteri (*mystery guest*) mendapatkan pelatihan oleh konsultan. Pengetahuan terkait instrumen dan objek UPT menjadi bekal ketika turun ke lapangan. Pada saat turun ke lapangan, surveyor didampingi staf Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan penilaian kepatuhan interaksi layanan, surveyor melakukan penyamaran menjadi masyarakat umum yang membutuhkan informasi atau menjadi pasien atau yang mengamati langsung proses pelayanan publik secara rahasia.

Gambar 3. 3 Pelaksanaan Survei Kepatuhan Interaksi Pelayanan Publik Poltekkes Maluku



Setiap titik UPT pengamatan dilakukan oleh minimal 1 orang petugas dari pihak ketiga dan 1 pendamping. Khusus rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada banyak konsumen, maka petugas melakukan 2 kali pengamatan rahasia yakni pelayanan di waktu pagi dan siang. Sedangkan untuk jenis pelayanan lainnya akan menyesuaikan, karena jumlah konsumen yang mendapat layanan lebih sedikit. Sebagian besar pelayanannya dilakukan secara *online*.

Sosialisasi Program ke SDM Institusi Layanan UPT

Program penilaian kepatuhan interaksi pelayanan publik yang sudah dibakukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 33 tahun 2019 ini sudah disosialisasikan melalui Surat

Edaran Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Dalam edaran tersebut menjelaskan mekanisme penilaian dan rentang waktu penilaian yang sudah ditetapkan. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan kepada unit pelaksana teknis (UPT) untuk memberikan penjelasan merinci mengenai alat penilaian/*tools*/borang yang dapat UPT pelajari dan melakukan penilaian secara mandiri.

Survei Lapangan

Selanjutnya, UPT tersebut akan mendapat kunjungan *monitoring* dan evaluasi secara rahasia oleh SDM yang terdiri dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Satuan kerja pembina di atasnya sebagai contoh apabila terkait pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi di rumah sakit, maka satuan kerja yang terlibat adalah Sekretariat Direktorat Pelayanan Kesehatan.

Kemudian hasil *monitoring* dipaparkan dihadapan manajemen dan pimpinan UPT pada hari terakhir kunjungan. Petugas juga memberikan beberapa catatan dan rekomendasi perbaikan pelayanan selanjutnya. Rekomendasi disertai dengan hasil temuan beberapa interaksi layanan yang untuk mendapat perhatian untuk perbaikan.

Alat Penunjang Penilaian

Dalam melakukan penilaian, *surveyor* harus membawa alat penunjang yang dapat memperlancar pelaksanaan penilaian. Alat tersebut berupa alat perekam suara, perekam gambar, surat tugas dan Surat Perjalanan Dinas dari Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Alat kelengkapan penunjang penilaian ini harus disiapkan oleh setiap petugas yang sudah mendapat surat tugas penilaian sebelum turun ke lapangan melaksanakan penilaian kepatuhan. Petugas juga harus mempersiapkan perencanaan pergi dan pulang, berupa tiket perjalanan dan penginapan yang sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

a) Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target

- 1) Pembinaan, pendampingan pelayanan publik
- 2) Pengalaman masyarakat terhadap penerimaan pelayanan publik dari UPT di lingkungan Kementerian Publik
- 3) Pembinaan kepada unit layanan publik yang akan menjadi sampel penilaian kepatuhan standar pelayanan publik.

b) Permasalahan

- 1) Belum optimalnya komitmen UPT dalam mengimplementasikan standar interaksi pelayanan publik
- 2) Belum optimalnya pembinaan dari Unit Eselon I yang bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam peningkatan kualitas standar pelayanan publik.

c) Pemecahan Masalah

- 1) Perlu penguatan pembinaan dari Unit Eselon I bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- 2) Dilakukan pemetaan awal dan *monitoring* kepatuhan pelayanan publik di lingkungan UPT Kementerian Kesehatan secara berkala

d) Rencana Tindak Lanjut

- 1) Membuat program bersama dengan Unit Eselon I terkait dalam rangka optimalisasi pembinaan UPT
- 2) Melakukan pemetaan dan berkoordinasi dengan Unit Eselon I sehingga UPT terkait dapat melakukan *self-assessment* terlebih dahulu dengan indikator yang ada.
- 3) Mengupayakan pelaksanaan survei kepatuhan interaksi pelayanan publik setelah lokus mempersiapkan diri dengan perbaikan layanan publiknya.
- 4) Melakukan *monitoring* dan evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik kepada unit layanan publik melalui Program Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri institusional.

1. Indikator Kinerja Program (IKP) Sesudah Pengesahan RENSTRA: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan

Tabel 3. 5 Indikator Kinerja Program (IKP) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan	77	85,79

Definisi Operasional:

Hasil penilaian kepuasan pengguna layanan dari seluruh pengguna layanan (internal dan eksternal) di Kementerian Kesehatan yang diperoleh melalui pengukuran berdasarkan survei kepada responden terpilih dan perhitungan indeks kepuasan masyarakat dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan perubahan terkait PermenPANRB tersebut.

Definisi operasional digunakan untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman mengenai aspek-aspek yang dievaluasi, sedangkan pengukuran dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap 10 aspek layanan yang diukur dalam Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Kesehatan Tahun 2025, yang meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana termasuk sarana dan prasarana online. Seluruh variabel tersebut diukur menggunakan skala sikap 1 sampai dengan 4 (1 = sangat tidak puas sampai dengan 4 = sangat puas) yang mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan.

Metode

Pelaksanaan SKPL Kemenkes tahun 2025 dilakukan melalui mekanisme pengisian kuesioner secara daring (*online*) dan luring (*offline*) di empat lokus utama, yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pemilihan dua mode pengisian ini dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan partisipasi responden sekaligus memastikan keterwakilan dari berbagai kelompok pengguna layanan, baik yang memiliki akses digital maupun yang terbatas pada interaksi langsung di unit pelayanan.

Kegiatan pengumpulan data di lapangan melibatkan enumerator yang bertugas membantu responden dalam pengisian kuesioner serta memastikan keakuratan dan kelengkapan data. Enumerator mencatat jawaban responden pada kuesioner cetak dan kemudian memasukkannya ke dalam sistem *Google Forms*, atau langsung membantu pengisian secara digital jika kondisi memungkinkan. Mekanisme ini dirancang agar proses pengumpulan data berjalan efisien, seragam, dan mengurangi potensi bias pengisian. Adapun Terkait metode analisis data, SKPL Kemenkes 2025 mengandalkan dua pendekatan analisis data, yakni analisis statistik deskriptif dan analisis konten.

Objek Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan

Survei mencakup sejumlah delapan satuan kerja utama dan 40 UPT di lingkungan Kemenkes yang mewakili berbagai jenis layanan publik. Responden dipilih menggunakan

teknik penyampelan bertujuan dengan dua kriteria utama, yaitu: (1) berusia minimal 17 tahun dan pernah menggunakan layanan di salah satu unit pelayanan Kemenkes minimal satu kali, dan (2) menggunakan layanan tersebut dalam satu tahun terakhir. Kriteria ini ditetapkan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman aktual pengguna layanan. Untuk menjamin keterwakilan, jumlah target responden ditetapkan sekitar 3.000 orang yang tersebar di empat wilayah utama Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Pemilihan lokus ini didasarkan pada prinsip representasi wilayah dan karakteristik layanan: Jakarta mewakili pusat administratif dan layanan tersibuk, Medan sebagai simpul layanan regional di Sumatera, Surabaya sebagai kota metropolitan padat di Jawa Timur, dan Makassar sebagai representasi kawasan timur Indonesia dengan ragam UPT yang cukup lengkap.

Pelaksanaan Kegiatan Survei

Tahapan pelaksanaan SKPL Kemenkes 2025 dirancang secara berurutan untuk menjamin efektivitas kegiatan dan validitas hasil. Kegiatan dimulai dengan penyusunan dan penandatanganan dokumen kerja sama, dilanjutkan dengan koordinasi, penentuan sampel, finalisasi instrumen, serta penunjukan enumerator.

Setelah pelatihan enumerator yang dilaksanakan secara daring oleh tim RDSI FEB UGM, kegiatan lapangan dilakukan melalui pengumpulan data kuesioner, disusul dengan validasi, input data, serta wawancara mendalam.

Selanjutnya, dilakukan analisis data, penyusunan laporan, dan reviu bersama antara tim peneliti UGM dan Kemenkes untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Seluruh tahapan ini dirancang untuk menjamin proses penelitian berlangsung efektif, terukur, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti empiris.

Gambar 3. 4 Dokumentasi Pemaparan Hasil SKPL Kemenkes Tahun 2025



Hasil/Keluaran

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Kesehatan Tahun 2025 menunjukkan Indeks Kepuasan sebesar 85,79 yang melampaui target Renstra sebesar 77,00 dan berada pada kategori Baik, mencerminkan kinerja pelayanan yang secara umum telah

memenuhi ekspektasi pengguna. Aspek layanan dengan kinerja tertinggi meliputi Kompetensi Pelaksana (87,18), Perilaku Pelaksana (86,63), serta Sarana dan Prasarana Offline (86,39), yang menegaskan kekuatan utama pelayanan Kemenkes pada kualitas sumber daya manusia dan dukungan fasilitas fisik. Sebaliknya, Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (84,50), Waktu Penyelesaian (84,74), serta Biaya/Tarif (84,79) menjadi aspek dengan skor terendah dan ditetapkan sebagai prioritas perbaikan, khususnya terkait kepastian waktu layanan, transparansi biaya, kejelasan alur dan prosedur, serta efektivitas pengelolaan pengaduan dan layanan digital, termasuk stabilitas dan kemudahan akses aplikasi/*website*.

Pada tingkat Satuan Kerja Utama, seluruh unit mencatat nilai kepuasan di atas target Renstra, dengan Ditjen Penanggulangan Penyakit memperoleh skor tertinggi dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat skor terendah namun tetap berada dalam kategori baik. Variasi capaian antar satker menunjukkan peluang penguatan kinerja melalui benchmarking dan replikasi praktik baik, sehingga secara keseluruhan SKPL 2025 menegaskan bahwa kualitas pelayanan Kementerian Kesehatan berada pada kategori baik, melampaui target kinerja, dengan arah peningkatan berkelanjutan pada aspek-aspek prioritas perbaikan.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (Sesudah Pengesahan RENSTRA): Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

Tabel 3. 6 Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (IKK) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Pengelolaan Komunikasi Publik dan Informasi Publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	77	81,47

Sehubungan dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada lingkup Sekretariat Jenderal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari satu rangkaian Survei Kepuasan Pengguna Layanan di tingkat Kementerian Kesehatan, maka definisi operasional, metode pengumpulan data, instrumen, serta tahapan pelaksanaannya disusun dan dilaksanakan secara seragam. Keseragaman ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi metodologis, menjamin keterbandingan hasil antar unit kerja, serta memastikan bahwa

pengukuran kepuasan pengguna layanan dilakukan berdasarkan standar nasional yang sama, sebagaimana pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang berlaku.

Adapun perbedaan pelaksanaan survei pada lingkup Sekretariat Jenderal terletak pada objek yang dinilai serta hasil atau keluaran yang dihasilkan. Objek survei difokuskan pada jenis layanan dan fungsi yang berada dalam kewenangan Sekretariat Jenderal, sehingga karakteristik responden, konteks pelayanan, serta isu yang muncul menjadi lebih spesifik. Dengan demikian, hasil dan keluaran survei tidak hanya menggambarkan capaian kepuasan pengguna layanan secara umum, tetapi juga memberikan dasar analitis yang lebih tajam untuk perumusan rekomendasi perbaikan dan penguatan kualitas pelayanan pada lingkup Sekretariat Jenderal.

Objek Survei Penilaian Standar Perilaku Interaksi Layanan Tahun 2025

Objek pada survei ini difokuskan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang berperan sebagai koordinator dan pemberi dukungan administrasi bagi seluruh unit kerja di Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 Pasal 10, Sekretariat Jenderal memiliki fungsi strategis yang meliputi koordinasi kegiatan dan program, penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penataan organisasi dan tata laksana, advokasi hukum, serta pengelolaan barang milik negara. Dalam pelaksanaan survei ini, objek pengukuran ditetapkan secara representatif melalui pengambilan sampel pada tiga unit kerja utama, yaitu Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, serta Biro Umum, yang mencerminkan ragam layanan administratif dan pendukung yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal.

Hasil/Keluaran

Indeks Kepuasan Layanan pada Sekretariat Jenderal sebesar **81,47** menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara umum telah berada pada kategori baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hasil survei menegaskan bahwa aspek sarana dan prasarana layanan online menjadi area yang paling membutuhkan perhatian, mengingat peran layanan digital yang semakin dominan dalam mendukung proses administrasi dan pelayanan internal. Meskipun sebagian besar pengguna menyatakan bahwa layanan berbasis digital telah digunakan dan membantu percepatan pelayanan, masih terdapat kendala teknis yang memengaruhi kenyamanan dan efektivitas penggunaan, seperti akses aplikasi yang terkadang lambat atau tidak stabil serta proses pendaftaran layanan melalui website yang tidak selalu berjalan mulus. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakkonsistenan pengalaman pengguna antar waktu dan platform, sehingga diperlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan keandalan sistem, serta perbaikan tata kelola

layanan digital agar kualitas layanan Sekretariat Jenderal dapat meningkat secara berkelanjutan dan lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian

a) Hal-hal Yang Mempengaruhi Pencapaian Target

- 1) Pengalaman pengguna layanan terhadap kinerja pelayanan Kementerian Kesehatan
- 2) Kesesuaian kualitas aspek layanan terhadap standar yang berlaku

b) Permasalahan

- 1) Perbedaan kualitas pelayanan di masing-masing unit pemberi layanan
- 2) Ketidaksesuaian butir pertanyaan kuesioner
- 3) Ketidaksesuaian kriteria responden yang mengisi survei
- 4) Aksesibilitas QR code formulir survei yang kurang optimal

c) Pemecahan Masalah

- 1) Penyampaian laporan hasil survei dan analisa perbaikan layanan kepada unit utama
- 2) Perbaikan teknis survei berdasarkan hasil diskusi dengan enumerator
- 3) Penyesuaian data sampel responden oleh enumerator sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan

d) Rencana Tindak Lanjut

- 1) *Monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan pengguna layanan
- 2) Evaluasi pelaksanaan teknis survei untuk diaplikasikan pada survei di tahun berikutnya

PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PENDUKUNG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik tidak hanya berfokus pada pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan yang tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut dapat memiliki hubungan langsung dengan capaian IKK atau bersifat tidak langsung, namun tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Indikator pendukung yang dimaksud mencerminkan elemen-elemen tambahan yang berperan dalam memperkuat capaian. Indikator pendukung yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Strategi Komunikasi

1. Media *Monitoring* di Media Massa dan Media Digital dan Analisis Pemberitaan

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes mempunyai berbagai tugas, yang salah satunya melakukan pengelolaan opini publik dan manajemen isu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka perlu dilakukan pemantauan isu media atau media *monitoring*, baik pada media massa maupun media sosial.

Guna melaksanakan salah satu tugasnya dalam mengelola isu, Biro Komunikasi dan Informasi Publik membutuhkan bantuan alat/*tools* media *monitoring* yang dapat mengamati dan mengolah *big data*. Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyadari bahwa perkembangan teknologi komunikasi tidak terhindarkan, di mana perkembangan ini dapat mempengaruhi informasi dan isu yang diterima dan berkembang di masyarakat. Dengan berlangganan *tools* yang dapat mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isi dari sebuah artikel, berita atau naskah berita, iklan media massa, hingga percakapan di media sosial. Isinya dapat berkaitan dengan suatu peristiwa, menyangkut siapa, mengapa bisa terjadi, sumber daya publik yang berkaitan, kebijakan, dan dampak apa yang dapat terjadi atau harus diantisipasi, serta hal lainnya. Dengan menggunakan *tools* media *monitoring* diharapkan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Adapun prosesnya sebagai berikut:

- a) Menggunakan media *monitoring* online *tools* untuk media massa. Biro Komunikasi dan Informasi Publik berperan selaku admin utama, perangkat ini juga dapat digunakan oleh para pejabat fungsional Hubungan Masyarakat di unit utama lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai *user* untuk mengolah data media *monitoring* sesuai kebutuhannya masing-masing.
- b) Menggunakan media *monitoring* online *tools* untuk media sosial bekerja sama dengan *tools* ini juga dapat diakses oleh pengguna di luar Biro Komunikasi dan Informasi Publik guna membantu unit utama/satuan kerja terkait dalam memantau perkembangan percakapan warganet di media sosial.
- c) Berbagai berita dan isu yang termonitor diolah, dianalisis, dan dilaporkan secara berkala (harian pagi dan sore, mingguan, bulanan dan tahunan).
- d) *Monitoring* dan sistem peringatan dini juga dilakukan, jika terdapat isu-isu negatif. Disampaikan melalui *WhatsApp* dan *email*.
- e) Untuk isu-isu khusus tertentu, penyedia jasa *tools* media *monitoring* bersama tim Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyiapkan laporan media *monitoring* khusus.
- f) Kegiatan ini bersifat rutin di tahun berjalan.

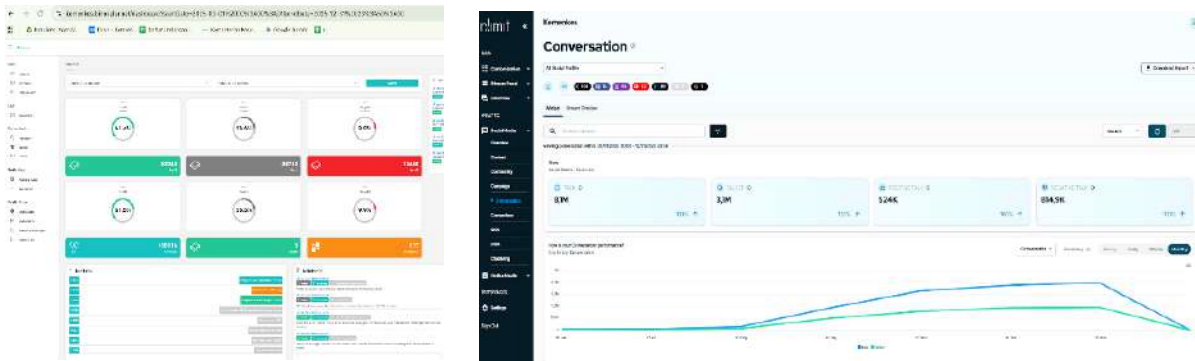
Dengan mengimplementasikan proses tersebut, kegiatan media *monitoring* tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun strategi

komunikasi yang lebih efektif dan responsif. Adapun hasil/keluaran kegiatan tersebut adalah:

- a) Laporan Media *Monitoring* Media Massa (Cetak, Online, TV, dan Radio) selama bulan Januari – Desember tahun 2025:
 - 503 laporan harian
 - 48 laporan media *monitoring* mingguan
 - 12 laporan media *monitoring* bulanan
 - 1 laporan media tahunan
- b) Laporan Media *Monitoring* Isu Khusus sebanyak 189 laporan media *monitoring* isu khusus kesehatan lainnya (Januari-Desember 2025). Laporan Media media *monitoring* khusus untuk memantau isu tertentu yang berpotensi memberikan sentimen negatif.
- c) *Agenda setting biweekly* mengenai topik kesehatan atau isu terkini untuk membahas rencana komunikasi setiap dua minggu.
- d) Isu-isu yang dipantau pada tahun 2025 (Januari-Desember) yakni:
 - Cek Kesehatan Gratis (CKG)
 - Kasus Kekerasan Seksual Dokter PPDS
 - Klarifikasi Kemenkes Terkait Isu Tukang Gigi
 - Konferensi Pers KKI terkait Pelanggaran Etik dan Disiplin Tenaga Medis
 - Upaya Bersama Pembinaan PPDS RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan Universitas Padjajaran
 - Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap Kemenkes
 - Kemenkes akan memberikan Surat Izin Praktik Dokter Umum untuk Peserta PPDS
 - Pemindahantugasan dr. Piprim B. Yanuarso
 - Polemik 121 Guru Besar Universitas Indonesia
 - Jaminan Kesehatan Nasional terkait KRIS
 - Peluncuran Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024
 - Operasi Kembar Siam Nadia dan Nadira di RSHS
 - Hasil temuan CKG
 - *Asia Pacific Leaders Malaria Alliance* di 9 Bali 2025
 - *Global Cervical Elimination Forum 2025*
 - Peluncuran Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah
 - Balita Cacingan di Sukabumi
 - Tanggapan Kemenkes Terhadap Dokter Piprim
 - Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di Sumenep, Jawa Timur
 - Polemik Provokatif Demo Nakes di media sosial
 - Keracunan Pangan pada Makan Bergizi Gratis (MBG)

- Pernyataan Menkes saat Rakor Bencana di Istana
- Prescon Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Imunisasi Heksavalen
- Kunjungan Kemenkes ke Suku Badui
- Meninggalnya Ibu Hamil Lahiran di RSUD Papua

Gambar 3. 5 Media Monitoring Tools



2. Komunikasi risiko

International Health Regulations (IHR) 2005 menyebutkan bahwa komunikasi risiko merupakan salah satu kapasitas inti yang wajib dibangun dan dijalankan oleh setiap negara anggota *World Health Organization (WHO)* sebagai bagian dari perjanjian global untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan global dalam mendeteksi, merespons, dan menangani ancaman kesehatan masyarakat. Di tingkat nasional, implementasi terhadap IHR, khususnya pada aspek komunikasi risiko, telah dinilai oleh WHO melalui *Joint External Evaluation (JEE)* pada tahun 2017. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan agar dilakukan penguatan kapasitas komunikasi risiko hingga ke tingkat daerah/lokal. Sebagai tindak lanjut, Biro komunikasi dan Informasi Publik tahun 2025 telah menyelenggarakan *workshop* penguatan kapasitas komunikasi risiko penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah di provinsi Jawa Barat pada bulan Desember 2025. Peserta kegiatan tersebut berasal dari lintas Kementerian dan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang mewakili.

Gambar 3. 6 Pelaksanaan Workshop Penguatan Kapasitas Komunikasi Risiko



3. Penanganan Hoaks Kesehatan

Berdasarkan Data Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025, ditemukan adanya 15.993 isu hoaks, dengan hoaks kesehatan menempati urutan ketiga tertinggi sebesar 2.586 isu. Isu-isu hoaks tersebut menyebar di berbagai *platform* digital, seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube. Hoaks yang menyangkut kesehatan memang marak beredar di kalangan masyarakat. Begitu masifnya penyebaran hoaks kesehatan di masyarakat, menjadi salah satu ancaman di dalam kelancaran pembangunan kesehatan nasional. Guna mengedukasi publik tentang cara mencari informasi yang benar dan melawan informasi yang sudah beredar dengan informasi yang benar dan kredibel, Biro Komunikasi dan Informasi Publik tidak secara aktif sendiri bekerja, akan tetapi didukung oleh *support system* yang dikomandoi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan organisasi yang aktif memerangi peredaran hoaks seperti Mafindo, Cek Fakta Media, UNICEF, ICT Watch dan komunitas lainnya. Terdapat beberapa hoaks yang telah ditangani oleh langsung Kemenkes maupun lembaga lainnya, khususnya yang terkait program pembangunan kesehatan, maupun disinformasi yang mengatasnamakan institusi Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan. Sepanjang tahun 2025, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melaporkan 17 konten hoaks yang ditemukan yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk dilakukan *take down*.

Sebelumnya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik secara rutin bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki alat dan sistem terlisensi dari *International Fact-Checking Network* (IFCN) untuk menjaring dan menangani hoaks, khususnya yang mengatasnamakan institusi Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan. Kolaborasi ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga kredibilitas informasi publik dan merespons disinformasi secara cepat dan akurat. Namun, hingga pertengahan tahun

2025, kegiatan ini belum dapat berjalan secara optimal akibat adanya pemblokiran anggaran, yang berdampak pada terbatasnya kapasitas operasional dan hambatan dalam pelaksanaan deteksi serta klarifikasi hoaks secara berkelanjutan. Ke depan diperlukan strategi baru di dalam internal Kemenkes, penyediaan sumber daya, penguatan kapasitas dan kerja sama yang lebih erat dalam penanganan hoaks kesehatan. Termasuk untuk kapasitas pelaksana kegiatan komunikasi/kehumasan di daerah.

Publikasi Media

1. Kementerian Kesehatan Podcast

Podcast adalah siaran yang menampilkan obrolan seputar kesehatan yang dibawakan secara santai dan disiarkan secara langsung maupun *taping* melalui akun YouTube resmi Kementerian Kesehatan RI, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Untuk *Podcast live*, melibatkan penonton untuk bertanya langsung kepada narasumber dengan pertanyaan yang dapat diajukan melalui kolom komentar. *Podcast* Kementerian Kesehatan sendiri bernama **Kemencast** yang bermakna Kementerian Kesehatan *Podcast*.

Gambar 3. 7 Dokumentasi Produksi Konten Kemencast



2. Siaran Radio Kesehatan

Salah satu kanal publikasi Kementerian Kesehatan adalah radio streaming yang dapat diunduh melalui aplikasi Siaran Radio Kesehatan di *Playstore*. Siaran Radio Kesehatan memiliki 8 program yaitu *Talkshow* Keluarga Sehat, *Talkshow* Sehat Wicara, *Talkshow* Exclusive, Siaran Sehat, Berita Kesehatan, Iklan Layanan Masyarakat, *Adlibs*, dan Konten Platform Digital & Artikel Web. Selama Tahun 2025, SRK memproduksi sebanyak 8.160 konten.

Gambar 3. 8 Tampilan Aplikasi Streaming Siaran Radio Kesehatan



a) Siaran Sehat

Program Siaran Sehat dilakukan secara daring bersama narasumber praktisi kesehatan yang telah bekerjasama dengan Kemenkes, membahas tentang info kesehatan terkini, disiarkan secara *live* melalui instagram Kementerian Kesehatan (@kemenkes_ri) dan *relay* di *Youtube* Kemenkes.

Gambar 3. 9 Konten Live Instagram Talkshow Siaran Sehat



b) Berita Kesehatan

Berita Kesehatan yang dibacakan untuk pendengar Siaran Radio Kesehatan update 4-5 berita setiap hari yang dibagikan melalui Siaran Radio Kesehatan.

Gambar 3. 10 Dokumentasi Siaran Radio Kesehatan



c) Talkshow Keluarga Sehat

Talkshow Keluarga Sehat merupakan salah satu program Siaran Radio Kesehatan yang membahas problematika kesehatan sehari-hari yang biasa ditemui di lingkungan keluarga. Disiarkan secara langsung setiap harinya dan dapat diikuti oleh berbagai kalangan. Dibawakan dengan ringan serta melibatkan peran serta dan interaksi (tanya jawab) antara narasumber dan pendengar yang dapat diikuti melalui kanal instagram.

Gambar 3. 11 Dokumentasi Program Talkshow Keluarga Sehat di Radio Kesehatan



d) Talkshow Eksklusif

Talkshow bersama Tim Dokter Staf Komunikasi Kemenkes dan tenaga kesehatan di RS Vertikal Kementerian Kesehatan membahas isu atau tips kesehatan. Disiarkan setiap hari Jumat pukul 14.00-15.00 WIB. Dapat diakses melalui Instagram *Live* di akun Kemenkes RI serta *streaming* di aplikasi radio kesehatan.

Gambar 3. 12 Dokumentasi Program Talkshow Eksklusif di Radio Kesehatan



c) Talkshow Sehat Wicara

Talkshow bersama para *stakeholder* Kementerian Kesehatan RI membahas isu kesehatan terkini. Plot waktu disesuaikan dengan kesiapan jadwal narasumber dan disiarkan selama 60 menit secara *live* maupun *relay*. Talkshow dapat diakses melalui aplikasi Radio Kesehatan maupun Instagram *Live* di akun Kemenkes RI.

Gambar 3. 13 Program Talkshow Eksklusif di Radio Kesehatan



d) Iklan Layanan Masyarakat

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) berisi tentang pesan singkat berupa informasi, atau seruan dan atau ajakan terkait Kesehatan yang disiarkan minimal 25 kali setiap harinya oleh penyiar radio SRK.

Gambar 3. 14 Dokumentasi Sound file ILM radio


File Name	Date	Time	Format	Size
ILM - IMUNISASI MR	14/08/2018	12:04 PM	MP3 Format Sound	1,997 KB
ILM - IMUNISASI ROTAVIRUS	14/08/2023	9:06 AM	MP3 Format Sound	946 KB
ILM - JINGLE ASI 1000 HPK	16/12/2021	7:35 AM	MP3 Format Sound	1,184 KB
ILM - JINGLE CERDIK	24/12/2021	7:26 AM	MP3 Format Sound	1,535 KB
ILM - JINGLE OBAT 5 O	28/12/2021	8:24 PM	MP3 Format Sound	989 KB
ILM - JINGLE RESISTENSI OBAT	22/11/2018	10:52 AM	MP3 Format Sound	1,752 KB
ILM - MUDIK SEHAT 3	8/06/2018	10:22 AM	MP3 Format Sound	1,880 KB
ILM - ROKOK	29/12/2021	9:32 AM	MP3 Format Sound	1,820 KB
ILM - TELINGA SEHAT	18/04/2018	7:12 AM	MP3 Format Sound	1,990 KB
ILM ASI EKSKLUSIF	29/12/2021	10:38 AM	MP3 Format Sound	2,550 KB
ILM DIFTERI (1)	18/04/2018	7:12 AM	MP3 Format Sound	601 KB
ILM DIFTERI (2)	18/04/2018	7:12 AM	MP3 Format Sound	1,043 KB
ILM FLU BURUNG (CEGAH)	18/04/2018	7:24 AM	MP3 Format Sound	425 KB
ILM FLU BURUNG (GEJALA)	18/04/2018	7:24 AM	MP3 Format Sound	459 KB
ILM HIV-AIDS	29/12/2021	10:26 AM	MP3 Format Sound	1,016 KB
ILM IMUNISASI	29/12/2021	9:43 AM	MP3 Format Sound	2,529 KB
ILM INDIKATOR SEHAT	29/12/2021	9:33 AM	MP3 Format Sound	2,556 KB
ILM JINGLE TB	16/12/2021	7:19 AM	WAV File	12,024 KB
ILM KEMENKES KANKER - RIA RAWAN	18/04/2018	7:13 AM	MP3 Format Sound	2,081 KB
ILM KEMENKES PUSKESMAS	29/12/2021	9:11 AM	MP3 Format Sound	2,074 KB
ILM MAJER	29/12/2021	10:12 AM	MP3 Format Sound	2,630 KB
ILM MEROKOK DI ANGGUTAN UMUM	18/04/2018	7:25 AM	MP3 Format Sound	765 KB
ILM PSN CEGAH DBD	29/12/2021	9:44 AM	MP3 Format Sound	926 KB
ILM RADIO MALARIA DAN DBD - KEM...	24/04/2018	12:18 PM	MP3 Format Sound	967 KB
JINGLE - KESEHATAN JIWA	0/09/2023	1:56 PM	MP3 Format Sound	4,280 KB
Jingle HPV	12/01/2024	7:21 AM	MP3 Format Sound	2,010 KB
PASCA PEMILU - POLARISASI JADI DIS...	23/02/2024	11:56 AM	MP3 Format Sound	2,751 KB
PSA - MANFAAT JKN KIS	21/05/2018	10:50 AM	MP3 Format Sound	7,075 KB
SPOT MARS GERMAS	24/12/2021	7:02 AM	MP3 Format Sound	1,505 KB

e) Adlibs

Adlibs adalah improvisasi spontan berupa kata, suara, atau aksi tambahan di luar teks utama dalam siaran *live* yang yang biasanya dilakukan oleh penyiar Siaran Radio Kesehatan.

Gambar 3. 15 Dokumentasi Naskah Adlibs

ADLIBS
CEGAH STUNTING



SOBA SEHAT//


STUNTING ADALAH MASALAH KURANG GIZI KRONIS/ ATAU KURANGNYA ASUPAN GIZI DALAM WAKTU YANG CUKUP LAMA/ SEHINGGA MENYEBABKAN GANGGUAN PERTUMBUHAN PADA ANAK/ YAKNI TINGGI BADAN ANAK LEBIH RENDAH ATAU PENDEK (KERDIL) DARI STANDAR USIANYA//

TIGA HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENCEGAHAN STUNTING/ YAITU PERBAIKAN TERHADAP POLA MAKAN/ POLA ASUH/ SERTA PERBAIKAN SANITASI DAN AKSES AIR BERSIH// DAN HAL TERSEBUT BISA KITA LAKUKAN/ SEPERTI DIANTARANYA :

- PENTINGNYA CALON IBU MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI SAAT HAMIL DAN STIMULASI BAGI JANIN/ SERTA MEMERIKSAKAN KANDUNGAN EMPAT KALI SELAMA KEHAMILAN//
- BAYI MENDAPAT COLOSTRUM AIR SUSU IBU/ DAN SELANJUTNYA HANYA MEMBERIKAN ASI SAJA UNTUK BAYI SAMPAI BERUSIA 6 BULAN//
- PERBANYAK KONSUMSI SUMBER PROTEIN BAGI ANAK-ANAK DALAM MASA PERTUMBUHAN/ DI SAMPING ITU TETAP MEMBIASAKAN UNTUK MENGONSUMSI BUAH DAN SAYUR//
- PANTAU TUMBUH KEMBANGNYA DENGAN MEMBAWA BUAH HATI KE POSYANDU SETIAP BULAN/ BERIKAN JUGA HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN KEKEBALAN DARI PENYAKIT BERBAHAYA MELALUI IMUNISASI//
- ANAK – ANAK PERLU MEMBIASAKAN CUCI TANGAN PAKAI SABUN DENGAN AIR MENGAUR/ SERTA TIDAK BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN//

JADI SOBAT SEHAT/ HARAPAN KITA TENTUNYA ANAK-ANAK INDONESIA DAPAT TUMBUH DAN BERKEMBANG SECARA OPTIMAL DAN MAKSIMAL/ DENGAN DISERTAI KEMAMPUAN EMOSIONAL/ SOSIAL/ DAN FISIK YANG SIAP UNTUK BELAJAR/ SERTA MAMPU BERINOVASI DAN BERKOMPETISI DI TINGKAT GLOBAL//

ADLIBS
STOP TB



SOBAT SEHAT//

TUBERKULOSIS ATAU TB/ DAN JUGA DIKENAL DENGAN SEBUTAN TBC// INI MERUPAKAN PENYAKIT MENULAR YANG DISEBABKAN KUMAN TB/ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS/ YANG MASUK KE TUBUH MELALUI PERNAFASAN// TB MERUPAKAN PENYAKIT MENULAR YANG DAPAT MENYERANG BERBAGAI ORGAN/ TERUTAMA PARU-PARU//

PENULARAN TB SENDIRI TERJADI MELALUI UDARA YANG MENDUNGUNG PERCIKAN DAHAH PENDERITA TB//

TB DAPAT DICEGAH/ KETIKA KONDISI DAYA TAHUN TUBUH ATAU KEKEBALAN TUBUH KITA KUAT// MAKA SOBAT SEHAT/ JAGALAH KEKEBALAN TUBUH KITA DENGAN MENJAGA KESEHATAN DAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)/ SEPERTI :

- MAKAN TERATUR, DENGAN MENU SEIMBANG, SERTA CUKUP SAYUR DAN BUAH;
- MENJAGA KEBERSIHAN DIRI DAN LINGKUNGAN HIDUP;
- BEROLAHRAGA DENGAN BENAR, CUKUP, DAN TERATUR;
- TIDAK MEROKOK, TIDAK MENGONSUMSI ALKOHOL, DAN TIDAK MENYALAHGUNAKAN NAPZA;
- BERISTIRAHAT CUKUP DAN TERATUR;
- DAN SEGERA BEROBAT JIKA SAKIT

FOKUS BERSAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN TBC ADALAH PENEMUAN KASUS DAN PENGOBATAN/ MAKA SETIAP PASIEN TB HARUS DITEMUKAN DAN DIOBATI SAMPAI SEMBUH AGAR PENULARAN TB DI INDONESIA DAPAT DIHENTIKAN//

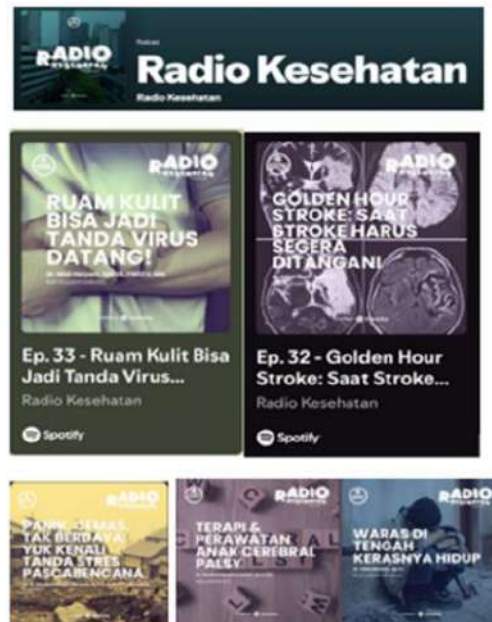
BERAN KELUARGA PADA GERAKAN INI SANGAT PENTING/ KARENA SEMANGAT DAN KEPATUHAN PASIEN UNTUK MINUM DAN MENELAN OBAT DITENTUKAN OLEH DUKUNGAN KELUARGA//

*Disusun dan diteliti oleh tim komunikasi kesehatan dengan tujuan edukasi di rumah sakit

f) Konten Platform Digital

Konten digital Spotify di unggah melalui akun Spotify Radio Kesehatan, sampai dengan akhir Desember 2025 telah diproduksi konten dalam Spotify sebanyak 33 konten.

Gambar 3. 16 Dokumentasi Konten Spotify Radio Kesehatan



g) Siaran *Off Air* Radio Kesehatan

Radio Kesehatan juga melakukan kegiatan off air pada saat pameran Hari Kesehatan Nasional 2025 selama 4 hari yakni 6-10 November 2025 di Balai Kartini. Dalam kegiatan tersebut talkshow off air bersama para dokter dari RS Vertikal, dokter dan praktisi kesehatan seperti dr.Gia Pratama, dr. Samuel J. Olam, maupun juga talkshow dengan pejabat Kementerian Kesehatan seperti Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal dan beberapa pejabat lain, untuk mengangkat topik terkait kebijakan Kementerian Kesehatan.

Gambar 3. 17 Pelaksanaan Talkshow pada Siaran *Off Air* Radio Kesehatan



Sepanjang Januari - Desember tahun anggaran 2025, berikut jumlah Publikasi Media di Siaran Radio Kesehatan (SRK):

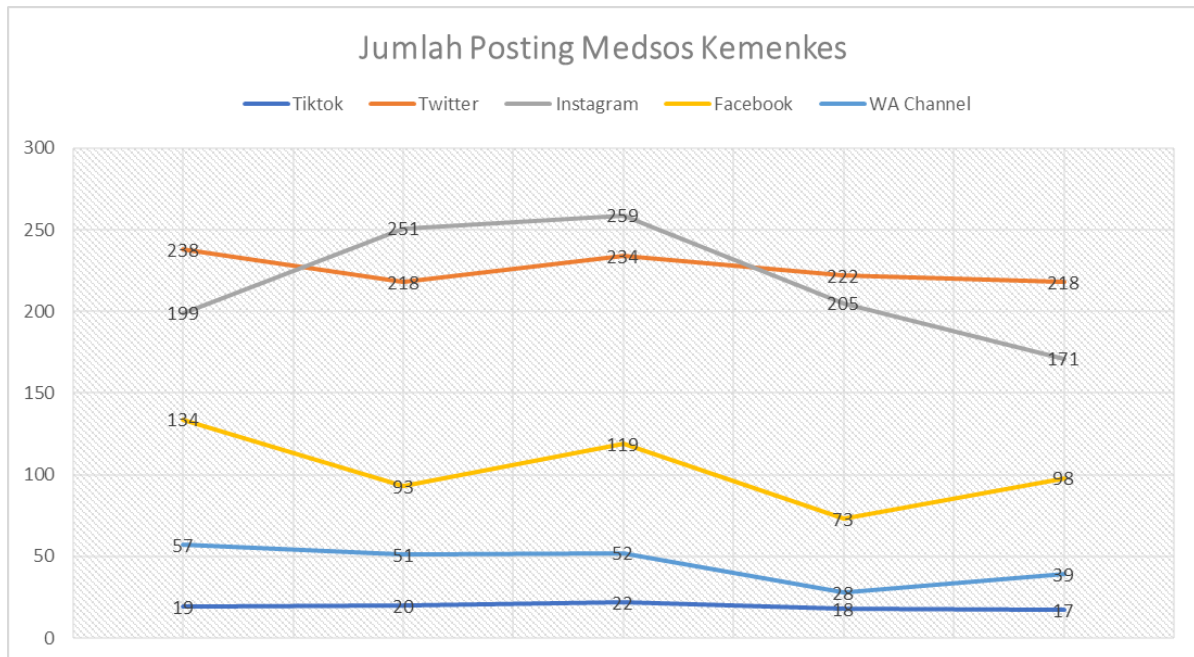
Tabel 3. 7 Publikasi Seluruh Program Siaran Radio Kesehatan

Program Siaran	Bulan											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Siaran Sehat	52	20	19	17	16	15	18	16	21	23	20	17
Berita Kesehatan	95	100	70	85	80	60	90	80	105	115	100	85
Talkshow Keluarga Sehat	13	15	16	12	13	11	19	15	18	21	19	9
Talkshow Eksklusif	5	4	2	2	2	2	2	1	2	0	2	0
Siaran Sehat/Sehat Wicara	3	4	4	1	2	0	1	0	1	1	1	0
Iklan Layanan Masyarakat	570	600	375	425	400	300	450	400	525	575	500	425
Adlibs	152	80	49	60	52	37	62	54	84	92	80	68
Konten Platform Digital	7	39	27	8	4	4	17	19	19	50	6	3
Podcast Live (Kemencast)	3	0	4	2	4	5	1	3	2	2	2	3
Jumlah siaran	900	862	566	612	573	434	660	588	777	879	730	610

3. Pengelolaan Media Sosial

Tim Kerja Publikasi Media juga mengelola berbagai media sosial diantaranya Instagram, X.com, TikTok, YouTube, dan Facebook, serta WA Channel. Setiap media sosial dikelola untuk menyampaikan berbagai informasi di Kementerian Kesehatan mulai dari kegiatan pimpinan (Menkes, Wamenkes, dan Setjen), ucapan hari-hari besar, serta informasi dan edukasi seputar isu kesehatan lainnya.

Tabel 3. 8 Tren Jumlah Konten pada Media Sosial Kementerian Kesehatan



a) Instagram

Tim Kerja Publikasi Media mengelola media sosial Instagram dengan akun resmi @kemenkes_ri. Akun Instagram Kemenkes RI berisi informasi video vertikal dan konten informasi visual berupa poster/infografis. Konten video vertikal berisi tentang *recap* atau *highlight* kegiatan Menkes atau Wamenkes atau konten video edukasi dan informasi kesehatan. Hingga akhir Desember 2025, akun instagram @kemenkes_ri telah diikuti lebih dari 3,2 juta pengikut dan mengunggah sebanyak 4.408 *postingan*

Gambar 3. 18 Konten di Instagram Kemenkes RI



b) X.com (Twitter)

X.com atau Twitter Kemenkes merupakan saluran yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna media sosial melalui cuitan atau *hashtag* tertentu. Akun X atau X.com

Kemenkes adalah @kemenkesRI dan memiliki sekitar 744,6 ribu lebih pengikut. Akun X sangat berguna untuk memantau isu kesehatan dan membentuk serta mengetahui opini publik terkait isu kesehatan tertentu.

Gambar 3. 19 Akun Twitter Kemenkes RI



c) TikTok

Akun TikTok adalah akun yang menyasar generasi Z dan Alpha, yang sangat menyukai informasi kesehatan yang cenderung ringan dan menghibur. Akun TikTok Kemenkes adalah @kemenkesri dengan jumlah pengikut sampai dengan akhir Desember 2025 tercatat sebanyak 331,2 ribu pengikut. Konten yang terdapat pada akun TikTok @kemenkesri adalah konten ringan dan pendek yang umumnya disajikan dalam bentuk audio video.

Gambar 3. 20 Akun dan Konten TikTok Kemenkes RI



d) Facebook

Facebook adalah salah satu media sosial pertama. Meski ekosistem Facebook tidak seramai Instagram dan TikTok, Kemenkes RI juga memiliki akun Facebook dengan nama Kementerian Kesehatan RI. Informasi yang disajikan dalam akun Facebook pada umumnya duplikasi informasi akun Instagram yang disampaikan dengan narasi pengantar yang berbeda mengikuti gaya media sosial Facebook.

Gambar 3. 21 Akun Facebook Kemenkes RI



e) WA Channel

WA Channel adalah akun sosial media baru yang terbentuk pada 12 September 2023. Akun ini merupakan akun informasi satu arah yang terdapat dalam WhatsApp di mana pengguna hanya bisa memberikan reaksi pada setiap postingan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Sampai dengan akhir Desember 2025 tercatat WA Channel Kemenkes diikuti oleh 1,8 juta.

Gambar 3. 22 Publikasi Konten pada Whatsapp Channel



f) Snack Video

Sebagai amplifikasi informasi kesehatan di media sosial, pada Maret tahun 2025 juga telah terbentuk akun Kementerian Kesehatan di platform Snack Video. Sampai dengan akhir Desember 2025 tercatat telah ada 94,5 ribu pengikut dengan total postingan sebanyak 231 postingan.

Tabel 3. 9 Jumlah Publikasi Konten pada Media Sosial Kemenkes RI

Media Sosial	Jumlah Posting dalam Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
TikTok	19	20	22	18	17	17	15	24	18	16	20	28
X.com (X)	238	218	234	222	218	231	209	362	253	282	341	257
Instagram	199	251	259	205	175	194	185	271	199	217	300	304
Facebook	134	93	119	73	98	145	48	133	91	98	106	216
WA Channel	57	51	52	28	39	85	41	54	40	38	27	52
Snack Video	0	0	33	16	13	36	23	29	17	14	10	40
Jumlah Posting	647	633	719	562	560	708	521	873	618	665	804	897

4. Publikasi Q&A melalui Live Instagram

Biro Komunikasi dan Informasi Publik memanfaatkan media sosial untuk tetap memberikan konten dengan informasi yang ringan dan membuka ruang diskusi bersama netizen secara *live*. Program yang dilaksanakan yaitu Instagram *Live* Q&A yang berkolaborasi dengan para narasumber praktisi yang ahli pada bidangnya sesuai dengan tema yang diangkat.

Gambar 3. 23 Publikasi Q&A Melalui Live Instagram



Tabel 3. 10 Publikasi Q&A Melalui Live Instagram

Live Q&A	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0

5. Mediakom

Perkembangan media sosial tidak serta merta mematikan media konvensional seperti majalah. Majalah yang dulu hadir dalam bentuk cetak bertransformasi menjadi majalah digital atau *e-magazine*. Kementerian Kesehatan menerbitkan e-magazine dengan beragam rubrik seperti: Media Utama, Serba Serbi, Info Sehat, Peristiwa, Profil, Kilas Internasional, Galeri Foto, Aku Tahu, Pojok Info, Iklan, Isi Piringku, Resensi Buku, dan Resensi Film. Mediakom yang berbentuk PDF dapat diunduh melalui website Kemenkes www.kemkes.go.id

Tahun 2025, majalah Mediakom yang dapat diterbitkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebanyak satu edisi, yakni Mediakom Edisi 173. Hal ini berbeda dibandingkan pada tahun sebelumnya yang dapat terbit setiap bulan karena menyesuaikan dengan perubahan anggaran yang tersedia pada tahun berjalan.

6. Komik Animasi

Komik animasi merupakan ilustrasi yang dibuat dan disebarluaskan melalui akun media sosial Kemenkes yang bertujuan memberikan ucapan dan informasi dalam kemasan visual yang lebih segar untuk menjaga *engagement follower* media sosial. Komik animasi merupakan bentuk inovasi tim kerja Publikasi Media yang ditujukan untuk menjangkau dan menjaga *engagement* audiens pengikut akun media sosial kemenkes. Komik animasi terdiri ucapan dalam bentuk ilustrasi, isu kesehatan yang dikemas dalam bentuk yang ringan dan disampaikan secara singkat dengan durasi tidak lebih dari dua menit. Berikut postingan Komik animasi pada berbagai akun media sosial Kemenkes:

Gambar 3. 24 Contoh Komik Animasi Produksi 2025



Berikut jumlah produksi Komik animasi yang dipublikasikan melalui media sosial sepanjang Tahun 2025 yang diposting di media sosial Kemenkes:

Tabel 3. 11 Jumlah Produksi Konten Komik Animasi

Jenis Komik Animasi	Jumlah Posting Komik Animasi per Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Ilustrasi dan Animasi Pendek	3	0	3	2	1	1	1	1	2	3	5	2

7. *Live Streaming* dan *Short YouTube*

Live streaming dan *Short YouTube* merupakan bagian sarana amplifikasi dan sosialisasi kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes RI. *Live Streaming* YouTube digunakan untuk mensosialisasikan kegiatan besar seperti acara seminar, pertemuan, atau konferensi pers yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau Unit Eselon I di bawah Kementerian Kesehatan.

Sementara *Short YouTube* merupakan tayangan di bawah enam puluh detik atau di bawah satu menit yang berisi kutipan pesan-pesan kunci narasumber yang kompeten terkait isu kesehatan tertentu. *Short YouTube* biasanya berupa potongan hasil wawancara narasumber pada berbagai program yang ditayangkan di media sosial Kemenkes seperti *Podcast* Kemencast atau Siaran SRK.

Gambar 3. 25 Live Streaming dan short pada YouTube Kemenkes



Sepanjang Januari - Desember tahun anggaran 2025, berikut jumlah Publikasi Media di dalam bentuk *live streaming* dan *short youtube* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Publikasi *Live Streaming* dan *Short YouTube*

JENIS TAYANGAN	Jumlah postingan Per Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Live Streaming	7	6	3	10	8	1	5	10	17	16	10	19
Short	16	31	15	38	10	32	7	6	12	19	0	0

8. Pelibatan *Influencer* di Media Digital

Pada Tahun 2023 dibentuk staf teknis komunikasi transformasi kesehatan dengan nomor SK HK.01.07/MENKES/1425/2023 yang bertugas melakukan sosialisasi terkait transformasi kesehatan, rancangan Undang-Undang Kesehatan, melakukan komunikasi publik dalam penjelasan isu kesehatan strategis dan sensitif, serta memberikan pandangan kepada Menteri Kesehatan terkait opini publik dalam hal transformasi kesehatan.

9. Workshop Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan AI dan Media Sosial

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan workshop yang diikuti oleh admin media sosial akun Kementerian Kesehatan, UPT, maupun Rumah Sakit Vertikal. Kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta secara *offline*, berlangsung pada 30-31 Oktober 2025 bertempat di Bogor dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dengan keterampilan teknis penggunaan AI tools seperti Chat GPT, image generator, video generator. Selain itu dalam workshop tersebut para peserta diberikan penguatan pemahaman serta praktek langsung dalam pembuatan prompt maupun penggunaan aplikasi AI untuk pembuatan konten kreatif yang dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari.

Gambar 3. 26 Kegiatan Workshop Konten Media Digital



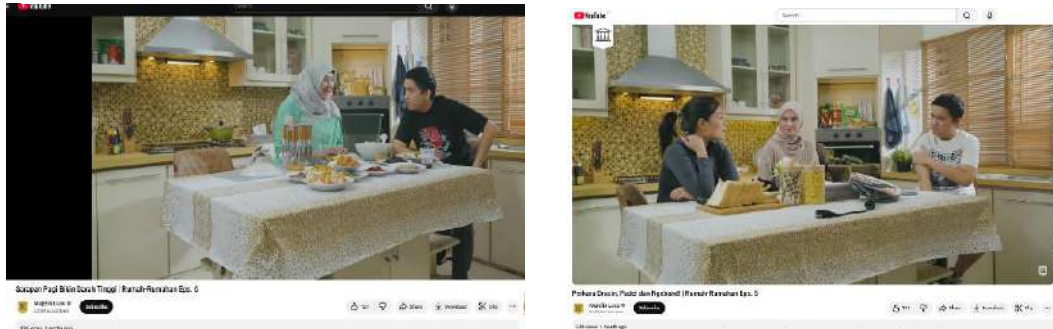
10. Advertorial Berita Kesehatan di Media Cetak, Media Sosial, Media Elektronik dan Media Luar Ruang

a) Media Sosial

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan juga publikasi berita kesehatan melalui media elektronik bekerja samadengan Majelis Lucu Indonesia. Dengan mengangkat 2 topik yang

kekinian bagi generasi milenial dan generasi Z yakni tentang Kesehatan Jiwa dan juga Cek Kesehatan Gratis. Publikasi dilakukan melalui kanal Youtube dengan video pendek berdurasi 8 menit dalam program Rumah-Rumahan, bersama narasumber Kemenkes dalam hal ini adalah praktisi kesehatan jiwa Irma Gustiana A untuk topik kesehatan jiwa, dan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid selaku Direktur Penyakit Tidak Menular pada episode Cek Kesehatan Gratis.

Gambar 3. 27 Publikasi Berita Kesehatan melalui Kerjasama dengan Majelis Lucu Indonesia



Selain itu, juga telah terlaksana edukasi kesehatan melalui program Podcast Bad Boy Twins Majelis Lucu Indonesia, yang berdurasi 56 menit dengan narasumber dr.Gia Pratama.

b) Media Luar Ruang

Sebagai dukungan penguatan informasi terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), telah dilaksanakan pemasangan media luar ruangan atau *Out of Home* (OOH) di sejumlah lokasi strategis. Tema yang diangkat dalam advertorial OOH terkait Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemasangan media luar ruangan dilakukan di dua gerbong kereta api Listrik (KRL) *commuter line* Cikarang sebanyak 16 titik di dua gerbong kereta. selain itu pemasangan juga dilakukan pada videotron di stasiun MRT yaitu di Stasiun MRT Bundaran HI dan stasiun MRT Sudirman.

Gambar 3. 28 Pemasangan Iklan OOH di KRL Commuter Line dan MRT



c) Media Elektronik

Sebagai dukungan penguatan pemberitaan terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), telah dilaksanakan juga advertorial berita kesehatan bekerjasama dengan IDN Times, Narasi, dan Creativox. Pada kanal IDN Times memotret penanganan TBC dengan pendekatan Kampung Siaga dan ditayangkan dalam bentuk artikel serta video reels di Instagram. Sementara untuk Narasi dan Creativox mengangkat tentang Cek Kesehatan Gratis.

Gambar 3. 29 Penayangan Advertorial terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di Media Elektronik



Selain itu, untuk penguatan informasi kesehatan terkait percepatan penanganan bencana Sumatera yang dilakukan oleh Kemenkes, telah dilaksanakan juga pemberitaan kesehatan melalui artikel dan video reels di Instagram bekerja sama dengan Detik.

11. Amplifikasi Konten Media Sosial

Selain penyebaran informasi kesehatan melalui *owned media*, sebagai penguatan amplifikasi pesan komunikasi kesehatan di media sosial, telah dilakukan juga pemanfaatan *User Generated Content* (UGC) dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan perluasan jangkauan pesan secara organik, meningkatkan keterlibatan audiens, serta memperkuat kredibilitas informasi melalui narasi yang lebih dekat dengan pengalaman pengguna. Konten yang dibuat mengangkat isu tentang pentingnya Cek Kesehatan Gratis serta Penanganan Bencana Sumatera dengan total sebanyak 48 postingan yang dipublikasikan pada berbagai platform (32 postingan pada Instagram, 15 postingan di Tiktok, dan 1 postingan di YouTube) dengan total *views* 11.606.654.

Gambar 3. 30 Amplifikasi konten media sosial dan jumlah viewers

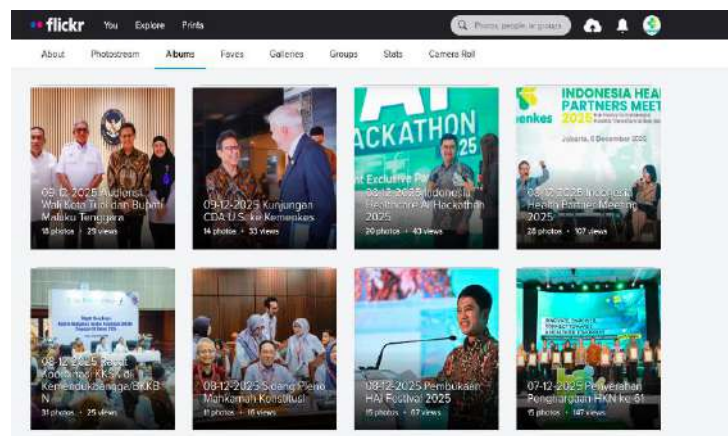


Peliputan Dan Dokumentasi

1. Peliputan Dan Dokumentasi Informasi Berita Kesehatan

Biro Komunikasi dan Informasi Publik, selain melakukan reportase bersama rekan media, juga melaksanakan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan Kementerian Kesehatan: Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Jenderal, para pejabat eselon I lainnya, serta Ibu Ida Rachmawati Budi Gunadi Sadikin selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan. Output dari kegiatan ini berupa album foto yang dipublikasikan melalui situs Flickr Sehat Negeriku.

Gambar 3. 31 Tampilan Album Foto Flickr Sehat Negeriku



Tabel 3. 13 Jumlah Publikasi Album Foto pada Flickr Tahun 2025

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Album Flickr	73	77	72	61	61	84	91	81	65	101	145	124

Selama tahun 2025, telah dihimpun sebanyak 1.035 album foto dengan total 22.357 foto. Seluruh foto kegiatan pimpinan Kementerian Kesehatan dipublikasikan secara berkala di situs Flickr Sehat Negeriku dapat diunduh dalam resolusi tinggi melalui tautan <https://www.flickr.com/photos/sehatnegeriku/albums/>

Publikasi foto tidak hanya dilakukan secara *online*, namun juga dilakukan secara *offline* melalui pameran foto. Foto-foto terpilih hasil liputan secara rutin dipajang di sepanjang selasar lantai 1 Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan. Pameran foto hanya dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada Januari 2025 dengan menampilkan 70 foto pilihan, dan pada Pameran Foto HKN ke-61 selama November 2025 dengan menampilkan 150 karya foto terbaik bertema “Program Hasil Terbaik Cepat Bidang Kesehatan.”

Tabel 3. 14 Jumlah Kegiatan Pameran Foto Tahun 2025

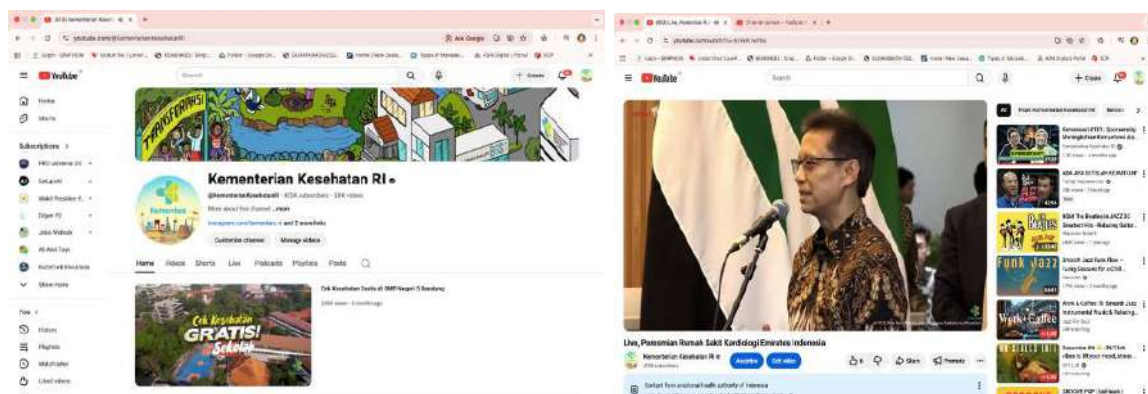
Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pameran Foto	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0

Selain dokumentasi foto, Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga memproduksi dan mempublikasikan video kegiatan pimpinan Kementerian Kesehatan maupun video pembangunan kesehatan, yang disiarkan melalui kanal Youtube resmi Kementerian Kesehatan <https://www.youtube.com/@KementerianKesehatanRI>. Selama tahun 2025, telah diunggah sebanyak 115 video liputan dan video hasil pembangunan kesehatan.

Tabel 3. 15 Jumlah Publikasi Video Liputan dan Pembangunan Kesehatan di YouTube Tahun 2025

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Video YouTube	10	7	8	5	6	6	5	11	11	12	19	15

Gambar 3. 32 Publikasi Video YouTube Kemenkes RI



Di samping itu, dilakukan pula perekaman video (*video taping*) untuk kegiatan pimpinan yang tidak dapat hadir secara luring atau untuk keperluan khusus lainnya. Berbeda dengan video liputan yang bersifat publik, *video taping* hanya ditayangkan dalam konteks acara tertentu. Selama tahun 2025, telah dilakukan sebanyak **191 video taping**.

Tabel 3. 16 Jumlah Video Taping Tahun 2025

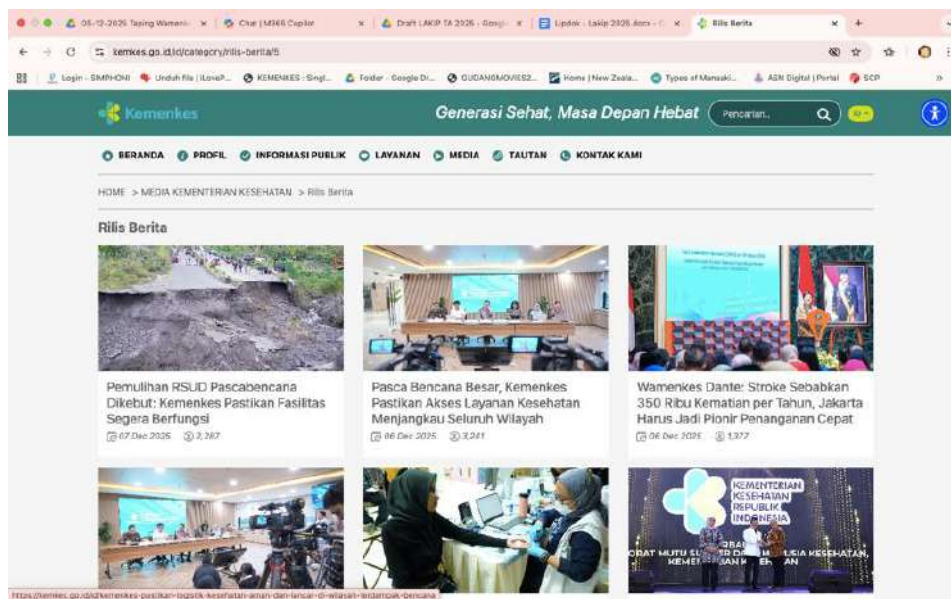
Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Video Taping	11	8	12	8	11	13	15	16	19	23	26	29

Selain publikasi foto dan video, Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempublikasikan rilis berita yang memuat informasi terkait kebijakan dan program Kementerian Kesehatan. Rilis-rilis ini dipublikasikan melalui situs www.kemkes.go.id sebagai saluran resmi untuk menyampaikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat dan media massa sekaligus meningkatkan jumlah pemberitaan positif di media. Selama tahun 2025, telah dipublikasikan sebanyak **460** rilis berita. Rilis-rilis tersebut kerap menjadi rujukan bagi wartawan dalam menyusun pemberitaan di berbagai media.

Tabel 3. 17 Jumlah Publikasi Rilis Berita Kesehatan

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Rilis	29	20	30	30	66	56	37	29	35	29	45	54

Gambar 3. 33 Publikasi Rilis pada Website



Penguatan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Institusional (PEKPPP Mandiri)

Melalui Surat Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik kepada 5 unit utama yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mengusulkan UPT yang akan menjadi lokus evaluasi. Diusulkan 49 UPT sebagai perwakilan unit utama yang menaungi atau memiliki fungsi pembinaan terhadap UPT tersebut. Adapun dalam pelaksanaannya, ada 6 aspek yang akan dinilai yang terdiri dari aspek Kebijakan Pelayanan, aspek Profesionalisme SDM, aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, aspek Sarana Prasarana, aspek Konsultasi dan Pengaduan, dan aspek Inovasi.

Kegiatan saat ini dilakukan dalam beberapa kegiatan koordinasi dengan melibatkan sekretariat unit utama sebagai pengampu UPT. Secara resmi bentuk koordinasi ini dibuatkan SK Tim Pelayanan Publik yang berlaku sepanjang tahun, harapannya agak komunikasi dapat terjalin dengan baik.

Pemantauan terhadap 49 UPT dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Hasil penilaian akhir PEKPPP Mandiri dilaksanakan dengan melakukan pleno Tim Penilai. Seluruh rangkaian kegiatan ditargetkan selesai hingga bulan Oktober. Capaian dari kegiatan ini adalah pemberian apresiasi kepada UPT yang telah berhasil mendapatkan nilai indeks pelayanan publik (IPP) dengan nilai minimal BAIK. Berikut adalah nilai IPP UPT yang telah melalui semua tahapan PEKPPP Mandiri

Tabel 3. 18 Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) UPT Kementerian Kesehatan

No	Unit Lokus Evaluasi	Unit Pembina	IPP	Kategori	Predikat
1	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta	Ditjen SDM	4,97	A	Prima
2	RSUP dr Sitanala	Ditjen Keslan	4,92	A	Prima
3	RS Mata Cicendo	Ditjen Keslan	4,91	A	Prima
4	RS Jantung dan pembuluh darah Harapan kita	Ditjen Keslan	4,89	A	Prima
5	Balai Kekeparantinaan Kesehatan Banten	Ditjen P2	4,86	A	Prima

No	Unit Lokus Evaluasi	Unit Pembina	IPP	Kategori	Predikat
6	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar	Ditjen SDM	4,82	A	Prima
7	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin	Ditjen SDM	4,82	A	Prima
8	RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono	Ditjen Keslan	4,80	A	Prima
9	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur	Ditjen SDM	4,78	A	Prima
10	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung	Ditjen SDM	4,77	A	Prima
11	RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat	Ditjen Keslan	4,76	A	Prima
12	RS Paru dr. Ario Wirawan	Ditjen Keslan	4,75	A	Prima
13	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang	Ditjen SDM	4,75	A	Prima
14	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong	Ditjen SDM	4,74	A	Prima
15	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram	Ditjen SDM	4,73	A	Prima
16	RSUP Dr. M. Djamil	Ditjen Keslan	4,69	A	Prima
17	RSUP Persahabatan	Ditjen Keslan	4,69	A	Prima
18	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palangkaraya	Ditjen SDM	4,67	A	Prima
19	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau	Ditjen SDM	4,66	A	Prima
20	RS Jiwa Marzoeki Mahdi	Ditjen Keslan	4,64	A	Prima

No	Unit Lokus Evaluasi	Unit Pembina	IPP	Kategori	Predikat
21	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh	Ditjen SDM	4,64	A	Prima
22	Loka Labkesmas Pangandaran	Ditjen Kesprimkom	4,61	A	Prima
23	Balai Kekeparantinaan Kesehatan Yogyakarta	Ditjen P2	4,59	A	Prima
24	RSAB Harapan Kita	Ditjen Keslan	4,59	A	Prima
25	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Karang	Ditjen SDM	4,58	A	Prima
26	Balai Kekeparantinaan Kesehatan Merauke	Ditjen P2	4,53	A	Prima
27	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	Ditjen Kesprimkom	4,52	A	Prima
28	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku	Ditjen SDM	4,51	A	Prima
29	Balai Kekeparantinaan Kesehatan Pangkal Pinang	Ditjen P2	4,46	A-	Sangat baik
30	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	Ditjen Kesprimkom	4,42	A-	Sangat baik
31	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo	Ditjen SDM	4,40	A-	Sangat baik
32	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu	Ditjen SDM	4,37	A-	Sangat baik
33	Balai Kekeparantinaan Kesehatan Tarakan	Ditjen P2	4,36	A-	Sangat baik
34	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang	Ditjen SDM	4,32	A-	Sangat baik
35	Balai Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga	Ditjen Kesprimkom	4,31	A-	Sangat baik

No	Unit Lokus Evaluasi	Unit Pembina	IPP	Kategori	Predikat
36	Balai Kekarantinaan Kesehatan Bandung	Ditjen P2	4,31	A-	Sangat baik
37	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang	Ditjen Kesprimkom	4,30	A-	Sangat baik
38	Balai Kekarantinaan Kesehatan Balikpapan	Ditjen P2	4,22	A-	Sangat baik
39	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar	Ditjen Kesprimkom	4,20	A-	Sangat baik
40	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar	Ditjen Farmalkes	4,16	A-	Sangat baik
41	Balai Kekarantinaan Kesehatan Sampit	Ditjen P2	4,13	A-	Sangat baik
42	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta	Ditjen Kesprimkom	4,09	A-	Sangat baik
43	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam	Ditjen Kesprimkom	4,08	A-	Sangat baik
44	Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tanah Bumbu	Ditjen Kesprimkom	4,03	A-	Sangat baik
45	Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado	Ditjen Kesprimkom	4,03	A-	Sangat baik
46	Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (LPAFK) Banjarbaru	Ditjen Farmalkes	4,03	A-	Sangat baik
47	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan	Ditjen P2	3,92	B	Baik
48	Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam	Ditjen P2	3,86	B	Baik
49	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Medan	Ditjen Farmalkes	3,65	B	Baik

Berdasarkan rapat pleno penetapan penilaian PEKPPP Mandiri yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober dari 49 UPT yang telah dilakukan penilaian, sebanyak 28 UPT berkategori Prima, 18 UPT berkategori Sangat Baik, dan 3 UPT berkategori Baik.

2. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional merupakan sebuah program tingkat nasional yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk menilai kualitas pelayanan publik. Dalam kegiatan ini menggunakan instrumen merupakan Instrumen penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik untuk mendapatkan nilai IPP yang dilaksanakan oleh KemenpanRB kepada kementerian, badan, lembaga, atau pemerintah provinsi sampai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pada proses awal pelaksanaannya, KemenpanRB meminta kepada seluruh kementerian/lembaga agar mengusulkan perwakilan 3 satuan kerja yang akan dinilai untuk mewakili kementerian/lembaga untuk mengetahui sejauh kualitas pelayanannya. dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengusulkan 3 perwakilan yaitu RSUP Adam Malik, Poltekkes Surakarta, dan BKK Palembang.

Pemilihan UPT perwakilan ini mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti kesiapan layanan, kinerja sebelumnya, serta representasi wilayah dan jenis layanan. Proses *desk* dan persiapan penilaian telah dilaksanakan oleh Biro Komunikasi bersama dengan Sesditjen Keslan, Sesditjen SDM, Sesditjen P2. Dalam hal ini dari tiga lokus yang telah diusulkan Kementerian Kesehatan, KemenpanRB memilih Poltekkes Surakarta sebagai lokus PEKPPP Nasional tahun 2025.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik selaku penanggung jawab pelayanan komunikasi publik di Kementerian Kesehatan telah melakukan Pendampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan yang diukur, mulai dari kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan, konsultasi dan pengaduan serta inovasi mendapatkan nilai maksimal sehingga mendapatkan hasil IPP Berkategori Prima.

Gambar 3. 34 Dokumentasi Hasil Penilaian PEKPPP Nasional 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Januari 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

RANI WIDYANTINI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA :
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH
TAHUN 2025

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Badan Pusat Statistik	4,52	A
2	Kementerian Keuangan	4,87	A
3	Kementerian Kesehatan	4,87	A
4	Kepolisian Agung	4,85	A
5	Kementerian Komunikasi dan Digital	4,80	A
6	Tribunal Nasional Indonesia	4,80	A
7	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	4,80	A
8	Badan Pengawas Kelembagaan dan Peningkatan	4,80	A
9	Kementerian Kesehatan dan Perikanan	4,80	A
10	Badan Intelijen Nasional	4,77	A
11	Badan Kartoteka Nasional	4,77	A
12	Kementerian Imigrasi dan Paspor	4,77	A
13	Badan Kepegawaian Negara	4,76	A
14	Kementerian Dalam Negeri	4,76	A
15	Kementerian Pertanian	4,75	A
16	Ombudsman Republik Indonesia	4,72	A
17	Kementerian Pekerjaan Umum	4,69	A
18	Kementerian Pemuda dan Olahraga	4,67	A
19	Kementerian Sosial	4,65	A
20	Komisi Pemilihan Umum	4,65	A
21	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	4,62	A
22	Kementerian Pariwisata	4,61	A
23	Kementerian Agama	4,61	A
24	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	4,61	A
25	Lembaga Administrasi Negara	4,59	A

Hasil dari Penilaian PEKPPP Nasional Kementerian Kesehatan Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah 4,87 dengan kategori A, mencapai target yang ditetapkan di tahun 2025 sebesar 4,7.

3. Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik

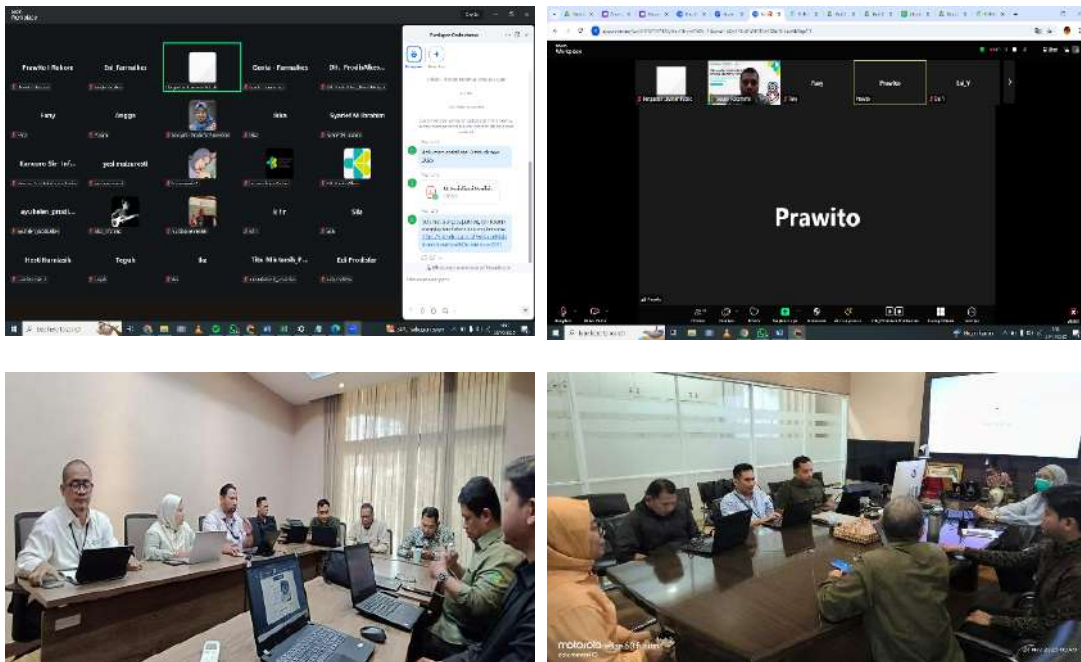
Penilaian Maladministrasi pelayanan publik adalah penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman untuk mengukur dan memetakan potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menggantikan penilaian kepatuhan sebelumnya, dengan penambahan aspek pelibatan masyarakat sebagai pengawasan eksternal untuk menilai persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah dan mendorong layanan yang lebih baik dan juga transparan.

Pada tahapan proses penilaian Maladministrasi, Ombudsman meminta Kementerian dan Lembaga untuk mengusulkan 2 lokus pelayanan publik dan 1 lokus yang bertanggung jawab pada pengaduan yang akan dinilai serta akan menjadi representasi dari K/L, dalam hal ini untuk ruang lingkup lokus Kementerian Kesehatan yaitu Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kemenkes, Unit Pengaduan Kemenkes, dan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Kemenkes.

Biro Komunikasi sebagai narahubung melakukan pertemuan dengan lokus terkait untuk melakukan persiapan dan penguatan sebelum adanya penilaian maladministrasi pada tanggal 20 Oktober 2025 via zoom meeting dengan hasil rapat:

1. Paparan materi aspek yang akan menjadi penilaian maladministrasi
2. Penentuan pimpinan dan staf di bidang pelayanan yang akan di wawancara
3. Data dukung yang harus disiapkan

Gambar 3. 35 Kegiatan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik



Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat

1. Pengelolaan Halo Kemenkes

Upaya pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan informasi publik merupakan komitmen yang kuat untuk memberikan transparansi dan akses yang lebih luas terhadap informasi kesehatan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melaksanakan inisiatif yang signifikan melalui akses layanan informasi publik yang diberi nama Halo Kemenkes.

Gambar 3. 36 Logo Halo Kemenkes



Kementerian Kesehatan melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengembangkan Halo Kemenkes 1500567 yang bertujuan untuk memberikan layanan pengaduan dan informasi secara cepat dan cermat yang diperlukan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui *hotline* 1500567.

Halo Kemenkes adalah sebuah layanan terintegrasi yang inovatif dan revolusioner, menghadirkan pengalaman pelayanan pengaduan dan informasi di bidang kesehatan yang lebih baik dan efisien bagi masyarakat. Dengan memadukan berbagai kanal komunikasi seperti telepon, SMS, email, layanan ini dijalankan melalui aplikasi bernama *Ecentrix*. Pemanfaatan Halo Kemenkes tidak terbatas hanya pada masyarakat dalam negeri, melainkan juga membuka akses dan memberikan layanan kepada masyarakat yang berada di luar negeri.

Gambar 3. 37 Petugas Halo Kemenkes dalam memberikan layanan



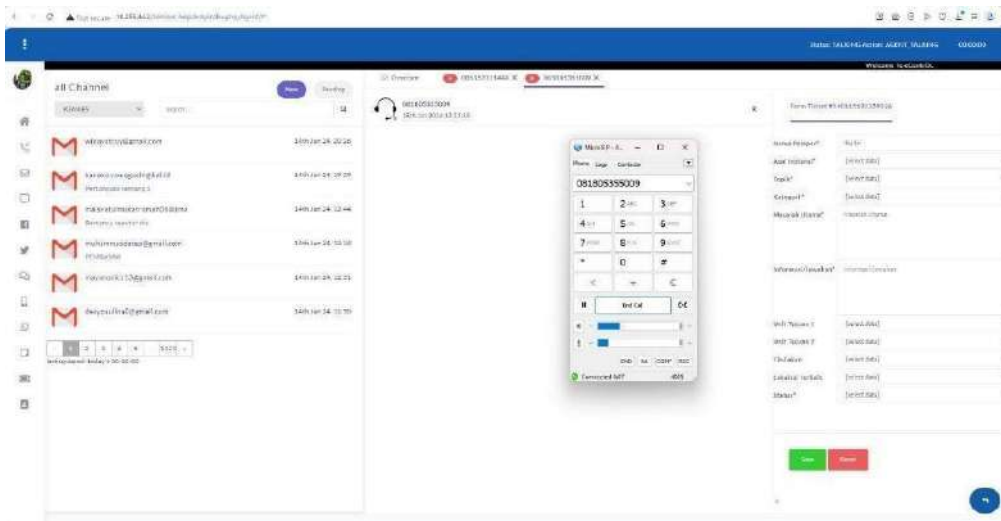
a. Layanan Telepon 1500567

Halo Kemenkes telah menyediakan layanan yang responsif dengan waktu operasional selama 24 jam sehari. Namun, perlu diperhatikan bahwa mulai bulan Mei 2023, terdapat penyesuaian jadwal layanan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Saat ini, Halo Kemenkes beroperasi pada hari Senin hingga Jumat, dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap konsisten, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan bagi tim Halo Kemenkes untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan layanan demi kepuasan pengguna yang lebih baik. Jumlah telepon yang dilayani dalam periode Januari hingga November 2025 adalah sebanyak 50.601 layanan dengan status *closed*.

Tabel 3. 19 Jumlah Layanan Telepon Halo Kemenkes Januari – Desember 2025

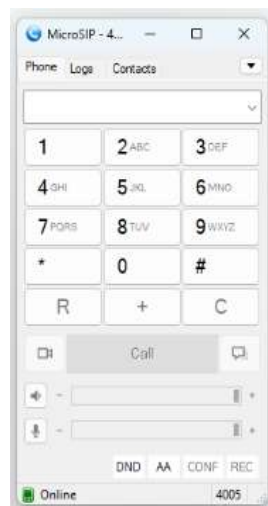
BULAN	INFORMASI			ASPIRASI/SARAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN	% (PROSES+CLOSE/TOTAL LAYANAN*100%)
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE					
Januari	0	0	5676	0	0	1	0	0	5677	5677	100
Februari	0	0	5743	0	0	0	0	0	5743	5743	100
Maret	0	0	3500	0	0	0	0	0	3500	3500	100
April	0	0	2919	0	0	0	0	0	2919	2919	100
Mei	0	0	3407	0	0	0	0	0	3407	3407	100
Juni	0	0	2966	0	0	0	0	0	2966	2966	100
Juli	0	0	5003	0	0	0	0	0	5003	5003	100
Agustus	0	0	4064	0	0	0	0	0	4064	4064	100
September	0	0	5863	0	0	0	0	0	5863	5863	100
Oktober	0	0	6358	0	0	0	0	0	6358	6358	100
November	0	0	5102	0	0	0	0	0	5102	5102	100
Desember	0	0	4030	0	0	0	0	0	4030	4030	100
JUMLAH	0	0	54631	0	0	1	0	0	54632	54632	100

Gambar 3. 38 Dashboard Ecentrix Halo Kemenkes Kanal Telepon

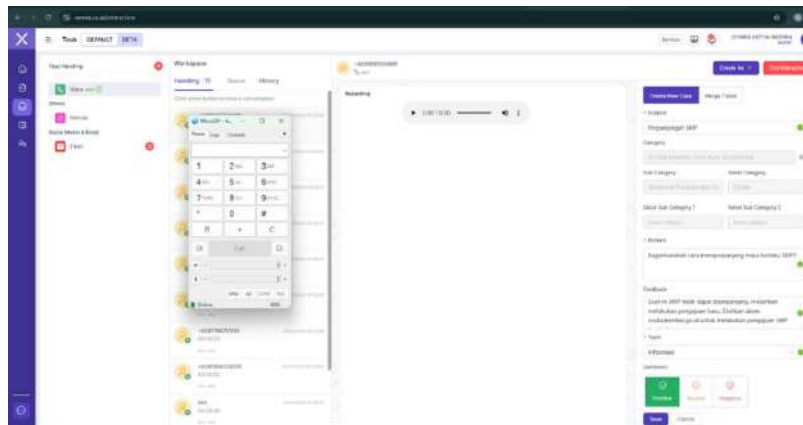


Per 19 Juni 2025 Halo Kemenkes menggunakan aplikasi *omnichannel* untuk layanan telepon bernama OMNIX dari vendor Infomedia, dengan tetap menggunakan aplikasi *Microsip* sebagai aplikasi *telephony*.

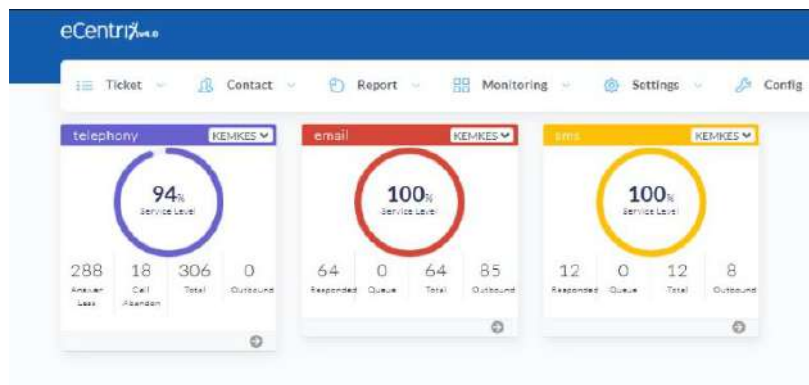
Gambar 3. 39 Aplikasi telephony Microsip



Gambar 3. 40 Dashboard Omnix Halo Kemenkes Kanal Telepon



Gambar 3. 41 Dashboard Pemantauan Service Level



Gambar 3. 42 Dashboard Pemantauan Service Level Grafana Omnix



Dashboard pemantauan tingkat layanan (*service level*) dalam aplikasi Ecentrix aktif digunakan untuk memonitor tingkat layanan khususnya untuk layanan telepon. Hal ini memungkinkan petugas untuk menjaga tingkat layanan tetap di atas 90%.

b. Layanan *Short Messaging Service* (081281562620)

Pada tahun 2025, layanan *Short Messaging Service* (SMS) melalui Halo Kemenkes tetap menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk memperoleh informasi dalam

bidang kesehatan. Data menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 2.034 permintaan informasi yang telah berhasil ditangani melalui SMS, dengan status layanan yang ditutup (*closed*).

Tabel 3. 20 Jumlah Pengguna Layanan SMS Halo Kemenkes Periode Januari-Desember 2025

BULAN	INFORMASI			ASPIRASI/SARAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN	% (PROSES+CLOSE/TOTAL LAYANAN*100%)
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE					
Januari	0	0	152	0	0	0	0	0	152	152	100
Februari	0	0	113	0	0	0	0	0	113	113	100
Maret	0	0	238	0	0	0	0	0	238	238	100
April	0	0	231	0	0	0	0	0	231	231	100
Mei	0	0	207	0	0	0	0	0	207	207	100
Juni	0	0	190	0	0	0	0	0	190	190	100
Juli	0	0	180	0	0	0	0	0	180	180	100
Agustus	0	0	87	0	0	0	0	0	87	87	100
September	0	0	305	0	0	0	0	0	305	305	100
Oktober	0	0	164	0	0	0	0	0	164	164	100
November	0	0	167	0	0	0	0	0	167	167	100
Desember	0	0	117	0	0	0	0	0	117	117	100
JUMLAH	0	0	2151	0	0	0	0	0	2151	2151	1200

Jumlah permintaan yang signifikan ini juga menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap layanan SMS dalam menyediakan jawaban yang tepat terkait isu-isu kesehatan.

c. Layanan Email (kontak@kemkes.go.id)

Email merupakan salah satu layanan yang telah diintegrasikan dalam aplikasi *Ecentrix*. Selama periode Januari hingga Desember tahun 2025 telah dilakukan pelayanan sebanyak 15.766 email dengan permintaan informasi, pengaduan dan saran dari masyarakat dengan status *closed*.

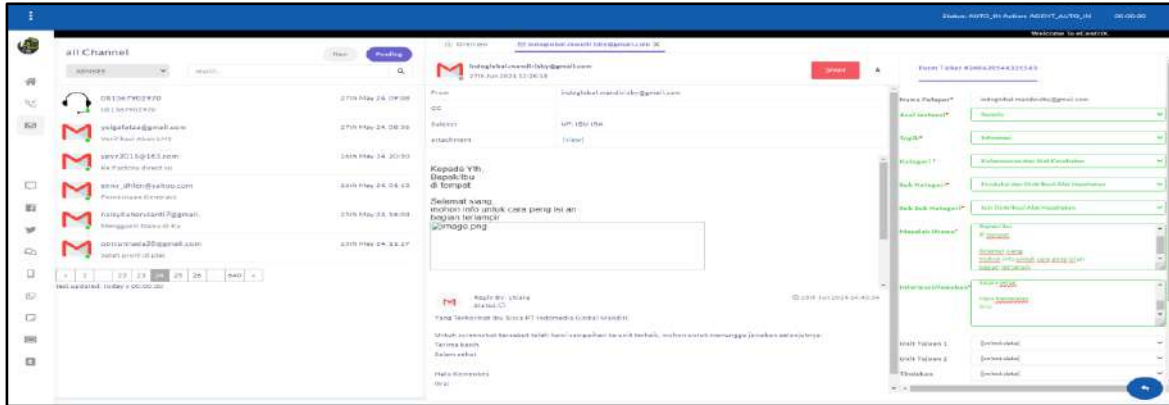
Tabel 3. 21 Jumlah Pengguna Layanan Email Halo Kemenkes

BULAN	INFORMASI			ASPIRASI/SARAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN	% (PROSES+CLOSE/TOTAL LAYANAN*100%)
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE					
Januari	0	0	844	0	0	1	0	0	845	845	100
Februari	0	0	1042	0	0	0	0	0	1042	1042	100
Maret	0	0	788	0	0	1	0	0	789	789	100
April	0	0	854	0	0	0	0	0	854	854	100
Mei	0	0	991	0	0	0	0	0	991	991	100
Juni	0	0	1347	0	0	0	0	0	1347	1347	100
Juli	0	0	1476	0	0	1	0	0	1477	1477	100
Agustus	0	0	1040	0	0	0	0	0	1040	1040	100
September	0	0	1632	0	0	0	0	0	1632	1632	100
Oktober	0	0	2518	0	0	0	0	0	2518	2518	100
November	0	0	1695	0	0	0	0	0	1695	1695	100
Desember	0	0	1539	0	0	0	0	0	1539	1539	100
JUMLAH	0	0	15766	0	0	3	0	0	15769	15769	100

Pemanfaatan email sebagai sarana komunikasi mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi untuk berinteraksi dengan pemerintah, khususnya dalam konteks kesehatan. Jumlah email yang signifikan mencerminkan tingginya partisipasi

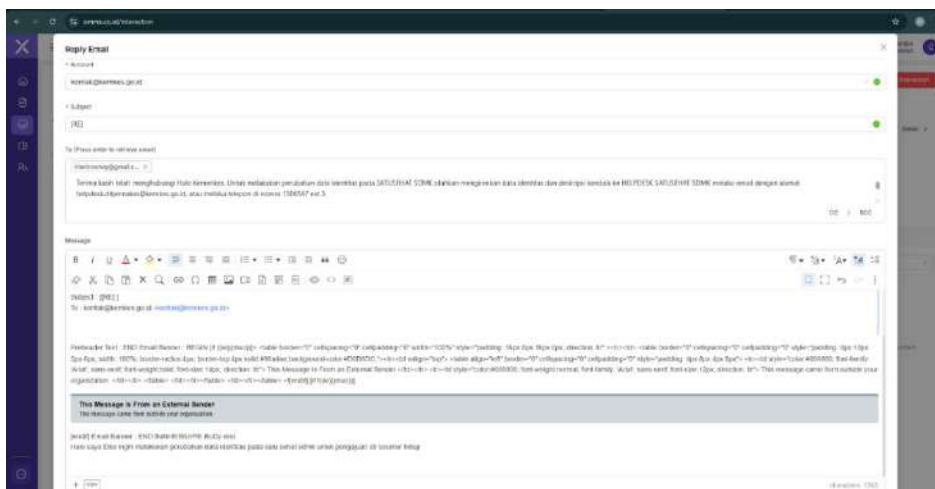
masyarakat dalam berkontribusi, memberikan umpan balik, dan berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan melalui kanal ini.

Gambar 3. 43 Tampilan Dashboard Ecentrix untuk Service Level Monitoring



Per 19 Juni 2025 Halo Kemenkes menggunakan aplikasi omnichannel untuk layanan email bernama OMNIX dari vendor Infomedial.

Gambar 3. 44 Tampilan dashboard OMNIX untuk layanan email



Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan Halo Kemenkes, telah dilakukan survei kepuasan masyarakat sejak tanggal 1 Januari hingga 30 September 2025. Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan terhadap pelanggan Halo Kemenkes yang menggunakan layanan kanal telepon, surat elektronik maupun layanan pesan singkat. Kuesioner telah diisi oleh 527 responden yang merupakan pengguna layanan. SKM ini dilakukan dengan metode kuesioner yang terdiri atas 9 pertanyaan yang terdiri dari 9 unsur SKM yang relevan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Halo Kemenkes tahun 2025. Pengambilan data Survei

Kepuasan Masyarakat ini dilakukan menyertakan tautan <https://link.kemkes.go.id/SKMHK2025> pada saat membalas layanan SMS dan email, mengirim narasi ajakan pengisian kuesioner melalui WhatsApp HK untuk pengguna layanan telepon. Berdasarkan hasil rata-rata per unsur maka dapat disimpulkan jika nilai konversi indeks kepuasan masyarakat sebesar 81,87 yang menunjukkan kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Halo Kemenkes masuk pada kategori Baik.

Tabel 3. 22 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Per Unsur

UNSUR SKM	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Tabel Nilai Per Unsur	1685	1704	1642	1707	1817	1706	1540	1715	2032
Nilai Rata-Rata (NRR) Per Unsur	3,197	3,233	3,115	3,239	3,447	3,237	2,922	3,254	3,855
NRR Tertimbang/Unsur	0,355	0,359	0,346	0,359	0,383	0,359	0,324	0,361	0,428

Tabel 3. 23 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Halo Kemenkes 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan	3,274
Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat	81,87
Kategori Penilaian Kepuasan Masyarakat	BAIK

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan Koordinasi PPID

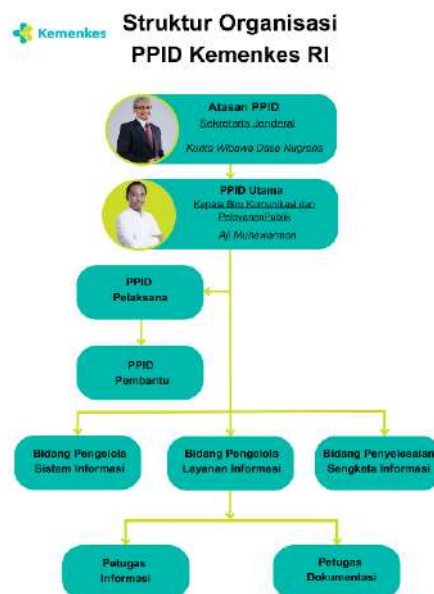
Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi serta bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID.

Penunjukan PPID adalah kewenangan pimpinan badan publik yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. PMK No. 37 Tahun 2019 dan Kepmenkes No. 1279 Tahun 2023 menjadi dasar tugas dan fungsi PPID dalam mengelola informasi publik di Kementerian Kesehatan. Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/1991/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, PPID Kemenkes terdiri atas:

- a) PPID Pelaksana;
- b) PPID Pembantu;
- c) Koordinator Pelayanan Informasi;
- d) Koordinator Dokumentasi; dan
- e) Petugas Layanan Informasi

Gambar 3. 45 Struktur Organisasi PPID Kemenkes RI



Layanan permohonan informasi publik menjadi garis terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Petugas Informasi sebagai perpanjangan tangan PPID melaksanakan fungsi layanan serta melaksanakan pengujian konsekuensi yang akan dikecualikan serta pembuatan pertimbangan tertulis apabila dikecualikan ataupun ditolak.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kementerian Kesehatan telah memanfaatkan teknologi informasi melalui website PPID yang tersedia pada <https://ppid.kemkes.go.id/>. Website PPID Kementerian Kesehatan telah diterapkan sejak tahun 2011 dengan pengembangan dan penyesuaian yang terus dilakukan

untuk memaksimalkan pelayanan di seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kesehatan.

a) Kegiatan PPID

Berikut data rekapitulasi koordinasi PPID periode bulan Januari-Desember tahun 2025:

Tabel 3. 24 Rekapitulasi Koordinasi PPID Tahun 2025

No	Tanggal	Perihal	Keterangan
JANUARI			
1	03 Januari 2025	Membuat surat langkah-langkah awal tahun untuk UPT	-
2	07 Januari 2025	Rapat Hasil Monev Internal PPID 2024	<p>Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informatif sebanyak 0 2. Menuju informatif sebanyak 3 3. Cukup informatif sebanyak 20 4. Kurang informatif sebanyak 18 5. Tidak informatif sebanyak 128 <p>Tindak Lanjut: Hasil kerja pengisian SAQ untuk memperbaiki</p>
3	13 Januari 2025	Rapat Persiapan panggilan sidang sengketa KIP Lanjutan	-
4	14 Januari 2025	Rapat Persiapan Sharing Knowledge Aplikasi Permohonan Informasi	-
5	15 Januari 2025	Kegiatan Pembahasan Naskah Akademik dan Draft Revisi UU KIP.	-
6	24 Januari 2025	Rapat Koordinasi Persiapan	-

No	Tanggal	Perihal	Keterangan
		Talkshow KIP	
FEBRUARI			
1	03 Februari 2025	Rapat koordinasi persiapan sidang sengketa lanjutan	-
2	04 Februari 2025	Sidang Sengketa Lanjutan	Hasil: 1. Pemeriksaan hasil uji konsekuensi 2. Dokumen yang dilampirkan belum menjawab permohonan
3	07 Februari 2025	Rapat persiapan pemeriksaan setempat	-
4	10 Februari 2025	Rapat persiapan sidang pemeriksaan setempat	-
5	11 Februari 2025	Sidang Pemeriksaan Setempat KIP	Hasil: 1. Melakukan perbaikan uji konsekuensi kontrak pengadaan vaksin (2minggu) 2. Uji konsekuensi Data KIPI diperbaiki jangka waktunya
6	13 Februari 2025	Pelatihan aplikasi e-PPID	Hasil: 1. Praktik menggunakan aplikasi e-PPID sebagai user dan admin 2. Penentuan admin aplikasi e-PPID
7	17 Februari 2025	Rapat koordinasi persiapan	-

No	Tanggal	Perihal	Keterangan
		sidang saksi ahli	
8	25 Februari 2025	Sidang pemeriksaan ahli Data KIPi	Hasil: Mendatangkan saksi ahli baru yang memenuhi syarat
MARET			
1	06 Maret 2025	Pertemuan Koordinasi Dan Penguatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Dan Pengelolaan Pengaduan Melalui SP4N LAPOR!	-
2	14 Maret 2025	Sosialisasi Layanan Informasi Publik (PPID dan LAPOR)	-
APRIL			
1	11 April 2025	Rapat koordinasi sidang lanjutan saksi ahli	-
2	23 April 2025	Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Saksi Ahli Lanjutan	-
3	28 April 2025	Rapat persiapan bahan paparan Vicon dengan Sekretaris Jenderal	-
MEI			
-	-	-	-
JUNI			
1	02 Juni 2025	Rapat Kompilasi Program/Kegiatan Prioritas Kemenkes 2025 dengan Ditjen Penanggulangan Penyakit	-

No	Tanggal	Perihal	Keterangan
2	05 Juni 2025	Pemeriksaan Setempat terkait Data KIPI	Melakukan pemeriksaan terkait Data KIPI secara keseluruhan baik data agregat maupun raw data
3	12 Juni 2025	Rapat MoU Kerjasama Kementerian Kesehatan RI dengan DELFT Imaging B.V.	-
JULI			
1	02 Juli 2025	Pemeriksaan dokumen KIPI	-
2	03 Juli 2025	Koordinasi awal ke Kantor Imigrasi Bogor terkait kejelasan status WNA Ted Hilbert	-
3	04 Juli 2025	Sosialisasi <i>monitoring</i> dan evaluasi (monev) internal PPID Pelaksana Tahun 2025	-
4	08 Juli 2025	(Vicon) Update Sengketa Informasi dengan Ted Hilbert	-
5	11 Juli 2025	Rapat Koordinasi Penyusunan DIP Ditjen Keslan	-
6	14-18 Juli 2025	Uji Akses Monev PPID Pelaksana	-
7	17 Juli 2025	Audiensi Aliansi Rakyat Peduli Kesehatan	-
8	21 Juli 2025	Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik UPT Ditjen SDM Kesehatan	-
9	22 Juli 2025	Menyerahkan kesimpulan	-

No	Tanggal	Perihal	Keterangan
		sidang sengketa kontrak vaksin dan data kipi ke KIP	
10	23 Juli 2025	Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik UPT Ditjen Penanggulangan Penyakit	-
11	24 Juli 2025	Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik UPT Ditjen Kesprimkom dan Farmalkes	-
12	25 Juli 2025	Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik UPT Ditjen Kesehatan Lanjutan	-
13	28 Juli 2025	Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik di lingkungan Sekjen dan Sekretaris Unit Utama	-
14	30 Juli 2025	Pembacaan Putusan Sidang Sengketa Informasi Publik terkait Kontrak Vaksin dan Data KIPI	-
AGUSTUS			
1	06-08 Agustus 2025	Koordinasi dan Penguatan Pengelolaan KIP dan SP4N LAPOR!	-
2	12 Agustus 2025	Forum Keterbukaan Informasi Publik Kementerian PANRB	-
3	14 Agustus 2025	Rapat P2: menindaklanjuti Putusan Sengketa Informasi	-

No	Tanggal	Perihal	Keterangan
		Publik Nomor Perkara 041/V/KIP-PSI/2024 dan 042/V/KIP-PSI/2024 Pengadilan Komisi Informasi Publik	
4	15 Agustus 2025	Sosialisasi dan Kick Off Monev KIP 2025	-
5	27 Agustus 2025	Rapat Koordinasi Pengajuan Keberatan Putusan Sengketa Informasi	-
6	29 Agustus 2025	Rapat Persiapan Sidang Pemeriksaan Awal Sengketa Informasi Publik dengan pemohon Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	-
SEPTEMBER			
1	04 September 2025	Sosialisasi Pengisian SAQ Monev PPID - KIP 2025	-
2	10 September 2025	Sidang pemeriksaan awal II YLBHI	-
3	22 September 2025	Penguatan Kapasitas Sidang Sengketa Informasi Publik: Uji Konsekuensi dan Penanganan Sengketa Informasi Publik	-
4	24-26 September 2025	Bimtek dan Sosialisasi SP4N LAPOR dan Keterbukaan Informasi Publik	-

No	Tanggal	Perihal	Keterangan
OKTOBER			
1	07 Oktober 2025	Finalisasi dan submit pengisian SAQ Monev PPID KIP	-
2	09 Oktober 2025	Penyusunan DIP Setditjen Farmalkes	-
3	13 Oktober 2025	Sosialisasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Keslan	-
4	15 Oktober 2025	Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 Komisi Informasi Pusat	-
5	22 Oktober 2025	Sidang PTUN terkait Kontrak Vaksin dan Data KIPI	-
6	23 Oktober 2025	Rapat koordinasi hasil monev KIP	-
NOVEMBER			
1	6-8 November 2025	Bimtek SP4N LAPOR dan Sosialisasi PermenPAN RB No 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan SP4N LAPOR	-
2	11 November 2025	Rapat tindak lanjut permohonan LSM di Kesprimkom	-
3	14 November 2025	Pembukaan dan Technical Meeting presentasi uji publik	-
4	19 November 2025	Presentasi Uji Publik Kemenkes	-

No	Tanggal	Perihal	Keterangan
5	19 November 2025	Putusan sidang PTUN perkara 283 dan 289 melalui <i>eCourt</i>	-
6	20 November 2025	Rapat koordinasi pengembangan website PPID	-
7	25-26 November 2025	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penguatan Layanan Publik dan Zona Integritas di Lingkungan BKK Pontianak	-
8	26-28 November 2025	Tindaklanjut hasil moneyv intenal PPID dan Penyusunan DIP Ditjen Farmalkes	-
DESEMBER			
1	-	-	-

Pada tahun 2025, PPID Kementerian Kesehatan menerima 2 (dua) keberatan informasi publik, yaitu:

- Berita Dua Sisi:** Informasi dan data anggaran program kesehatan tahun 2024-2025: Menanggapi keberatan informasi publik (batas waktu 08 Januari 2026)
- La Hasidi:** DAK Puskesmas Lamaeo: Dalam proses penyusunan tanggapan keberatan informasi (batas waktu 30 Januari 2026)

Saat ini PPID Kemenkes sedang menindaklanjuti hasil putusan sengketa informasi PTUN Jakarta terkait data KIPI, kontrak pengadaan Covid 19, dan pengadaan nOPV2.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi, badan publik diharapkan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta tata kelola dan pemerintahan yang baik.

Gambar 3. 46 Dokumentasi Kegiatan PPID Periode Januari - Juni 2025



b) Pelayanan Informasi - Pojok Informasi

Berikut adalah Pelayanan Informasi yang dilakukan di Pojok Informasi Gedung Prof. Sujudi Lantai 1. Adapun jumlah permohonan informasi sampai dengan Desember TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Jumlah Permohonan Informasi melalui Pojok Informasi Tahun 2025

BULAN	INFORMASI			SARAN			PENGADUAN			TOTAL OPEN	TOTAL PROSES	TOTAL CLOSE	TOTAL LAYANAN
	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE	OPEN	PROSES	CLOSE				
Januari	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
Februari	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Maret	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
April	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Mei	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Juni	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Juli	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Agustus	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
September	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Oktober	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
November	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	82	84

c) Instagram @ppid_kemenkes

Gambar 3. 47 Feed Instagram PPID Kemenkes RI

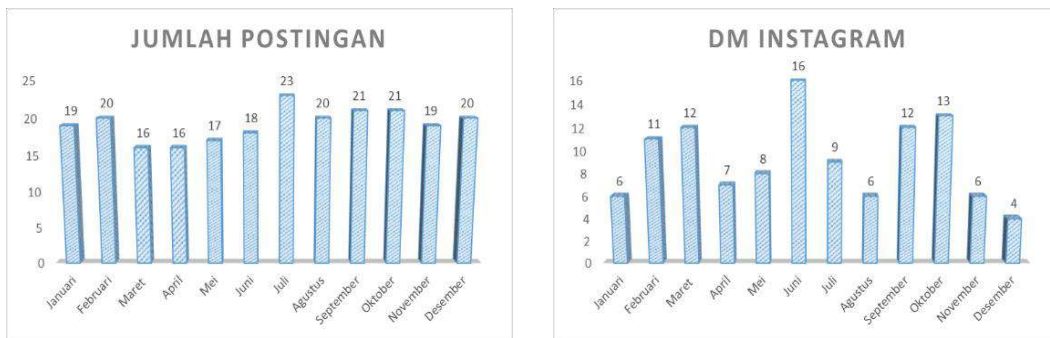


Tabel 3. 26 Jumlah Permohonan Informasi melalui Instagram PPID Kemenkes RI Tahun 2025

Bulan	Informasi			Saran			Pengaduan			Total Open	Total Proses	Total Close
	Open	Proses	Close	Open	Proses	Close	Open	Proses	Close			
Januari	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Februari	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Maret	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
April	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Mei	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Juni	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Juli	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Agustus	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
September	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Oktober	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13
November	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Desember	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
JUMLAH			110									110

Berdasarkan matriks di atas jumlah pelayanan informasi melalui kanal Instagram PPID sampai dengan Desember TA 2025 yaitu sebanyak 110 close.

Gambar 3. 48 Diagram Postingan dan Interaksi Direct Messages Instagram PPID Kemenkes RI Tahun 2025

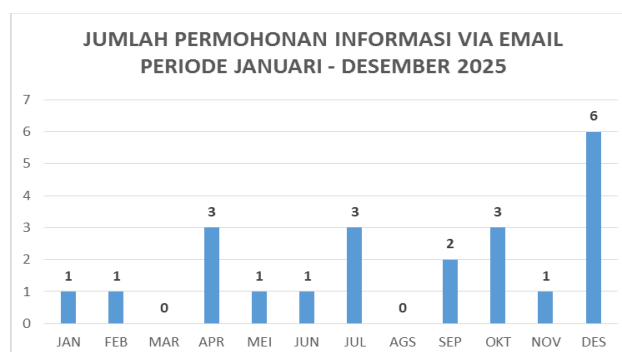


Berdasarkan diagram di atas jumlah postingan Instagram PPID sebanyak 230 postingan dan jumlah interaksi *Direct Messages* sebanyak 110 interaksi.

d) Email PPID

Berdasarkan grafik di bawah jumlah permohonan informasi melalui email PPID pada periode Januari - Desember tahun 2025 sebanyak 22 permohonan informasi dengan status *Closed*.

Gambar 3. 49 Diagram Permohonan Informasi Via Email PPID Kemenkes RI Tahun 2025



e) Surat

Berdasarkan grafik di bawah jumlah permohonan informasi melalui surat pada periode Januari - Juni tahun 2025 sebanyak 1 permohonan informasi dengan status *Closed*.

Gambar 3. 50 Diagram Permohonan Informasi melalui Surat Tahun 2025



Tabel 3. 27 Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN			JUMLAH PERMOHONAN	INFORMASI DIBERIKAN			RATA WAKTU PEMENUHAN	ALASAN PENOLAKAN
		ORANG PERORANGAN	KELOMPOK ORANG	BADAN HUKUM		SEMUA	SEBAGIAN	TIDAK DIBERIKAN		
1	Januari	13	0	0	13	13	0	0	1	-
2	Februari	17	0	0	17	17	0	0	4	-
3	Maret	16	0	0	16	16	0	0	1	-
4	April	19	0	0	19	16	1	2	3	-
5	Mei	16	0	2	18	18	0	0	1	-
6	Juni	22	0	0	22	22	0	0	1	-
7	Juli	20	1	0	21	20	0	1	1	Tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi
8	Agustus	16	0	1	17	17	0	0	1	-
9	September	24	0	0	24	24	0	0	1	-
10	Oktober	24	0	3	27	23	0	4	1.58	- Pemohon tidak melengkapi persyaratan permohonan informasi - Untuk permintaan salinan AKL tidak dapat diberikan. Permintaan salinan AKL harus berasal dari perusahaan pemilik AKL
11	November	16	0	0	16	16	0	0	1.00	-
12	Desember	27	0	2	29	29	0	0	0.80	-
TOTAL		230	1	8	239	231	1	7	1	-

Berdasarkan Berdasarkan tabel di atas jumlah permohonan informasi baik dari Pojok Informasi, Instagram, Email, Website, dan Surat berjumlah 239 permohonan informasi (diberikan semua 231 permohonan, diberikan sebagian 1 permohonan dan tidak diberikan 7 permohonan) dengan rata - rata waktu pemenuhan selama 1 hari.

f) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) PPID Kemenkes Tahun 2025

Dalam rangka memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan kegiatan pemahaman Sosialisasi Keterbukaan Informasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi) Kementerian Kesehatan Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan kapasitas pengelola informasi di unit kerja Kemenkes dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada Semester I, kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025 dan pada Semester II kegiatan BIMTEK PPID dilaksanakan pada 07 Agustus 2025 dengan melibatkan perwakilan PPID Pelaksana dari berbagai unit utama dan UPT Kemenkes. Sosialisasi ini membahas prinsip-prinsip keterbukaan informasi, mekanisme pelayanan informasi publik, serta strategi peningkatan kualitas layanan informasi yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dan perluasan jangkauan pemahaman, kegiatan sosialisasi akan kembali dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 mendatang. Diharapkan melalui kegiatan ini, seluruh jajaran PPID di lingkungan Kemenkes dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi secara optimal.

Gambar 3. 51 Pelaksanaan Bimbingan Teknis PPID Kemenkes RI



3. Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N-LAPOR!)

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengembangkan akses pengaduan dan permintaan masyarakat melalui Unit Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang saat ini dikelola oleh Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri dan Ombudsman RI. Selama Januari-Desember 2025 tercatat Kementerian Kesehatan (Admin Instansi) telah melakukan disposisi sebanyak 439 layanan (total) dengan 7 layanan dengan status open, 40 layanan dengan status proses, 392 layanan dengan status close yang diselesaikan dengan persentase tindaklanjut mencapai 83,47% oleh admin di satuan kerja.

Tabel 3. 28 Laporan Terdisposisi melalui Admin Instansi

Bulan	Total Layanan Masuk	Status Terbuka (Open)	Status Proses	Status Selesai (Close)	Persentase Penyelesaian
Januari	35	0	0	35	100 %
Februari	23	0	0	23	100 %
Maret	41	0	0	41	100 %
April	28	0	0	28	100 %
Mei	61	0	1	60	98,36 %
Juni	26	0	0	26	100 %
Juli*	69	0	2	67	97,1 %
Agustus	33	0	0	33	100 %
September*	36	0	4	32	88,88 %
Oktober*	20	0	3	17	85 %
November*	41	0	15	26	63,41 %
Desember	26	7	15	4	73,07 %
TOTAL	439	7	40	392	
RATA-RATA PERSENTASE PENYELESAIAN					83.47 %

Selain itu didapatkan bahwa aplikasi SP4N LAPOR! sudah dimanfaatkan lebih luas untuk integrasi layanan di UPT melalui fitur “Form Manual” yang tersedia, dari hasil pengambilan data dengan total 1325 layanan

Tabel 3. 29 Laporan Form Manual Admin UPT

Bulan	Total Layanan Masuk	Status Terbuka (Open)	Status Proses	Status Selesai (Close)	Persentase Penyelesaian
Januari	144	0	0	144	100 %
Februari	141	0	0	141	100 %
Maret	130	0	0	130	100 %
April	27	0	0	27	100 %
Mei	36	0	0	36	100 %
Juni	3	0	0	3	100 %
Juli	53	0	0	53	100 %
Agustus	62	0	1	61	98,38 %
September	159	0	1	158	99,37 %
Oktober	171	0	1	170	99,41 %
November	288	0	5	283	98,26 %
Desember	111	0	4	107	96,39 %
TOTAL	1325	0	12	1313	
RATA-RATA PERSENTASE PENYELESAIAN					97,86 %

Selain itu Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melakukan beberapa peningkatan kapasitas petugas/ admin SP4N LAPOR di tahun 2025 secara berkala dengan rincian sebagai berikut:

- a) Rapat Koordinasi Kebijakan SP4N LAPOR dan KIP (6 Maret 2025)
- b) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pengaduan (6-8 Agustus)
- c) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi SP4N LAPOR (24-28 September 2025)
- d) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi PermenPANRB No. 5 Tahun 2025 (6-8 November 2025)
- e) *Monitoring* dan Evaluasi Pelayanan SP4N LAPOR (11 November 2025)

4. Unit Layanan Terpadu Kementerian Kesehatan

Unit Layanan Terpadu (ULT) merupakan implementasi dari Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian dibentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 509/MENKES/SK/2010 pada tanggal 26 April 2010. Unit ini terletak di gedung Prof. Dr. Sujudi lantai 1. Kementerian Kesehatan RI membangun Unit Layanan Terpadu (ULT) bertujuan untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan terhadap berbagai bentuk pelayanan publik, dan memudahkan akses pelayanan kepada masyarakat untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang paripurna, cepat dan tepat serta transparan dengan Motto ULT: Senyum, Sapa, Salam, Tepat Waktu.

ULT yang merupakan sarana prasarana untuk melakukan konsultasi terkait perizinan di bidang kesehatan berada di bawah naungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang bekerja sama dengan beberapa unit teknis sebagai pelaksana perizinan. Beberapa unit teknis tersebut antara lain Produksi dan Distribusi Farmasi, Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan, Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Biro OSDM.

Petugas loket yang berjaga setiap harinya berasal dari unit teknis terkait, meskipun saat ini terdapat tiga petugas loket yang merupakan pegawai non ASN dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Petugas loket telah dibekali pelatihan khusus terkait pelayanan prima guna mempermudah komunikasi, proses pelayanan perizinan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Saat ini ULT membuka 12 loket yang melayani konsultasi perizinan dan layanan kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Daftar Loket Unit Layanan Terpadu (ULT)

Produksi dan Distribusi Farmasi	1
Khusus Disabilitas	2
Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	3
Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	4
Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan	5
Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	5,6
Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	7
Biro OSDM	8,9
Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	10,11
Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	12

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), maka seluruh layanan perizinan telah dilakukan secara online melalui sistem OSS. Dengan demikian maka unit ULT yang sebelumnya melayani perizinan dan pemberkasan secara tatap muka saat ini hanya melakukan layanan konsultasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam proses perizinan. Selama Januari – Desember 2025, ULT telah melakukan pelayanan sebanyak 12.293 layanan dengan rincian pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Jumlah Pelayanan Informasi Per Loket Tahun 2025

BULAN	TOTAL PELAYANAN ULT 2025									Total Pengunjung
	Loket 1	Loket 2	Loket 3	Loket 4	Loket 5&6	Loket 7	Loket 8&9	Loket 10&11	Loket 12	
JANUARI	86	0	131	173	215	4	103	176	72	960
FEBRUARI	106	0	163	125	262	0	84	248	53	1041
MARET	96	0	108	156	198	0	49	204	50	861
APRIL	69	0	137	128	211	0	59	208	38	850
MEI	93	0	125	140	215	0	97	222	57	949
JUNI	81	0	158	144	234	0	81	224	42	964
JULI	129	0	157	218	342	0	93	332	80	1351
AGUSTUS	117	0	121	160	233	0	75	214	68	988
SEPTEMBER	105	0	133	169	249	0	78	298	61	1093
OKTOBER	121	0	157	156	292	0	57	332	93	1208
NOVEMBER	83	0	145	203	261	0	37	283	70	1082
DESEMBER	127	0	127	189	208	0	41	212	42	946
TOTAL	1213	0	1662	1961	2920	4	854	2953	726	12293

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, ULT melakukan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan dengan metode kuesioner yang terdiri atas 9 pertanyaan yang terdiri dari 9 unsur SKM yang relevan untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan menyertakan tautan <https://link.kemkes.go.id/SKMULT2025> dengan hasil per Triwulan sebagai berikut:

a) Triwulan I kategori sangat baik dengan IKM 89,08

- b) Triwulan II kategori sangat baik dengan IKM 89,26
- c) Triwulan III kategori sangat baik dengan IKM 89,05

Hubungan Media dan Kelembagaan

1. Pendampingan Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI

Salah Salah satu tugas Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan adalah menyiapkan dan pendampingan dalam Raker/ RDP/ Ratas Program Kesehatan dan acara kelembagaan lainnya. Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan bertugas koordinasi penyiapan agenda, koordinasi penyiapan raker, menyiapkan pendampingan, menggandakan bahan, hingga penyiapan jalannya rapat kerja. Pada tahun 2025 Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan telah melakukan pendampingan 27 Raker/ RDP/ Ratas Program Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3. 52 Dokumentasi Rapat Kerja Dengan Komisi IX DPR RI



Selain pendampingan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan juga mengkoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dan Pimpinan dalam rangka pengawasan pembangunan kesehatan. Pada tahun 2025 Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan telah mengkoordinasikan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dan Pimpinan dalam rangka pengawasan pembangunan kesehatan pada 17 Provinsi. Rincian kegiatan Kunjungan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 32 Rekapitulasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja DPR RI

NO	TANGGAL	URAIAN
1	3 Januari 2025	Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI (Pusat Kesehatan Haji). Pembahasan Komponen Biaya Kesehatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/ 2025 M
2	11 Februari 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI Dengan pembahasan terkait: Membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2025. Membahas perkembangan persiapan pelaksanaan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan: a) Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS); b) Manfaat, tarif dan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.
3	12 Februari 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI Pembahasan Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025
4	18 Maret 2025	Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Kesehatan Lanjutan), terkait: Penanganan Bantuan Medis Korban
5	29 April 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Pembahasan isu-isu krusial di sektor kesehatan, permasalahan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) termasuk evaluasi sistem pendidikan pembiayaan, distribusi peserta didik, dan kejelasan status hubungan kerja. Persiapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji tahun 2025, mencakup kesiapan tenaga kesehatan, logistik obat dan alat kesehatan, serta koordinasi lintas sektor untuk menjamin pelayanan yang optimal bagi jemaah haji Indonesia.
6	30 April 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI Terkait: Membahas permasalahan pelanggaran kode etik dan disiplin kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan; Membahas penguatan system pengaduan dan perlindungan korban di sektor kesehatan dan pendidikan;

NO	TANGGAL	URAIAN
		Membahas transformasi kebijakan penguatan profesionalisme tenaga medis.
7	07 Mei 2025	Rapat Panja Komisi IX DPR RI bersama Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas RI, Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, terkait: Kebijakan Program Percepatan Eliminasi Tuberculosis Anggaran Program Penanggulangan Tuberculosis Roadmap Percepatan Program Eliminasi Tuberculosis hingga 2030
8	07 Mei 2025	Rapat Panja Komisi IX DPR RI bersama Sekretaris Jenderal Kemenkes RI terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional, terkait Kepesertaan dan Kepatuhan Iuran.
9	14 Mei 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI terkait Perkembangan Penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), termasuk sinkronisasi dengan RPJMN 2025 – 2029 dan perumusan prioritas transformasi sistem kesehatan nasional; Evaluasi Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
10	28 Mei 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Membahas Evaluasi Mekanisme Pembayaran ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan, termasuk Laporan Dispute Klaim, Klaim yang Pending, dibatalkan dan belum dibayarkan; Membahas Kebijakan Pelayanan Kesehatan Program JKN; Membahas Kesiapan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
11	1 Juli 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: a) Penyampaian Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 oleh Kementerian Kesehatan RI, termasuk tren nasional dan daerah dalam prevalensi stunting, wasting, dan gizi buruk serta provinsi/kabupaten prioritas yang mengalami peningkatan kasus; b) Evaluasi Program Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i> ; c) Capaian intervensi spesifik dan sensitif oleh Kementerian Kesehatan RI, BKKBN, dan BGN; d) Integrasi pelaksanaan program oleh PKB/PLKB, Puskesmas, dan Posyandu;

NO	TANGGAL	URAIAN
		e) Tantangan pelaksanaan di lapangan dan strategi percepatan yang diperlukan; f) Penguatan Standar Gizi dan Pengawasan Produk Pangan; g) Penjelasan peran dan mandat masing-masing K/L dalam penetapan standar gizi nasional; h) Evaluasi pengawasan dan regulasi peredaran makanan olahan oleh Badan POM RI, termasuk makanan anak dan suplemen; i) Penerapan standar gizi nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
12	2 Juli 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Membahas Penyelesaian dugaan malapraktik di fasilitas pelayanan kesehatan
13	7 Juli 2025	Rapat Dengar Pendapat Wakil Menteri Kesehatan dengan DPD RI, terkait: a) Pengaduan Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan Timah (FKKBMKT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Perihal Dugaan Wanprestasi dan Janji Pemerintah Pusat atas pemberian Pesangon pada Tahun 2008 yang telah diberikan Alokasi Anggaran oleh Presiden dan DPR RI; b) Pengaduan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terkait dugaan maladministrasi Menteri Kesehatan RI perihal proses seleksi Anggota Konsil Indonesia (KKI); dan c) Pembahasan permasalahan terkait Tenaga Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
14	9 Juli 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026
15	15 Juli 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Pembahasan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) beserta solusi atas permasalahan data PBI
16	16 Juli 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024

NO	TANGGAL	URAIAN
17	4 September 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2026
18	15 September 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Pembahasan terkait Penyesuaian RKA K/L sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran
19	29 September 2025	Rapat Panja Rapat Panja Pengawasan mengenai Pengawasan Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Pembahasan tentang Sistem Manajemen Data terpadu untuk <i>Monitoring</i> Eliminasi Tuberculosis
20	1 Oktober 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan pagu alokasi Anggaran
21	28 Oktober 2025	Rapat Kerja Sekretaris Jenderal dengan Komisi VIII DPR RI, terkait: Pembahasan Rincian Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/ 2026 M
22	5 November 2025	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dengan Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI, terkait: Pembahasan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026 terkait Penanganan Kebencanaan
23	12 November 2025	Rapat Panja Pengawasan mengenai Pengawasan Percepatan Eliminasi Tuberculosis, Plt. Dirjen Penanggulangan Penyakit, terkait: <ul style="list-style-type: none"> a) Kebijakan Desentralisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Eliminasi TB b) Dukungan Anggaran dan Regulasi di Daerah c) Kolaborasi Lintas Pemerintah Daerah
24	13 November 2025	Rapat Panja Dirjen Keslan, Dirjen Kesprimkom dan Dirjen Farmalkes dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Kualitas dan Ketersediaan Pelayanan Kesehatan
25	13 November 2025	Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: <ul style="list-style-type: none"> a) Evaluasi keberlanjutan JKN dan penyesuaian iuran untuk menjamin pembiayaan berkelanjutan serta peningkatan mutu layanan kesehatan inovatif;

NO	TANGGAL	URAIAN
		b) Penghapusan tunggakan iuran dan penambahan peserta PBI sebagai langkah pemulihan kepesertaan, efisien sistem, dan perluasan perlindungan kesehatan bagi masyarakat rentan; c) Percepatan pemerataan layanan dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan; d) Implementasi PP No. 28 Tahun 2024 dengan fokus pada layanan prioritas KJSU, integrasi SATUSEHAT, pemanfaatan teknologi inovatif, dan pengembangan layanan lansia.
26	19 November 2025	Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Dirjen SDM Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan
27	26 November 2025	Rapat Panja JKN Dirjen SDM Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI, terkait: Kualitas Ketersediaan Pelayanan Kesehatan

Gambar 3. 53 Dokumentasi Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI



Tim Selain pendampingan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan juga mengkoordinasikan dan melaksanakan pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dan Pimpinan dalam rangka pengawasan pembangunan kesehatan. Pada tahun 2025 Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan telah mengkoordinasikan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dan Pimpinan dalam rangka pengawasan pembangunan kesehatan pada 44 Provinsi. Rincian kegiatan Kunjungan Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Rekapitulasi Kunjungan Kerja Spesifik, Reses dan Panja Komisi IX DPR RI

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, Dalam rangka Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, di Kalimantan Selatan	6 s.d 8 Februari 2025
2	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, Dalam rangka Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, di Sulawesi Tengah	6 s.d 8 Februari 2025
3	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, Dalam rangka Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, di Gorontalo	6 s.d 8 Februari 2025
4	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, Dalam rangka Pengawasan Makanan dan Minuman menjelang bulan Ramadhan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau	27 Februari s.d 1 Maret 2025
5	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, Dalam rangka Pengawasan Makanan dan Minuman menjelang bulan Ramadhan di Kota Malang Provinsi Jawa Timur	27 Februari s.d 1 Maret 2025
6	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, Dalam rangka Pengawasan Makanan dan Minuman menjelang bulan Ramadhan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat	27 Februari s.d 1 Maret 2025
7	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Denpasar Provinsi Bali	12 s.d 16 April 2025
8	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	12 s.d 16 April 2025
9	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	12 s.d 16 April 2025
10	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait dengan Pengawasan Pelaksanaan Haji tahun 2025 ke Provinsi Sumatera Barat	7 s.d 9 Mei 2025
11	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait dengan Pengawasan Pelaksanaan Haji tahun 2025 ke Provinsi Kalimantan Selatan	7 s.d 9 Mei 2025

No	Kegiatan	Tanggal
12	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI terkait dengan Pengawasan Pelaksanaan Haji tahun 2025 ke Provinsi Sulawesi Selatan	7 s.d 9 Mei 2025
13	Pendampingan Kunjungan Kerja Panja Komisi IX DPR RI terkait Pengawasan mengenai Percepatan Eliminasi Tuberculosis ke Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat	22 s.d 24 Mei 2025
14	Pendampingan Kunjungan Kerja Panja Jaminan Kesehatan Nasional ke Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur	22 s.d 24 Mei 2025
15	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat	27 s.d 29 Mei 2025
16	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Kota Manokwari Provinsi Papua Barat	27 s.d 29 Mei 2025
17	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara	1 s.d 3 Juni 2025
18	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan dalam rangka Pengawasan Pendidikan Vokasi Kesehatan dalam Mendukung Transformasi Layanan Primer ke Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan	3 s.d 5 Juli 2025
19	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan dalam rangka Pengawasan Pendidikan Vokasi Kesehatan dalam Mendukung Transformasi Layanan Primer ke Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah	3 s.d 5 Juli 2025
20	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan dalam rangka Pengawasan Pendidikan Vokasi Kesehatan dalam Mendukung Transformasi Layanan Primer ke Kota Denpasar Provinsi Bali	3 s.d 5 Juli 2025
21	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	10 s.d 13 Agustus 2025
22	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo	10 s.d 13 Agustus 2025
23	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	10 s.d 13 Agustus 2025

No	Kegiatan	Tanggal
24	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan tentang Pengawasan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kota Tangerang Provinsi Banten	27 s.d 29 Agustus 2025
25	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan tentang Pengawasan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kota Bogor Provinsi Jawa Barat	27 s.d 29 Agustus 2025
26	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan tentang Pengawasan Pelaksanaan Cek Pendampingan Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat	27 s.d 29 Agustus 2025
27	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan tentang Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG dan Peninjauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG di Kota Denpasar Provinsi Bali	18 s.d 20 September 2025
28	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan tentang Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG dan Peninjauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur	18 s.d 20 September 2025
29	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan tentang Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG dan Peninjauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau	18 s.d 20 September 2025
30	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah	5 s.d 7 Oktober 2025
31	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Banda Aceh Provinsi Aceh	5 s.d 7 Oktober 2025
32	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Ambon Provinsi Maluku	30 Oktober s.d 1 November 2025
33	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Jiwa Grhasia Provinsi DI Yogyakarta	6 s.d 8 November 2025

No	Kegiatan	Tanggal
34	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Radjiman Wediodiningrat, Malang Provinsi Jawa Timur	6 s.d 8 November 2025
35	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Provinsi Kalimantan Barat	6 s.d 8 November 2025
36	Pendampingan Kunjungan Kerja DPD Komite II ke Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah	9 s.d 11 November 2025
37	Pendampingan Kunjungan Kerja Panja JKN Komisi IX DPR RI ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau	19 s.d 21 November 2025
38	Pendampingan Kunjungan Kerja Panja Percepatan TB ke Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan	19 s.d 21 November 2025
39	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Bidang Kesehatan dalam rangka Pengawasan Program Makan Gizi Gratis (MBG) Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat	1 s.d 3 Desember 2025
40	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Bidang Kesehatan dalam rangka Pengawasan Program Makan Gizi Gratis (MBG) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat	1 s.d 3 Desember 2025
41	Pendampingan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Bidang Kesehatan dalam rangka Pengawasan Program Makan Gizi Gratis (MBG) Kota Tangerang Provinsi Banten	1 s.d 3 Desember 2025
42	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Jayapura Provinsi Papua	10 s.d 14 Desember 2025
43	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya	10 s.d 14 Desember 2025
44	Pendampingan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara	10 s.d 14 Desember 2025

Gambar 3. 54 Dokumentasi Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik, Reses dan Panja Komisi IX DPR RI



Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan selain melaksanakan pendampingan dalam Raker/ RDP/ Ratas Program Kesehatan dan acara kelembagaan lainnya juga bertugas menyiapkan jawaban tertulis atas pertanyaan yang diajukan pada rapat tersebut dalam laporan singkat rapat. Pada tahun 2025 Tim Kerja Hubungan Media dan Kelembagaan telah membuat jawaban pertanyaan sebanyak 5 Jawaban tertulis:

Tabel 3. 34 Rekapitulasi Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI

No	Agenda Raker/RDP	Tanggal Raker	Tanggal Pengiriman
1	<p>Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI dengan pembahasan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Membahas potensi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2025. b) Membahas perkembangan persiapan pelaksanaan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan c) Penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS); d) Manfaat, tarif dan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional. 	11 Februari 2025	15 Februari 2025
2	<p>Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI dengan pembahasan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pembahasan isu – isu krusial di sektor kesehatan, permasalahan Program Pendidikan Dokter 	29 April 2025	5 Mei 2025

No	Agenda Raker/RDP	Tanggal Raker	Tanggal Pengiriman
	<p>Spesialis (PPDS) termasuk evaluasi sistem pendidikan pembiayaan, distribusi peserta didik, dan kejelasan status hubungan kerja.</p> <p>b) Persiapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji tahun 2025, mencakup kesiapan tenaga kesehatan, logistik obat dan alat kesehatan, serta koordinasi lintas sektor untuk menjamin pelayanan yang optimal bagi jemaah haji Indonesia.</p>		
3	<p>Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI dengan pembahasan terkait:</p> <p>a) Membahas permasalahan pelanggaran kode etik dan disiplin kedokteran di fasilitas pelayanan Kesehatan</p> <p>b) Membahas penguatan system pengaduan dan perlindungan korban di sektor kesehatan dan pendidikan</p> <p>c) Membahas transformasi kebijakan penguatan profesionalisme tenaga medis.</p>	30 April 2025	7 Mei 2025
4	<p>Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI terkait</p> <p>a) Perkembangan Penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), termasuk sinkronisasi dengan RPJMN 2025 – 2029 dan perumusan prioritas transformasi sistem kesehatan nasional;</p> <p>b) Evaluasi Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.</p>	14 Mei 2024	28 Mei 2025

No	Agenda Raker/RDP	Tanggal Raker	Tanggal Pengiriman
5	Rapat Kerja Menteri Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI, terkait: <ul style="list-style-type: none"> a) Membahas Evaluasi Mekanisme Pembayaran ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan, termasuk Laporan Dispute Klaim, Klaim yang Pending, dibatalkan dan belum dibayarkan; b) Membahas Kebijakan Pelayanan Kesehatan Program JKN; c) Membahas Kesiapan Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). 	28 Mei 2025	5 Juni 2025

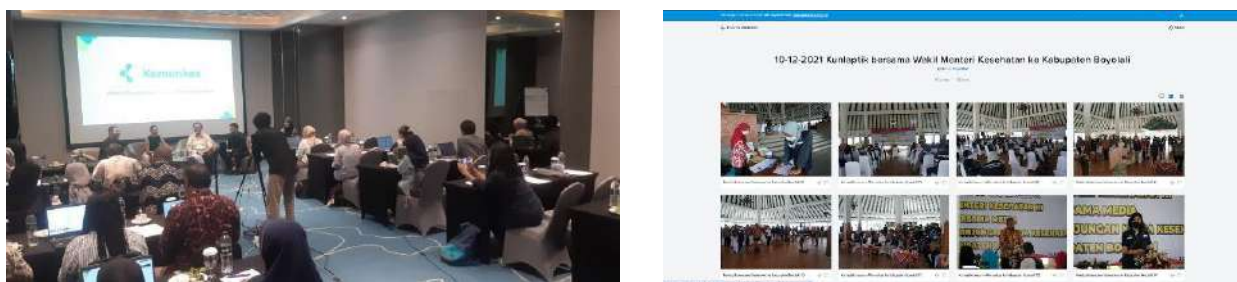
2. Reportase Berita

Kementerian Kesehatan telah membangun hubungan baik dengan berbagai media nasional maupun internasional. Untuk memfasilitasi media mendapatkan berita terkini bidang kesehatan dari sumber terpercaya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengadakan konferensi pers/ temu media dengan berbagai macam isu atau topik kesehatan. Selain itu, media juga difasilitasi untuk melakukan kunjungan lapangan ke fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan lainnya sehingga mereka dapat membuat reportase berita. Sepanjang semester II TA 2025, Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah mengadakan 56 temu media, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 35 Kegiatan Temu Media

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
Temu Media	3	0	3	1	0	5	9	7	8	4	5	11

Gambar 3. 55 Dokumentasi Kegiatan Temu Media



3. **Media Coaching bagi Pejabat/Pimpinan Kementerian Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 menjelaskan bahwa ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Dalam rangka pengembangan kompetensi dan keterampilan ASN Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melakukan kegiatan *media coaching* bagi pejabat/pimpinan Kementerian Kesehatan melalui pembekalan teori dan praktik kiat dan teknik *public speaking* serta *media handling* dalam berhadapan dengan media/wartawan.

Sebagai pejabat publik dan figur yang akan menjadi perwakilan dari institusinya, diperlukan untuk bisa mengenal dan memahami bagaimana sebenarnya cara kerja media, baik itu media massa maupun sosial media. Dengan demikian, kepercayaan publik perlu dibangun dan dijaga agar tidak terjadi kepanikan dalam masyarakat. Hal ini hanya dapat terjadi jika para perumus dan pelaksana kebijakan mendapatkan referensi dan pemahaman yang benar terkait urgensi komunikasi publik dalam pengambilan keputusan, serta memiliki kapasitas yang mumpuni terkait dengan bidang komunikasi. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian dan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan potensi informasi yang *misleading* dan menyebabkan isu bagi lembaga bersangkutan. Dapat disimpulkan pelaksanaan *Media Coaching* bagi Pejabat/Pimpinan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:

- a) Mengetahui dan meningkatkan kapasitas pejabat dalam menghadapi wartawan/media, baik Menkes, Wamenkes, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Juru Bicara, maupun pejabat lainnya di lingkungan Kantor Pusat Kemenkes.
- b) Menyiapkan para pejabat/pimpinan di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat menjadi komunikator yang efektif, agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan yang beragam, mulai dari media, masyarakat, pemerintah, legislatif, sektor swasta dan lainnya.

Dalam rangka memberikan pembekalan teori dan praktik kepada peserta mengenai kiat dan teknik *media handling*, *personal branding*, dan *public speaking* yang pada umumnya terdapat 4 komponen utama kegiatan ini yaitu:

- a) *Review*: menggali pengalaman peserta dalam menghadapi media;
- b) Simulasi wawancara *doorstop*, wawancara via telepon, dan *talkshow* di media penyiaran;
- c) Penyampaian materi tentang *landscape* media dan komunikasi efektif yang disampaikan oleh redaktur media dan pakar komunikasi.
- d) Evaluasi dan penyampaian umpan balik bagi peserta.

Pada kegiatan *media coaching* tahun 2025, pejabat yang menjadi peserta adalah Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D. Beliau terpilih menjadi peserta karena posisi beliau sebagai pejabat eselon 1 yang akan sering berbicara di depan publik atau media sehingga perlu diberikan pembekalan agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara lebih baik. *Media coaching* dilakukan di kantor BKPK Jl. Percetakan Negara, Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025. *Coach* yang menjadi narasumber adalah Bayu Andriyanto yang merupakan seorang jurnalis dengan pengalaman di berbagai televisi (TV One, Kompas TV, dan Trans TV). Berdasarkan *feedback* dari peserta (Ka. BKPK), kegiatan *media coaching* ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas beliau sebagai pejabat publik dalam berbicara di depan umum, khususnya saat menghadapi media, baik pada situasi *talkshow*, maupun yang diadakan seperti *doorstop*.

Gambar 3. 56 Kegiatan Media Coaching



4. Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan di Media Konvensional (*Talkshow* TV/Radio)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan salah satu tugas dan fungsinya dalam hal kemitraan dengan Komisi IX DPR RI melakukan kegiatan Sosialisasi Program Pembangunan Kesehatan di daerah. Giat ini bentuknya berupa sosialisasi yang menampilkan narasumber dari pimpinan/Kapoksi Komisi IX dan Kadinkes Kab./kota dari dapil yang menjadi lokasi acara.

Format acaranya berupa *talkshow* tanya jawab, terdiri dari 3 segmen, dengan durasi total dari awal hingga akhir berkisar antara 45-60 menit. Topik yang dibahas pada kegiatan tahun 2025 adalah tentang Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan mengundang audiens sebanyak 600 orang yang merupakan konstituen dari anggota DPR.

Talkshow ini direkam oleh kru, diolah, dan disunting menjadi bentuk *filler* berdurasi 2-3 menit yang merupakan rangkuman/intisari dari giat secara keseluruhan. *Filler* ini kemudian

dilakukan penayangan di 2 televisi nasional yaitu CNN Indonesia (mewakili TV berita), dan Trans 7 (mewakili TV keluarga) yang menjadi sasaran dari program ini.

Sepanjang tahun 2025 dilaksanakan 18 kali produksi dan placement dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Rekapitulasi Produksi dan Penayangan Filler Sosialisasi Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2025

No.	Nama Pekerjaan	Tgl Produksi	Tayang di CNN	Tayang di Trans7
1	Produksi Filler Irma Suryani	13 Juli 2025	25 Juli 2025	26 Juli 2025
2	Produksi Filler Putih Sari (1)	18 Juli 2025	29 Juli 2025	27 Juli 2025
3	Produksi Filler Kurniasih Mufidayati	27 Juli 2025	05 Agustus 2025	02 Agustus 2025
4	Produksi Filler Ashabul Kafhi	1 Agustus 2025	14 Agustus 2025	16 Agustus 2025
5	Produksi Filler Charles Honoris (1)	22 Agustus 2025	12 September 2025	13 September 2025
6	Produksi Filler Felly Estelita (1)	04 September 2025	15 September 2025	14 September 2025
7	Produksi Filler Felly Estelita (2)	05 September 2026	17 September 2025	20 September 2025
8	Produksi Filler Charles Honoris (2)	09 September 2027	19 September 2025	21 September 2025
9	Produksi Filler Obon Tabroni	17 Oktober 24	30 Oktober 2025	02 November 2025
10	Produksi Filler Putih Sari (2)	23 Oktober 25	29 Oktober 2025	01 November 2025
11	Produksi Filler Cellica Nurrahadiana	21 Oktober 25	04 November 2025	08 November 2025
12	Produksi Filler Nihayatul Wafiroh (1)	22 Oktober 25	03 November 2025	09 November 2025
13	Produksi Filler Nihayatul Wafiroh (2)	24 Oktober 25	05 November 2025	15 November 2025
	Produksi Filler Zainul Munasichin	28 November 25	05 Desember 2025	06 Desember 2025
15	Produksi Filler Edy Wuryanto	28 November 25	08 Desember 2025	07 Desember 2025
16	Produksi Filler Yahya Zaini (1)	29 November 25	09 Desember 2025	06 Desember 2025
17	Produksi Filler Yahya Zaini (2)	1 Desember 25	10 Desember 2025	07 Desember 2025
18	Produksi Filler Heru Tjahjono	20 Desember 25	24 Desember 2025	25 Desember 2025

Gambar 3. 57 Dokumentasi Publikasi Kebijakan/Program Kesehatan di Media Konvensional (Talkshow TV/Radio)



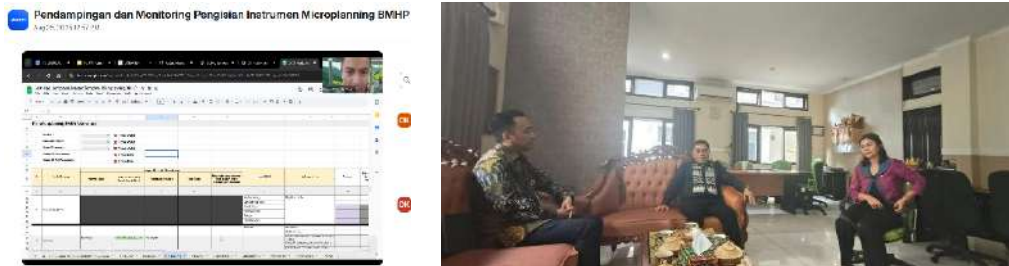
5. Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Korwil Provinsi Bali

Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/130/2023 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Rokominfo) Kemenkes memiliki tugas sebagai koordinator wilayah untuk Provinsi Bali. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas direktif pimpinan dalam menjalankan fungsi pembinaan wilayah khususnya di Provinsi Bali. Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan pendampingan program prioritas, yaitu:

- a) Kick Off Pelaksanaan CKG Anak Sekolah pada 13 Agustus 2025;

- b) Pendampingan Pengisian *Instrumen Microplanning* BMHP di wilayah Provinsi Bali pada 25 Agustus 2025; dan
- c) Pendampingan Pelaksanaan Program MBG, Update CKG, dan Konsultasi Masalah Bidang Kesehatan di Bali pada 19 September 2025.

Gambar 3. 58 Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan Wilayah Korwil Provinsi Bali



Selain itu, pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) kegiatan situasional yang berhasil dilaksanakan yaitu kegiatan audiensi Menteri Kesehatan RI ke RS Wangaya Denpasar menjawab surat dari Walikota Denpasar terkait Permohonan Bantuan Alat Kesehatan akibat Bencana Banjir.

Komunikasi Internal dan Kehumasan

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Komunikasi Internal

Perubahan budaya kerja secara resmi diperkenalkan pada tanggal 19 Februari 2024, ditandai dengan peluncuran Pedoman Budaya Kerja dan Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan sebagai upaya akselerasi terwujudnya Transformasi Internal di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Culture Transformation Office (CTO) Kemenkes, memfokuskan *basic core values* BerAKHLAK tersebut pada tiga tema perubahan budaya Kemenkes yaitu: Eksekusi Efektif (*Effective Execution*); Cara Kerja Baru (*New Ways of Working*); dan Pelayanan Unggul (*Service Excellent*). Tiga tema perubahan budaya kerja ini menjadi visi perubahan budaya kerja Kemenkes yang diharapkan dapat dijalankan oleh seluruh insan Kemenkes sebagai pelaku transformasi.

Gambar 3. 59 Core Value ASN: BerAKHLAK



Oleh karenanya, internalisasi kepada pegawai Kementerian Kesehatan menjadi sangat penting dilaksanakan dalam rangka membangun *awareness* dan dukungan terhadap program transformasi sistem kesehatan maupun program prioritas lainnya. Sebagai bentuk penyebarluasan informasi yang masif dan intensif terkait program transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan serta pelaksanaan Transformasi Internal kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan, maka diperlukan adanya bimbingan teknis (Bimtek) terkait optimalisasi diseminasi informasi dan komunikasi transformasi kesehatan sampai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes.

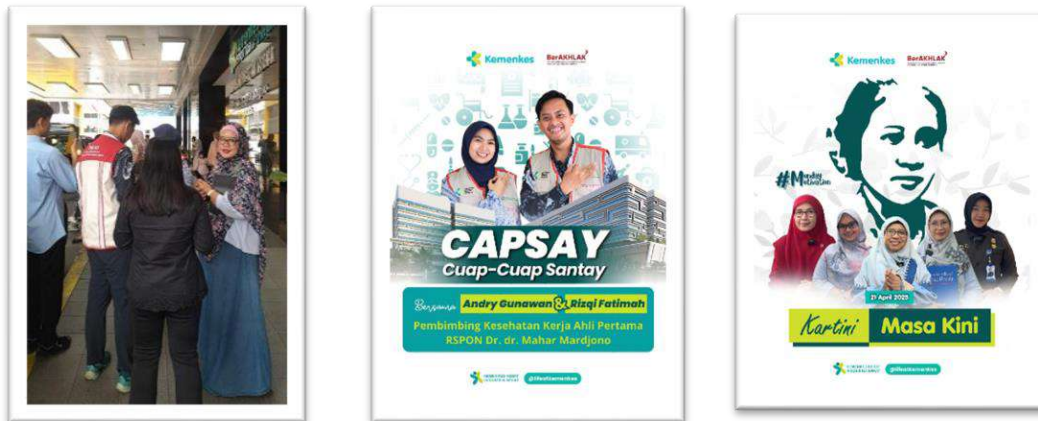
Dalam upaya penguatan kapasitas komunikasi dan optimalisasi pengelolaan informasi di unit pelaksana teknis (UPT), Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melaksanakan serangkaian kegiatan bimbingan teknis. Sebagai wujud kolaborasi dan sinergi lintas unit, kegiatan secara khusus melibatkan partisipasi aktif dari Tim Diseminasi Informasi dan Komunikasi Internal (Diforkin) yang terdiri dari Biro Organisasi Sumber Daya Manusia (OSDM) dan Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (P2KA). Keterlibatan Tim Diforkin bertujuan untuk memperkaya materi bimbingan dengan aspek-aspek informasi kinerja yang relevan dan esensial bagi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan UPT.

Lebih lanjut, dalam setiap kunjungan bimbingan teknis ke UPT, Biro Komunikasi dan Informasi Publik bersama dengan Tim Humas atau pengelola komunikasi UPT setempat senantiasa berkolaborasi dalam pengembangan konten *employer branding*. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat citra positif organisasi dan menarik talenta terbaik di lingkungan Kementerian Kesehatan. Selama Tahun 2025, realisasi pelaksanaan Bimtek mencakup:

a. Pusat Otak Nasional (RS PON) Dr Mahar Mardjono

Salah satu UPT yang telah dikunjungi dan diberikan bimbingan teknis secara langsung pada tanggal 21 April 2025 dengan narasumber berasal dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan dan Biro Organisasi Sumber Daya Manusia. Peserta terdiri dari Manajer Sumber Daya Manusia, Manajer Humas beserta tim teknis terkait. Selain melakukan Bimtek, dilakukan pengambilan konten *branding* institusi serta konten hari besar nasional (Hari Kartini) yang ditayangkan pada instagram @lifeatkemenkes dan berkolaborasi dengan IG RS PON Dr. Mahar Mardjono @rumahsakitotak.

Gambar 3. 60 Produksi Konten CAPSAY bersama UPT Kemenkes RI



b. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang

Salah satu UPT yang telah dilaksanakan Bimtek melalui metode webinar (daring), dan memungkinkan jangkauan yang lebih luas dan efisien. Bimtek Bapelkes Cikarang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan strategi komunikasi internal dan eksternal, telah diselenggarakan Studi Tiru Pengelolaan Instagram @lifeatkemenkes sebagai *Employer Branding*. Kegiatan ini merupakan inisiatif strategis untuk memanfaatkan platform digital dalam memperkuat citra positif Kementerian Kesehatan sebagai institusi dan lingkungan kerja yang unggul khususnya UPT.

Acara ini terselenggara melalui metode Webinar, dengan judul spesifik "Pengelolaan Media Sosial Instagram @lifeatkemenkes sebagai *Employer Branding*". Pelaksanaan webinar ini teregistrasi dan terintegrasi melalui LMS Pelataran Sehat, memastikan jangkauan yang luas serta pengelolaan data peserta yang terstruktur.

Antusiasme peserta terhadap kegiatan ini sangat tinggi, terbukti dari jumlah pendaftar yang mencapai 1.140 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan, melampaui kuota awal yang ditetapkan sebanyak 1.000 peserta. Hal ini mengindikasikan tingginya kebutuhan dan minat ASN terhadap pengembangan kompetensi di bidang komunikasi digital. Webinar berlangsung selama 120 menit dan menghadirkan narasumber-narasumber kompeten dari berbagai unit terkait:

Biro Komunikasi dan Informasi Publik:

- 1) Ketua Tim Kerja Komunikasi Internal dan Kehumasan, yang menyampaikan materi tentang Etika Media Sosial.
- 2) Ketua Tim Kerja Perpustakaan, yang berbagi wawasan mengenai pengelolaan akun @lifeatkemenkes.

- 3) Anggota Tim Kerja Komunikasi Internal dan Kehumasan, yang memaparkan materi Manajemen Konten.

Biro Organisasi Sumber Daya Manusia (OSDM):

Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Kepegawaian, menjelaskan pemanfaatan *Dashboard* di Instagram untuk analisis *performance*.

Gambar 3. 61 Sharing Session Pengelolaan Media Sosial melalui LMS Pelataran Sehat



2. Award Kehumasan: Challenge Konten TikTok Cek Kesehatan Gratis Bagi Mahasiswa Poltekkes

a. Challenge Konten Tiktok

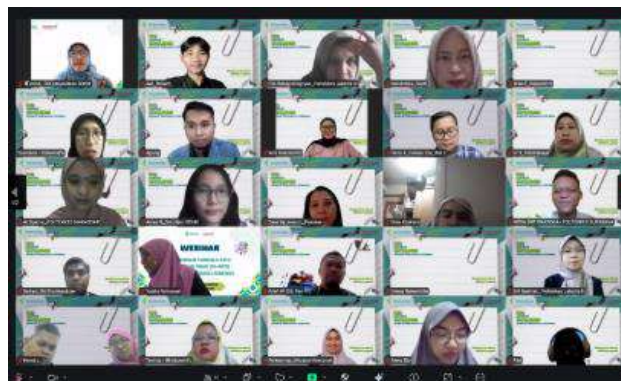
Inisiatif "Award Kehumasan: Challenge Konten TikTok Cek Kesehatan Gratis" dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan diseminasi informasi mengenai program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemilihan media sosial sebagai saluran utama didasarkan pada data penggunaan yang sangat tinggi di Indonesia, tanpa terkecuali melalui platform TikTok. Platform ini sangat dominan dengan Indonesia menduduki pengguna TikTok terbesar di dunia. Melihat potensi tersebut, kampanye melalui TikTok dinilai sangat efektif untuk menggalang dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program CKG di Puskesmas. Strategi kunci yang diimplementasikan adalah mendorong mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes), sebagai representasi Generasi Z dengan tingkat kreativitas dan pengetahuan kesehatan yang memadai, untuk memproduksi dan menyebarkan konten CKG di linimasa TikTok.

Kegiatan *Challenge* Konten TikTok CKG bagi mahasiswa Poltekkes Kementerian Kesehatan bertujuan menyebarkan informasi terkait CKG melalui kanal TikTok serta mengajak mahasiswa Poltekkes Kemenkes untuk berpartisipasi aktif dan mengekspresikan dukungan terhadap program Cek Kesehatan Gratis.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan serangkaian tahapan yang terstruktur, meliputi: (1) Persiapan Administrasi; (2) Pembentukan Panitia, Tim Penyelenggara, dan Tim Juri; (3)

Promosi dan Pengumuman Lomba melalui media sosial; (4) Penyelenggaraan Webinar (sekaligus pembekalan bagi peserta) berjudul “Ngobrol Santai Seputar CKG bareng Gen Z dan *Challenge* Konten TikTok Mahasiswa: Tips & Trik Langsung dari Ahlinya!”; (5) Pengiriman Konten oleh peserta; (6) Penjurian konten; (7) Pengumuman Pemenang; (8) Publikasi Konten Pemenang di berbagai kanal; (9) Pengiriman Hadiah kepada pemenang; dan (10) Evaluasi.

**Gambar 3. 62 Pelaksanaan Challenge Konten TiTok Mahasiswa
Politeknik Kesehatan Kemenkes**



Dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Batas Pengumpulan Video: 16 Juli 2025
- 2) Pengumuman Pemenang Lomba: Minggu ke-4 Juli 2025
- 3) Penganugerahan Pemenang: Minggu ke-4 Juli 2025

Tim Juri kegiatan ini terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan internal Kementerian Kesehatan, telah menyelesaikan proses seleksi terhadap seluruh video konten yang terkumpul hingga batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penilaian komprehensif tersebut, dewan juri telah menetapkan 3 (tiga) pemenang.

Keberhasilan penyelenggaraan *challenge* ini merupakan indikator positif dalam upaya Kementerian Kesehatan untuk beradaptasi dengan tren komunikasi digital, melibatkan generasi muda, dan secara efektif menyebarkan informasi kesehatan penting kepada masyarakat luas.

Gambar 3. 63 Poster Promosi Challenge Konten TiTok Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes



Pengumuman pemenang dilaksanakan secara daring pada hari Selasa, 2 September 2025 secara daring melalui Zoom. Sebanyak 40 partisipan bergabung dalam kegiatan pengumuman lomba, yang terdiri dari para Direktur Poltekkes Kemenkes, juri, dan peserta lomba. Adapun Tim Juri kegiatan ini terdiri dari akademisi, praktisi, dan perwakilan internal Kementerian Kesehatan, telah menyelesaikan proses seleksi terhadap seluruh video konten yang terkumpul hingga batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penilaian komprehensif tersebut, dewan juri telah menetapkan 3 (tiga) pemenang dan 4 (empat) pemenang favorit.

b. Webinar CKG Bagi Mahasiswa Poltekkes

Webinar "Award Kehumasan: *Challenge* Konten TikTok Cek Kesehatan Gratis bagi Mahasiswa Poltekkes" telah sukses diselenggarakan untuk mengoptimalkan diseminasi informasi terkait program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan memperkuat *employer branding* melalui platform digital.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada webinar ini didukung oleh unit kerja teknis terkait yaitu Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SMDK) dan Direktorat

Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer. Adapun pemaparan materi dibagi menjadi tiga sesi yaitu:

1. Sosialisasi CKG, disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, menjelaskan esensi dan pentingnya program CKG.
2. CKG di TikTok: “Kontennya Harus Gokil?”, dipaparkan oleh Narasumber dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik, membahas strategi pembuatan konten TikTok yang menarik dan efektif.
3. Paparan Persyaratan CKG Bersama *Gen Z Content Challenge*, disampaikan Narasumber Biro Komunikasi dan Informasi Publik, merinci ketentuan dan mekanisme partisipasi.

Partisipasi dan antusiasme peserta terekam dari data kehadiran sebagai berikut:

1. Peserta Zoom: mencapai 500 *user name* pada awal penyelenggaraan dan 239 *user name* pada sesi akhir.
2. Peserta YouTube: Tercatat 31 akun yang mengikuti secara daring.
3. Hasil Presensi Akhir: Total 839 peserta berhasil terekam presensinya.

Keberhasilan webinar ini menunjukkan efektivitas pemanfaatan platform digital dalam menjangkau audiens yang luas serta kolaborasi dengan berbagai unit dan Poltekkes dalam mendukung kampanye kesehatan publik.

Gambar 3. 64 Webinar "Award Kehumasan: Challenge Konten TikTok Cek Kesehatan Gratis bagi Mahasiswa Poltekkes"



3. Pengelolaan *Newsletter Digital*

Dalam mendukung Transformasi Sistem Kesehatan agar tersampaikan dan terinternalisasi di lingkungan internal Kementerian Kesehatan, telah disusun inisiatif program *Internal Transformation Office* melalui kegiatan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Internal (Diforkin).

Terdapat 10 kegiatan di dalam Diforkin. Biro Komunikasi dan Informasi Publik turut terlibat dalam 3 kegiatan, di antaranya melalui 1) *newsletter* yang akan disebarluaskan melalui *email blast*, *e-office* dan *Whatsapp blast*; 2) kegiatan dengan para pengelola komunikasi internal di


masing-masing satker; serta 3) mengoptimalkan pemanfaatan media yang saat ini sudah tersedia.

Pada tahun 2025, *Newsletter Digital* dikeluarkan dalam bentuk WA Blast sementara diseminasinya menggunakan media yang telah ada, seperti Instagram @lifeatkemenkes dan portal *e-office*.

a) **Paid Media WhatsApp Blast “Sehat Negeriku”**

Pada Semester I Rokomyanlik bekerja sama dengan penyedia jasa WhatsApp *Business Suite* untuk mengirimkan pesan total 1 pesan WhatsApp Blast dalam satu tahun kepada ASN Kemenkes. Pesan WA berisikan informasi terkait transformasi internal, ucapan hari besar kesehatan/keagamaan, maupun undangan webinar.

Tabel 3. 37 Publikasi Konten di Whatsapp Blast “Sehat Negeriku”

1	Januari	Edaran untuk mengunduh SSM dan mendaftarkan program CKG (Seluruh Pegawai: 49.939 pesan <i>delivered</i>)	
---	---------	---	--

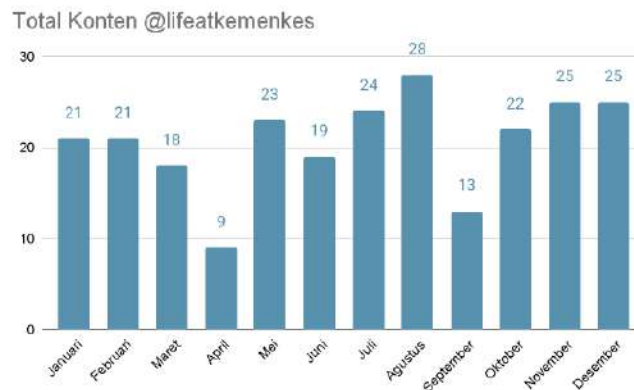
b) **Shared Media: Instagram @lifeatkemenkes**

Instagram merupakan media sosial ketiga yang paling banyak digunakan di Indonesia setelah YouTube dan Facebook. Instagram dipilih karena terlebih dahulu Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia telah memiliki instagram yang sudah memiliki 12.000 pengikut. Selanjutnya akun ini disepakati untuk digunakan sebagai media sosial penyampai pesan kepada pegawai Kemenkes. Sampai dengan Desember 2025 jumlah pengikut sebanyak 127.263 *followers*.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengambil peran dalam pembuatan konsep, Pembuatan konten dan penyebarluasannya. Sementara untuk strategi *content pillar* dan *agenda setting* didiskusikan bersama Tim Diforkin. Pada periode Januari sampai dengan

Desember 2025 Tim Diforkin telah memposting sebanyak lebih dari 300 konten digital (grafis dan video).

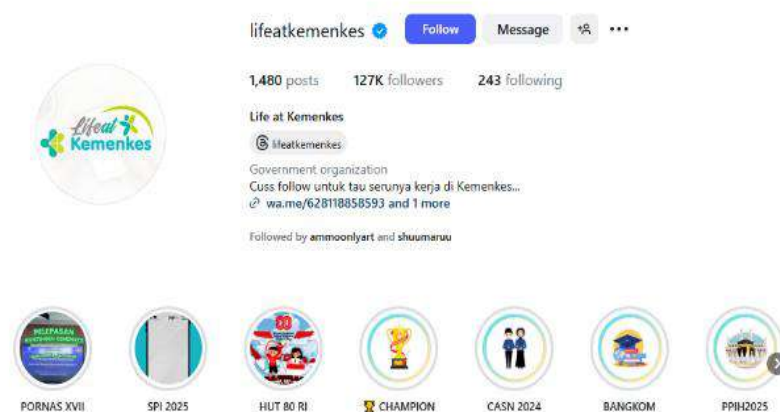
Gambar 3. 65 Diagram Publikasi Konten di Akun @lifeatkemenkes



Konten pilar dalam akun @lifeatkemenkes dibuat beragam, diantaranya:

- 1) Informasi umum kegiatan internal pegawai, ex: Townhall, Kegiatan Ramadhan, Mutasi Internal, dll
- 2) Informasi pengembangan kompetensi pegawai, ex: beasiswa, pelatihan, seminar, dsb
- 3) Informasi Kepegawaian, ex: rekrutmen pegawai
- 4) *Monday motivation*
- 5) Komik transformasi dan Ber-AKHLAK
- 6) EXIST: Hobi dan Komunitas Pegawai Kemenkes
- 7) CAPSAY: cuap cuap santai seputar jabatan fungsional maupun bincang-bincang bersama pegawai Kemenkes terkait pengalaman maupun informasi bermanfaat lainnya
- 8) Ucapan selamat hari besar
- 9) Konten kolaborasi bersama unit lain atau UPT

Gambar 3. 66 Feed Instagram @lifeatkemenkes



Tabel 3. 38 Top Content Performance @lifeatkemenkes Januari s.d Desember 2025

1.	<p>Static Image Feed: Pray For Sumatera (28 November 2025) Views: 1,200,370 https://www.instagram.com/p/DRmEmcKkuF2/</p>	
2.	<p>Temukan 7 Insan Kemenkes yang Happy sudah CKG (4 Maret 2025) Views: 347.110 https://www.instagram.com/p/DGwn18iS516/</p>	
3.	<p>Static Image Feed: Perpanjangan Pendaftaran Beasiswa (12 Oktober 2025) Views: 322,179 https://www.instagram.com/p/DPth7gdEu5k/?img_index=1</p>	

Hasil Survei Kepuasan Pengguna (*followers*) @lifeatkemenkes pada tahun 2025 dengan total responden sebanyak 779 menunjukkan bahwa secara umum performa akun ini menunjukkan tren positif yang konsisten. Tingkat kepuasan keseluruhan (*overall satisfaction*) mengalami kenaikan tipis dari 4.61 (2024) menjadi 4.64 (2025) pada skala 5.

Temuan paling signifikan adalah pergeseran demografi *audience*. Terjadi peningkatan partisipasi dari kalangan non-pegawai (masyarakat umum) sebesar 8% dibandingkan tahun lalu, hal ini mengindikasikan konten @lifeatkemenkes semakin berhasil menjangkau publik di luar lingkup internal kementerian.

Pengikut @lifeatkemenkes menilai konten sangat bermanfaat, bersifat informatif, *up to date*, relevan, menarik dan menghibur. Sementara untuk konten yang paling dicari yaitu seputar transformasi internal, informasi kepegawaian, hiburan dan *monday motivation*. Para pengikut juga menilai admin akun sebagai sosok responsif dan menghibur.

Di sisi lain terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan yaitu peningkatan responsivitas admin dalam menjawab *direct messages* dan kolom komentar. Selain itu juga diharapkan agar konten-konten juga lebih banyak mengupas tentang UPT di daerah, tidak hanya terfokus pada kantor pusat saja.

4. Pertemuan Komunikasi Internal dan Kehumasan

a. Pertemuan Kehumasan Unit Utama Kementerian Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022, Biro Komunikasi dan Informasi Publik bertanggung jawab atas pengelolaan komunikasi dan informasi publik, serta pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas. Mengingat peran vital Humas kesehatan sebagai perpanjangan tangan Kementerian, Biro Komunikasi dan Informasi Publik aktif melakukan pengawasan dan pembinaan bidang kehumasan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pada 9 Mei 2025, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan Rapat Koordinasi Humas Unit Utama Kementerian Kesehatan. Tujuan pertemuan: memperkuat koordinasi, meningkatkan sinergi dan efektivitas penyampaian informasi bagi Hubungan Masyarakat (Humas) Unit Utama Kementerian Kesehatan serta dalam upaya menyelaraskan strategi komunikasi publik dalam pengelolaan informasi kementerian secara efektif dan terpadu. Adapun rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Humas dari masing-masing unit utama. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai kegiatan strategis kehumasan mencakup:

- a) Strategi Komunikasi, menyusun rencana berbasis data, mengidentifikasi isu proaktif, dan meningkatkan penyebaran informasi dengan memetakan kendala serta segmentasi audiens. Penting juga untuk membangun narasi yang relevan dan mengelola *hoaks*.
- b) Biro Komunikasi dan Informasi Publik mendukung dengan media *monitoring* dan fasilitasi pertemuan.
- c) Publikasi Media, mengoptimalkan kanal resmi seperti media sosial dan daring. Kolaborasi antar humas penting untuk konten yang konsisten dan memanfaatkan momentum isu publik.
- d) Isu Prioritas dan Kampanye Tematik, menyusun roadmap isu dan kampanye terintegrasi yang melibatkan lintas unit. Humas unit utama diharapkan memberikan masukan dari lapangan.
- e) *Monitoring* & Evaluasi: Membangun sistem pemantauan komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi (jangkauan, tanggapan, persepsi). Humas unit utama bertanggung jawab untuk pelaporan berkala.
- f) Sinergi antara Humas Unit Utama dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik diharapkan dapat mewujudkan komunikasi publik yang efektif, strategis, dan berkontribusi positif pada persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan layanan kesehatan.

Gambar 3. 67 Pertemuan Kehumasan Unit Utama Kementerian Kesehatan



Pertemuan Kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 yang melibatkan 57 Balai Kekejarantinaan Kesehatan serta 6 unit utama. Pertemuan ini dilaksanakan rangka meningkatkan sinergi dan efektivitas komunikasi publik di Kementerian Kesehatan khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit. Pada kegiatan tersebut dibahas kolaborasi konten Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan BKK serta Unit eselon 2 dilingkungan Dirjen PP Kenapa kolaborasi konten di perlukan. Karena eelama ini banyak orang masih melihat karantina sebagai sesuatu yang represif, padahal esensinya: protektif atau melindungi masyarakat dari ancaman penyakit yang bisa datang diam-diam dari luar negeri. Konten dari petugas BKK di pintu negara bukan cuma layak tayang, tapi layak dipercaya karena, BKK adalah frontline kesehatan publik di pintu masuk negara dan masyarakat butuh tahu bahwa negara siap siaga sebelum penyakit tersebar, Konten tersebut di lapangan bisa bantu memperkuat persepsi dan narasi nasional.

Manfaat kolaborasi dapat menegaskan bahwa karantina adalah garda terdepan perlindungan kesehatan nasional. Serta dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui cerita nyata dan empatik dan menyatukan pesan humanis dari lapangan dengan strategi komunikasi nasional. Adapun rencana tindak lanjut dari kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Kolaborasi dan kordinasi secara rutin antara Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Balai Kekejarantinaan Kesehatan.
- b) Membuat WA grup untuk memudahkan Kordinasi.
- c) Konten Kolaborasi antar akun Kemenkes dengan BKK akan di kordinasikan dengan tim Publikasi Media.

Pertemuan Kehumasan di lingkungan Direktorat Kesehatan Lanjutan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 dan dilaksanakan secara daring dihadiri oleh RS Vertikal di lingkungan Direktorat Kesehatan Lanjutan. Pada pertemuan tersebut dibahas *Monitoring* Isu terkait pelayanan Kesehatan seperti Isu malaraktik, Pada rentang waktu 1 sd 28 Juni 2026 terdapat Terdapat 103 berita tentang dugaan malapraktik di 68 media massa. Media terbanyak memberitakan ialah: kompas.com, tribunnews.com dan detik.com, dengan sentimen

pemberitaan 78% negatif dan 22% netral. Selain isu malapraktik dibahas pula isu Warga Negara Indonesia (WNI) yang berobat ke luar negeri berdasarkan pemantauan berita media massa Periode 1 - 28 Juni 2025 terdapat 23 Berita yang relevan. Isu yang diangkat, diantaranya adalah:

- a) Statement Tantowi Yahya ungkap alasan pilih berobat ke Malaysia bukan di Indonesia
- b) Sektor kesehatan bocor 162T mengalir berobat keluar negeri
- c) Menko PMK soroti ramainya WNI berobat keluar negeri
- d) Statement Menkes terkait kebutuhan anggaran Pelayanan Kesehatan di RI untuk bisa setara dengan Malaysia

Terkait hal tersebut perlu adanya kolaborasi konten antara Biro Komunikasi dengan Direktorat Jenderal Kesehatan lanjutan serta RS Vertikal guna membangun kepercayaan publik melalui cerita nyata pelayanan kesehatan. Humas di RS Vertikal berperan bukan hanya sebagai penyampai informasi, tapi sebagai *trust builder*.

- a) Mengangkat cerita keberhasilan layanan sebagai bukti nyata.
- b) Mendorong persepsi positif terhadap layanan publik.
- c) Menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan informasi antara persepsi dan realitas pelayanan kesehatan pemerintah.
- d) RS Vertikal harus mampu menahan arus keluar negara melalui layanan setara.

Atas pembahasan di atas, disusun beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Mekanisme koordinasi & kolaborasi ke RSV: Biro Komunikasi dan Informasi Publik -> Humas RSV (ditembuskan ke Humas Direktorat Jenderal Keslan)
- b) Membagikan informasi dan membuat database terkait nomor kontak masing-masing biro dan perwakilan tim kerja untuk memudahkan koordinasi
- c) Agendakan secara rutin koordinasi dan sharing knowledge dengan Humas RSV (1-3 bulan sekali)
- d) Setiap 1 bulan RSV membuat minimal 1 content testimoni pasien RS yang sudah mendapatkan pelayanan unggulan dari RSV tersebut dan kolaborasi dengan medsos Kemenkes
- e) Konten dibuat oleh RSV, Guideline akan disediakan oleh Tim Kerja Publikasi Media Rokominfo
- f) RSV harus bisa memetakan isu harian sebagai alert sebelum terjadi krisis komunikasi yang dikoordinasikan dengan Humas Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

5. Pertemuan Humas Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan memiliki peran krusial dalam menyebarkan informasi yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga reputasi positif Kemenkes.

Para pelaksana kehumasan di Kemenkes—termasuk para pejabat fungsional pranata humas yang saat ini berjumlah 239 orang di berbagai unit kerja—bertanggung jawab menyampaikan informasi terkini mengenai kebijakan dan program kesehatan secara profesional. Biro Komunikasi dan Informasi Publik juga bertindak sebagai pembina bagi para praktisi humas ini, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/1125/2022.

Dalam menjalankan tugasnya, tim humas harus mampu memantau isu publik, mengelola informasi dan mengamplifikasi informasi kepada khalayak sasaran secara cepat dan tepat. Peran humas menjadi sangat vital dan strategis, terutama dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi, bencana alam, atau isu kesehatan yang mendesak. Dalam kondisi ini, humas tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai manajer krisis.

Selain itu, humas memiliki andil besar dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang jujur dan transparan. Mereka juga bertugas mengendalikan narasi publik agar sejalan dengan tujuan pemerintah, memastikan masyarakat memahami alasan di balik program dan kebijakan kesehatan yang diambil.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan pembinaan di bidang kehumasan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memandang perlu adanya wadah yang bersifat koordinatif dan strategis untuk memperkuat peran humas kesehatan. Wadah ini diharapkan dapat meningkatkan jejaring antarhumas kesehatan di seluruh Satuan/Unit Kerja Kemenkes, sehingga terwujud kesatuan langkah strategis dalam mengkomunikasikan program dan kebijakan kesehatan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan profesional. Sebagai implementasinya, Birokominfo menyelenggarakan Pertemuan Humas Kesehatan. Pertemuan dilakukan melalui skema fullday meeting dan daring (hybrid), dengan peserta pertemuan terdiri dari:

- a) Panitia penyelenggara dari Timker Komunikasi Internal dan Kehumasan
- b) Perwakilan Humas Unit Utama
- c) Perwakilan Humas dari UPT Vertikal
- d) Ketua Tim Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Secara keseluruhan, kegiatan ini dihadiri oleh 81 peserta luring dan 251 peserta daring. Sementara untuk peserta yang mendaftar pada LMS sebanyak 377 orang. Adapun narasumber dari pertemuan ini yaitu:

- a) *Presidential Communication Office* (PCO), Ujang Komarudin
- b) Kementerian Komunikasi Digital selaku pengampu JF Pranata Humas, Andi Muslim
- c) Praktisi Kehumasan dari Imogen PR, Jojo S. Nugroho
- d) Pranata Humas Ahli Madya Kemendagri sekaligus Psikolog Klinis, Silvany Dianita
- e) Ketua DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS), Fachrudin Ali Achmad

Gambar 3. 68 Dokumentasi Pertemuan Kehumasan



6. Pembinaan Kehumasan

a. Data Bezzeting Jabfung Pranata Humas

Bahwa Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak relevan dengan struktur dan kebutuhan organisasi saat ini, sehingga perlu disusun peta jabatan yang baru. Terkait hal tersebut Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kementerian Kesehatan diminta untuk melakukan penyesuaian atas kebutuhan jabatan fungsional sesuai struktur organisasi yang baru dengan melakukan redistribusi berdasarkan surat rekomendasi yang sudah diberikan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas sesuai dengan jumlah kebutuhan tetap, sesuai rekomendasi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital selaku pembina.

Terkait hal tersebut melalui tim kerja Komunikasi Internal dan kehumasan telah melaksanakan kegiatan redistribusi Jabatan Fungsional Pranata Humas yang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Biro OSDM Kemenkes dan satuan kerja terkait dalam hal menyusun redistribusi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk daring yang dilaksanakan pada tanggal Selasa, 29 April 2025. Hasil yang dicapai adalah terbitnya keputusan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik nomor HK.02.03/A.V/1119/2025 tentang Peta Redistribusi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Humas di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Gambar 3. 69 SK Penetapan JFT Pranata Humas Pratama



Pada tanggal 26 Agustus 2025 (Semester II) Sekretaris Jenderal memberikan arahan terkait pemetaan dan analisis kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) di lingkungan Kementerian Kesehatan agar memperhatikan tugas, fungsi serta Tipologi/Kelas Organisasi, serta memberikan ruang pengembangan karier bagi jenjang keterampilan (jenjang terampil, mahir, dan penyelia), dan jenjang keahlian (jenjang pertama dan jenjang muda).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Birokominfo telah melakukan redistribusi ulang JF Pranata Humas di lingkungan Kemenkes sesuai dengan arahan sebelumnya.

Tabel 3. 39 Komposisi Redistribusi dan Bezzeting 2025

Rekomendasi JF Pranata Humas				Eksisting 2025		
No	Jenjang	Rekomendasi IP	Rancangan sesuai pola tabung	PNS	P3K	Total
1	madya	43	43	12	0	12
2	muda	203	203	77	0	77
3	pertama	421	203	122	131	253
4	Penyelia	17	37	5	0	5
5	Mahir	194	37	4	0	4
6	Terampil	299	37	17	20	37
total		1177	560	237	151	388

Tindak lanjut dari penyesuaian ini ialah perlu melakukan advokasi kepada Instansi Pembina terkait kebijakan yang terbaru di Internal Kemenkes.

b. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas

Biro Komunikasi dan Informasi Publik sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1225/2022, bertanggung jawab atas pengelolaan komunikasi dan informasi publik, serta pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan uji kompetensi untuk perpindahan dari jabatan lain, promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional Pranata Humas serta promosi yang dilaksanakan melalui kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pranata Humas (sesuai Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat) dalam penyelenggaraan uji kompetensi bekerja sama dengan Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sampai saat ini Biro Komunikasi dan Informasi Publik sudah mengajukan 19 pranata humas untuk mengikuti uji kompetensi regular

Mekanisme uji kompetensi pranata humas adalah Bagian OSDM unit eselon I mengirimkan surat permohonan serta persyaratannya untuk mengikuti uji kompetensi tersebut setelah diterima oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik di cek ulang sesuai persyaratannya yang jika telah memenuhi persyaratan akan dikirimkan ke Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk uji kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan. Biro Komunikasi dan informasi publik telah mengajukan JFPH yang Uji kompetensi untuk pemangku jabatan JFPH, untuk tahap pertama mengajukan sebanyak ini dilakukan secara bertahap, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Tahap pertama Permohonan Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional Pranata Humas Kementerian Kesehatan mengusulkan 19 peserta kenaikan jenjang. Untuk tahap dua Biro Komunikasi mengusulkan Uji Kompetensi Reguler Kenaikan Jenjang dan Perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Gelombang II di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 sebanyak 24 orang untuk alih jabatan serta 2 orang untuk kenaikan jenjang. Selain itu Biro Komunikasi juga melaksanakan uji kompetensi secara mandiri bagi Prahum di kalangan Ditjen Keslan dan Setjen. Berdasarkan surat kepala Biro OSDM Kemenkes kepada Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komunikasi dan Digital KP.03.02/A.IV/40129/2025 31 Oktober 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2025 dengan jumlah peserta 9 orang.

7. Peningkatan Kapasitas Pranata Humas

Dalam era transformasi digital, peran Tim Diseminasi Informasi dan Komunikasi Internal menjadi sangat krusial sebagai jembatan informasi antara pimpinan, pegawai, dan publik. Tim ini tidak hanya bertanggung jawab memastikan arus informasi kebijakan tersampaikan dengan tepat, tetapi juga memegang mandat strategis dalam membangun citra positif instansi (*employer branding*) melalui kanal komunikasi digital, seperti akun media sosial @lifeatkemenkes.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik berkolaborasi dengan Pusat Pengembangan Kompetensi ASN telah menyelenggarakan Workshop Optimasi Sosial Media pada 23-24 Desember 2025 di BBPK Jakarta, yang diikuti oleh 30 peserta pranata humas dan petugas yang berwenang dalam mengelola komunikasi dari lintas unit kerja (Birokominfo, Biro OSDM, Pusdatin, P2KA, Itjen, BBPK Jakarta, Bapelkes Cikarang, dan Bapelkes Ciloto). Penyelenggaraan dibantu oleh penyedia jasa pelatihan PT RevoU, dengan narasumber dari Christianti Farisa dari Bytedance (TikTok). Kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasi strategi diseminasi informasi melalui optimalisasi teknologi AI dan otomatisasi, dengan target efisiensi waktu produksi konten hingga 50%. Fokus materi diarahkan pada penguatan *employer branding* (@lifeatkemenkes), penyusunan strategi konten berbasis data, serta teknik *visual storytelling* dan *high-speed video editing* guna memastikan informasi kebijakan kesehatan dapat menjangkau audiens milenial dan Gen-Z secara lebih efektif dan adaptif.

Hasil evaluasi menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan, ditandai dengan kenaikan kompetensi peserta rata-rata sebesar +6,52% (berdasarkan nilai *pre-test* dan *post-test*) serta tingkat penyelesaian proyek konten akhir mencapai 100%. Output nyata dari kegiatan ini meliputi terciptanya sistem *content bank* otomatis dan purwarupa video komunikasi yang siap digunakan sebagai instrumen sosialisasi program prioritas. Dengan tercapainya sasaran pelatihan ini, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik telah memperkuat kapasitas SDM dalam mengelola kanal digital secara profesional, yang berkontribusi langsung pada peningkatan transparansi publik dan citra positif Kementerian Kesehatan di ruang siber.

Gambar 3. 70 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pranata Humas



8. Pengelolaan Cybertroops

Di tengah dinamika informasi yang semakin cepat dan kompleks, serta potensi munculnya isu-isu krusial yang dapat berkembang menjadi krisis komunikasi, peran Pranata Humas menjadi sangat vital dalam menjaga citra positif dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Kesehatan. Terlebih lagi saat menghadapi tantangan komunikasi krisis, diperlukan langkah-langkah proaktif dan kesiapan yang lebih matang.

Selain itu, untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan secara rutin mempublikasikan berbagai konten melalui kanal media sosial resmi, yaitu:

1. Facebook : @kemenkes_ri
2. X : @KemenkesRI
3. Instagram : @kemenkes_ri; @lifeatmkemenkes
4. YouTube : @KementerianKesehatan RI
5. TikTok : @kemenkesri; @ayosehat.kemkes

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan surat Sekretariat Jenderal No. KM.01.03/A/1833/2025 perihal Penguatan Peran Pranata Humas Kementerian Kesehatan sebagai Garda Depan Digital dalam Komunikasi Krisis Kesehatan. Harapannya agar ASN Kemenkes dapat: (1) Mendiseminasikan semua informasi dan konten yang di *upload* ke kanal media sosial Kementerian Kesehatan ke seluruh pegawai Kementerian Kesehatan (baik pusat maupun daerah) melalui kanal komunikasi (WhatsApp, Telegram, dan jalur komunikasi lainnya). (2) Mengajak pegawai untuk *follow*, *repost*, *comment* positif, dan *reshare*) atau berinteraksi dengan konten-konten resmi Kemenkes, dan (3) Menjadikan Referensi Utama Konten Kesehatan.

Surat ini merupakan cikal bakal pembentukan *Cybertroops* atau selanjutnya akan disebut program *Employee Advocacy*. Dalam konteks ini *Employee Advocacy* dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reputasi Kemenkes. Dengan memberdayakan pegawai sebagai duta organisasi, pemerintah dapat memanfaatkan jaringan dan pengaruh mereka untuk mempromosikan program, kebijakan, dan layanan publik, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Gambar 3. 71 Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Cybertroops Kemenkes RI



Pertemuan ini bertujuan sebagai berikut: 1) Internalisasi Nilai dimana mengubah pola pikir birokratis menjadi pola pikir advokasi, di mana setiap ASN merasa terpanggil untuk meluruskan informasi kesehatan yang keliru di lingkungan sosial terdekatnya, 2) Pertukaran Taktik Komunikasi yang membedah strategi komunikasi "tipis-tipis" (subliminal) yang efektif untuk memenangkan hati publik dan mematahkan hoaks tanpa memicu perdebatan kontraproduktif, 3) Penyatuan Kanal Komando yang membentuk dan mengaktifkan kanal komunikasi khusus (Garda Depan Digital) sebagai jalur distribusi materi informasi yang valid, cepat, dan siap amplifikasi, 4) Simulasi Krisis Nyata yang melatih kesiapsiagaan peserta dalam menghadapi serangan informasi pada program kesehatan melalui simulasi penanganan isu berbasis kasus riil. Secara keseluruhan, pertemuan ini dihadiri oleh 50 peserta dan dihadiri oleh Narasumber:

1. Brigjen Pol. H. Ary Syam Indradi, SH.,S.I.K.,M.H. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri
2. Savero Dwipayana, perwakilan Pokja RCCE
3. Oktara Irahadi, Praktisi Sosial Media dari Gerakan Nasional Siberkreasi

Pertemuan *Cybertroops* berlangsung pada Kamis 4 Desember 2025 pukul 08.00 s.d 16.00 WIB bertempat di Hotel Tamarin Jl. KH. Wahid Hasyim No. 77, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, maka disusunlah rencana tindak lanjut, sebagai berikut:

Tabel 3. 40 Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Pertemuan Cybertroops

No.	Aksi Prioritas	Vocal Point	Output
1	Pembentukan Kanal Komunikasi Tunggal	Kepala Biro Komunikasi Publik	Pembentukan dan aktivasi Grup Digital Frontliner (Telegram/WA) yang berisi seluruh Kepala/Koordinator Humas Unit Utama dan UPT.
2	Penunjukan Koordinator <i>Advocates</i> Unit	Seluruh Kepala Unit Utama/UPT	Penunjukan resmi (minimal lisan/via WA) 1-2 orang Humas sebagai Koordinator Digital Advocates lokal di setiap unit.

No.	Aksi Prioritas	Vocal Point	Output
3	Produksi <i>Starter Pack</i> Konten	Tim Inti Komunikasi Publik	Pembuatan dan distribusi 5 <i>template konten</i> siap sebar (<i>copy-paste</i>) yang berfokus pada narasi kunci Isu Kesehatan dan Data Kesehatan Valid .
4	Uji Coba Amplifikasi Serentak	Semua Koordinator Humas	Pelaksanaan uji coba sebar serentak menggunakan salah satu <i>template</i> yang telah disediakan. Laporan singkat hasil <i>reach</i> uji coba.
5	Penyusunan SOP Mini Praktis	Biro Komunikasi Publik	Penyusunan SOP Mini (3-4 poin panduan praktis) yang menjadi pedoman wajib bagi Humas di unit untuk merespons isu dan melakukan amplifikasi.

9. Forum Tematik Kehumasan (Bakohumas)

Salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Kementerian Kesehatan yaitu Cek Kesehatan Gratis. Program Cek Kesehatan Gratis telah diluncurkan pada Februari 2025 untuk menyediakan layanan skrining kesehatan tanpa biaya bagi seluruh masyarakat, baik yang terdaftar maupun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tujuan utama program ini adalah untuk mendeteksi secara dini berbagai penyakit kronis seperti jantung, stroke, kanker, TBC, serta gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.

Selain itu untuk meningkatkan jumlah capaian program cek kesehatan gratis dan penyebaran informasi ke masyarakat, maka diharapkan melalui pertemuan Forum Tematik Kehumasan antara Kementerian Lembaga dapat menyalurkan informasi tersebut. Program inipun telah berjalan diberbagai unit - unit kerja Kesehatan serta aplikasi SATUSEHAT Mobile yang berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan digital untuk memudahkan masyarakat mengakses data kesehatan pribadi dalam satu platform terpadu. Secara khusus, beberapa tujuan dari diadakannya Forum Tematik Bakohumas Tahun 2025 pada pagi ini, antara lain:

- a) Mendiseminasi informasi mendalam mengenai program CKG sebagai program prioritas bidang kesehatan.

- b) Mendorong partisipasi aktif Humas Kementerian/Lembaga dalam mendukung dan mengamplifikasi jangkauan program CKG.
- c) Meningkatkan koordinasi dan integrasi antar humas pemerintah agar penyebaran informasi kesehatan lebih efektif dan tepat sasaran.
- d) Memperkuat jejaring kehumasan antar Humas di Kementerian/Lembaga
Secara keseluruhan kegiatan ini dihadiri oleh 150 peserta dari berbagai Kementerian dan Lembaga, para petinggi dan Narasumber
 - a) Wakil Menteri Kesehatan (Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D)
 - b) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (Aji Muhawarman, MKM)
 - c) Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Molly Prabawati)
 - d) Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes (Maria Endang Sumiwi)
 - e) Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah (Adita Irawati)

Untuk mengoptimalkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), pada Forum Tematik Kehumasan pada tanggal 10 Desember 2025, terdapat fasilitas *stand* Cek Kesehatan Gratis yang diselenggarakan bersama dengan Puskesmas Setiabudi dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan. Melalui forum ini secara tidak langsung mengingatkan dan mengajak untuk pentingnya hidup sehat. Fasilitas lain yang diselenggarakan dalam pertemuan Forum Tematik Kehumasan yaitu Layanan Coretax dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan SATUSEHAT Mobile dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan.

Gambar 3. 72 Forum Tematik Kehumasan (Bakohumas)



10. Pengelolaan Website Kementerian Kesehatan

Gambar 3. 73 Website Kementerian Kesehatan



Website Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) merupakan sarana komunikasi publik resmi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, program, dan informasi kesehatan kepada masyarakat yang dapat diakses melalui tautan www.kemkes.go.id.

Pada Semester IV Tahun 2025, pengelolaan *website* difokuskan pada publikasi regulasi strategis, laporan kesehatan nasional, pengumuman kegiatan, serta kampanye kesehatan nasional. Selama periode Oktober-Desember 2025, pengelolaan *website* meliputi pembuatan konten baru, pembaruan konten eksisting, serta publikasi dokumen resmi pada beberapa kanal utama yaitu:

- a) Info terkini:
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 tentang Data Sasaran Program Kesehatan Tahun 2026-2030.
 - Indonesia Health Profile 2024 (sebagai rujukan data dan indicator kesehatan nasional)
 - Informasi kewaspadaan publik terkait penipuan pendataan tenaga medis dan nonmedis
- b) Pengumuman (*slider*)
 - Pengumuman Finalis Indonesia Healthcare AI Hackathon 2025
 - Kampanye Bersama Lawan Tuberkulosis melalui kegiatan i-ECHO Tuberkulosis RSUP Persahabatan
 - Publikasi Logo dan Filosofi Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025
 - Pengumuman Sambut Hari Kesehatan Nasional ke-61
 - Informasi Sandbox Kesehatan 2025 Resmi Dibuka

- c) Media dan Publikasi
 - Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tahun 2025
 - Buku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional ke-61
 - Publikasi Profil Kesehatan Indonesia 2024 (sebagai referensi nasional)
- d) Profil dan organisasi
 - Pembaruan menu Tugas, Fungsi, dan Kedudukan Kementerian Kesehatan
 - Penambahan dan pembaruan profil Wakil Menteri Kesehatan beserta dokumentasi foto resmi dan profil
- e) Layanan Kementerian Kesehatan

Secara umum, pengelolaan *website* Kemenkes pada semester IV Tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal. Ke depan, pengelolaan konten agar terus ditingkatkan dari aspek konsistensi pembaruan, kualitas penyajian informasi, serta integrasi dengan kanal komunikasi digital lainnya.

11. Kontributor Website Sekretariat Jenderal

Website resmi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Setjen Kemenkes RI) yang dapat diakses melalui tautan <https://setjen.kemkes.go.id/>, merupakan platform informasi digital utama yang berfungsi sebagai pusat koordinasi administrasi dan pendukung teknis di lingkungan Kemenkes. Website ini menyajikan berbagai konten penting mulai dari profil organisasi, struktur jabatan, hingga publikasi berita terkini mengenai kebijakan kesehatan dan agenda kementerian. Selain menjadi saluran transparansi informasi publik, situs ini juga memfasilitasi akses terhadap berbagai layanan birokrasi, regulasi kesehatan, serta pengumuman administratif yang ditujukan baik bagi pegawai internal kementerian maupun masyarakat luas yang memerlukan data resmi mengenai tata kelola sektor kesehatan di Indonesia. Biro Komunikasi dan Informasi Publik berkontribusi dalam mengisi kolom berita di Website Setjen. Sepanjang 2026 telah di posting sebanyak total 26 Konten berupa konten berita, dan berita foto. Berikut adalah rekapitulasi publikasi konten di *website* Sekretariat Jenderal:

Tabel 3. 41 Jumlah Publikasi Konten di Website Sekretariat Jenderal

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	2
2	Februari	1
3	Maret	-

No	Bulan	Jumlah
4	April	-
5	Mei	2
6	Juni	2
7	Juli	3
8	Agustus	3
9	September	3
10	Oktober	2
11	November	4
12	Desember	4

Gambar 3. 74 Publikasi Konten di Website Sekretariat Jenderal



Pengelolaan Perpustakaan

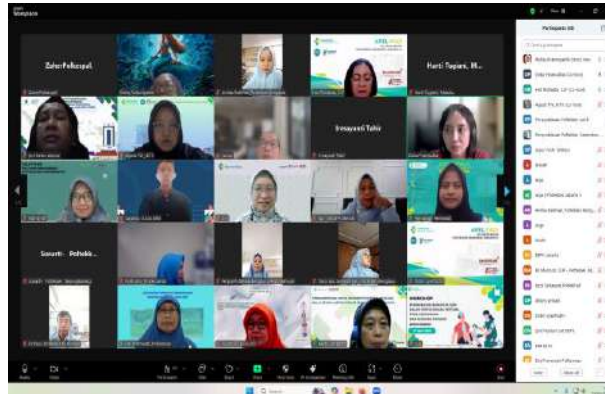
1. Kegiatan *Sharing Session* Pustakawan

Transformasi internal di Kementerian Kesehatan menerapkan perubahan budaya kerja yang lebih baik untuk menciptakan budaya kerja baru Kemenkes yang lebih efektif, efisien, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Salah satunya yaitu Eksekusi Efektif, dengan melakukan *Mandatory Knowledge Sharing*. Untuk itu Perpustakaan Kementerian Kesehatan di bawah Biro Komunikasi dan Informasi Publik mengadakan kegiatan *Sharing Knowledge Session*.

a) Kegiatan Sharing Knowledge “Akreditasi Perpustakaan” pada 21 April 2025

Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi dengan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, Jakarta II, dan Jakarta III. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait komponen Akreditasi Perpustakaan.

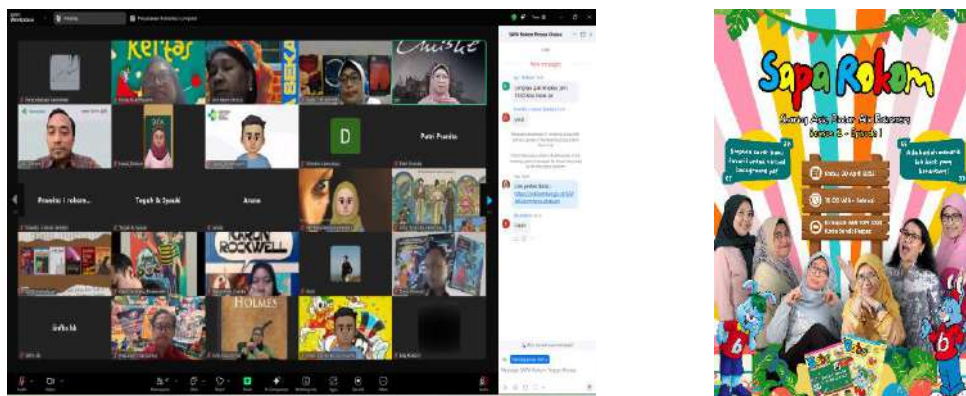
Gambar 3. 75 Kegiatan Sharing Knowledge “Akreditasi Perpustakaan”



b) Kegiatan SAPA Rokom Tema “Perpustakaan” pada 30 April 2025

Merupakan kegiatan dengan peserta pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik yang berisi mengenalkan tentang perpustakaan di lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Para pegawai mengetahui dasar hukum penyelenggaraan perpustakaan dan produk-produk hukum yang sudah dibuat sebagai acuan pembinaan perpustakaan UPT oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Pada acara ini juga, pegawai diajak untuk aktif menggunakan koleksi perpustakaan baik tercetak maupun digital melalui elektronik *library* Kemenkes (E-Likes).

Gambar 3. 76 Kegiatan SAPA Rokom Tema “Perpustakaan”



2. Pertemuan Nasional Perpustakaan Kementerian Kesehatan

Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan direncanakan sebagai sarana komunikasi antara bidang kehumasan dan kepustakawanan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan, meningkatkan kompetensi serta profesionalisme petugas pelayanan informasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan oleh institusi induknya, yaitu Kementerian Kesehatan. Selain itu, pertemuan ini juga diharapkan menjadi wadah koordinasi untuk membahas berbagai isu, tantangan, dan pengembangan kepustakawanan serta kehumasan secara strategis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Di penghujung tahun 2025, dengan disetujuinya penambahan anggaran, kegiatan Pertemuan Nasional Perpustakaan dapat dilaksanakan secara terbatas pada tanggal 3 Desember 2025 dengan tema “Membangun Jaringan Perpustakaan Kesehatan yang Terkoneksi dan Kolaboratif”. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan secara luring sebanyak 50 orang dan daring. Acara dibuka oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik dilanjutkan dengan penyampaian sambutan kunci (*keynote speech*) oleh Chaerul Umam SS, M LIM, Ph.D sebagai perwakilan dari Perpustakaan Nasional sekaligus *Presiden Asean Public Libraries Information Network*. Narasumber pada kegiatan ini adalah Ketua Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI) Dr. Farli Elnumery SS, SH, M.Hum dan Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Mariyah, S.Sos., M.Hum. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Perlunya komitmen bersama untuk membangun jaringan perpustakaan kesehatan yang terkoneksi dan kolaboratif. Jaringan perpustakaan kesehatan ini merupakan integrasi sistem informasi, pengetahuan, kapasitas dan sumber daya antar perpustakaan yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi jaringan harus mencakup integrasi inovasi antar perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan sehingga keberhasilan di suatu perpustakaan dapat direplikasikan secara cepat dan efisien.
- b) Perlunya optimalisasi Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK) yang menjadi pintu utama temu balik informasi koleksi kesehatan di seluruh Perpustakaan Kementerian Kesehatan. KINK dibangun menggunakan standar interoperabilitas, untuk itu perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu didorong dalam integrasi sistem otomasi dengan menggunakan protokol terbuka (OAI-PMH) agar data mudah terhubung ke KINK dan terjadi mekanisme berbagi koleksi yang efisien. Dengan memanfaatkan standar otomasi dan interoperabilitas nasional, KINK akan memudahkan pemustaka dalam memperoleh informasi dari berbagai perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

- c) *Grand Design* Perpustakaan Kementerian Kesehatan tahun 2025 - 2029 dapat menjadi pedoman strategis bagi perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk merencanakan program pengembangan jangka pendek, menengah dan panjang. Perlunya komitmen bersama dalam pelaksanaan *Grand Design* yang menyatukan seluruh perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pengembangan layanan, transformasi digital, kebijakan penguatan SDM pustakawan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi kesehatan
- d) Perlunya penguatan peran pustakawan perpustakaan khusus di era digitalisasi sebagai penjaga kualitas informasi di institusi strategis seperti rumah sakit, lembaga penelitian dan UPT teknis kesehatan. Pustakawan perpustakaan khusus perlu memiliki kompetensi analisis informasi ilmiah, literasi informasi dan data, manajemen pengetahuan serta pemahaman terhadap standar informasi kesehatan. Pustakawan perpustakaan khusus agar berperan sebagai mitra strategis bagi tenaga kesehatan dan peneliti dalam menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
- e) Perlunya penguatan peran pustakawan perpustakaan perguruan tinggi dalam mendukung pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan di era digital. Pustakawan perguruan tinggi perlu memiliki kompetensi mengelola repositori institusi secara profesional, mendampingi proses publikasi ilmiah, mengelola data penelitian serta memanfaatkan teknologi pembelajaran digital untuk memperkaya kegiatan akademik. Pustakawan perpustakaan perguruan tinggi agar berperan sebagai fasilitator akademik, pendamping riset dan mitra bagi dosen dan mahasiswa dalam pengembangan sumber belajar digital yang turut berkontribusi dalam proses pendidikan dan penelitian.

3. Pemilihan Perpustakaan Berinovasi Di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Perpustakaan memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dalam sektor kesehatan, termasuk di dalamnya adalah transformasi sistem kesehatan yang tengah berlangsung. Dalam rangka mendukung transformasi sistem kesehatan, Perpustakaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berperan untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh masyarakat, tenaga kesehatan, serta instansi terkait lainnya. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Perpustakaan Kemenkes adalah menyelenggarakan Pemilihan Perpustakaan Berinovasi 2025 yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi, kualitas layanan, serta inovasi dalam mengelola dan menyebarkan informasi kesehatan.

Pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penjurian untuk menilai inovasi yang telah diterapkan oleh perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Penilaian

tersebut menjadi upaya awal untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam mendukung budaya kerja baru berbasis pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*). Dengan mengusung tema “Dampak Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan pada Layanan Perpustakaan,” kegiatan ini mendorong perpustakaan berinovasi demi mendukung transformasi sistem kesehatan.

Kegiatan Pemilihan Perpustakaan Berinovasi sempat terkendala karena adanya pemblokiran anggaran. Kondisi ini menghambat kelanjutan dari program yang seharusnya menjadi forum apresiasi dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan, serta memperlambat upaya institusional dalam mengintegrasikan inovasi pustaka ke dalam sistem transformasi kesehatan nasional. Pada perencanaan, kegiatan ini dilakukan secara tatap muka, dimana setiap perwakilan UPT dapat mengetahui inovasi UPT lainnya untuk pengembangan perpustakaan di lingkungan masing-masing. Oleh karena keterbatasan ini, Perpustakaan Kementerian Kesehatan memutuskan untuk melaksanakan Pemilihan Perpustakaan Berinovasi 2025 secara daring menggunakan media zoom. Kegiatan ini juga menjadi salah satu rangkaian dalam memeriahkan Hari Kesehatan Nasional tahun 2025.

Pemilihan Perpustakaan Berinovasi Tahun 2025 dengan tema “Dampak Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan pada Layanan Perpustakaan” diikuti oleh 33 Peserta berasal dari UPT Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan penjurian dilakukan pada tanggal 11 November 2025. Juri kegiatan ini berasal dari Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh unit kerja P2KA, Kepala Pusat Pembinaan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI, dan Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia.

Penjurian Final dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025 dari keseluruhan peserta diperoleh pemenang yakni:

- a) Juara 1 Poltekkes Kemenkes Gorontalo (Judul Inovasi : “Serli AI”, chatbot cerdas di website perpustakaan Poltekkes Kemenkes Gorontalo)
- b) Juara 2 Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Semarang (Judul Inovasi : Literatorium Artificial Intelligence: Transformasi Kelas Literasi Perpustakaan Untuk Mendukung Tridharma Perguruan Tinggi)
- c) Juara 3 Perpustakaan RS Soeradji Tirtonegoro (Judul Inovasi : Inovasi Strategi Literasi Digital Berbasis AI (Artificial Intelligence) melalui Konten ‘Book of The Week’, ‘SoeradjiPedia’, dan ‘SoeradjiLibs Newcomer’ di akun Instagram @perpus.rssoeradji)
- d) Juara Harapan 1 Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Riau (Judul Inovasi : AILib Polkesri (layanan rekomendasi buku berbasis kecerdasan buatan untuk menghasilkan saran bacaan yang relevan dan cepat bagi setiap pemustaka)

- e) Juara Harapan 2 Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya (Judul Inovasi : ARNAKA (inovasi AI dari Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya untuk mentransformasi bimbingan tugas akhir. ARNAKA mengatasi masalah mahasiswa yang terhambat oleh teknis penulisan (format, sitasi), bimbingan metode penelitian dan sitasi dengan menyediakan "SUPER PROMPT" untuk platform AI)
- f) Juara Harapan 3 Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Jakarta III (Judul Inovasi : “Pustaka Sehat, Anak Cerdas” (bertujuan mengajak anak usia dini belajar PHBS dengan cara baru, belajar sehat sambil bermain menggunakan media literasi digital.

Hasil ini diperoleh setelah melakukan penilaian secara bersama oleh dewan juri berdasarkan presentasi peserta dan juga makalah serta video dokumentasi inovasi yang dilakukan oleh setiap perpustakaan.

Gambar 3. 77 Pemilihan Perpustakaan Berinovasi Di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025



4. Bimbingan Teknis Perpustakaan

Akreditasi perpustakaan merupakan rangkaian kegiatan proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi perpustakaan yang menyatakan bahwa lembaga perpustakaan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan. Adapun instrumen akreditasi tertuang dalam keputusan kepala perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 tentang instrumen akreditasi perpustakaan perguruan tinggi. Akreditasi bermanfaat untuk mengetahui posisi kinerja pengelolaan perpustakaan, citra perpustakaan, dan citra Lembaga.

Pada tahun 2025, Kementerian Kesehatan berhasil mencatat capaian positif dalam upaya peningkatan mutu dan tata kelola perpustakaan melalui kegiatan bimbingan teknis akreditasi perpustakaan. Hasil dari proses pembinaan dan pendampingan tersebut menunjukkan bahwa tiga perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah berhasil memperoleh status akreditasi dengan predikat A, yang mencerminkan kualitas pengelolaan perpustakaan yang sangat baik serta pemenuhan standar nasional perpustakaan. Perpustakaan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar melaksanakan proses akreditasi pada tanggal 19 November

2025. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh dua asesor, yaitu Made Ayu Wirayati dan Syarifah, perpustakaan ini berhasil meraih akreditasi A dengan nilai 91,24. Capaian tersebut menunjukkan kesiapan kelembagaan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kualitas layanan perpustakaan yang telah berjalan secara optimal dalam mendukung kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Selanjutnya, Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi melaksanakan akreditasi pada tanggal 26 November 2025. Proses asesmen dilakukan oleh dua asesor, yaitu Upriyadi dan Eka Mefrina. Hasil penilaian menunjukkan perolehan nilai 92,31 dengan predikat A, yang menegaskan komitmen perpustakaan dalam pengelolaan koleksi, pelayanan kepada pemustaka, serta dukungan terhadap kegiatan tridarma perguruan tinggi. Adapun Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya melaksanakan akreditasi pada tanggal 18 Desember 2025. Proses asesmen dilakukan oleh satu asesor, yaitu Riko Bintari Permatasari, dengan hasil akreditasi A dan nilai 91,4. Capaian ini mencerminkan kesesuaian pengelolaan perpustakaan dengan standar nasional yang ditetapkan.

Secara umum, para asesor memberikan rekomendasi yang relatif seragam bagi ketiga perpustakaan. Rekomendasi utama adalah perlunya penambahan jumlah pustakawan serta peningkatan kompetensi pustakawan secara berkelanjutan. Selain itu, disarankan agar setiap unit perpustakaan memiliki anggaran tetap untuk pengembangan koleksi, baik koleksi tercetak maupun digital. Khusus bagi Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya dan Jambi, para asesor merekomendasikan agar kepala unit perpustakaan mengikuti diklat manajemen perpustakaan guna memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata kelola perpustakaan ke depan.

Gambar 3. 78 Bimbingan Teknis Persiapan Akreditasi dan Pengelolaan Perpustakaan



5. Workshop Teknis Literasi Informasi Perpustakaan Kemenkes

Kementerian Kesehatan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama menyelenggarakan kegiatan berupa Workshop Perpustakaan Khusus *Basic of Information Literacy*. Kegiatan ini merupakan sinergi antara dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta sebagai pembina perpustakaan di daerah Jakarta yang

bekerja sama dengan Perpustakaan Kemenkes. Perpustakaan Kemenkes memiliki perpustakaan di bawah UPT milik Kementerian Kesehatan di wilayah Jakarta sehingga termasuk wilayah binaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 19 Juni 2025 bertempat di Aula Lantai 8 Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Acara diikuti 40 peserta yang merupakan pustakawan Kemenkes di Jakarta, berasal dari rumah sakit vertikal, politeknik kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan kantor pusat. Para peserta dibekali pengetahuan mengenai pentingnya kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara tepat, khususnya dalam mendukung layanan informasi di Perpustakaan Kemenkes RI. Narasumber menguji kemampuan peserta melalui *pre-test*. Salah satu materi utama yang menjadi sorotan dalam *pre-test* tersebut adalah teknik pencarian informasi efektif menggunakan *boolean logic* dan sintaks pencarian. Selain daripada itu, diperkenalkan juga MeSH (*Medical Subject Headings*) yang menjadi dasar penting yang harus dikuasai pustakawan dalam mendukung layanan informasi, terutama di bidang Kesehatan.

Gambar 3. 79 Workshop Perpustakaan Khusus Basic of Information Literacy (19 Juni 2025)



6. Sertifikasi Pustakawan Kemenkes

Sertifikasi Pustakawan merupakan proses standarisasi kompetensi bagi pustakawan yang dilakukan sesuai amanah UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Oleh karena itu Sertifikasi Pustakawan dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi pustakawan dan kualitas layanan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik berdasarkan Permenkes No. 58 tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan pasal 4 dinyatakan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Salah satu bentuk pembinaannya, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik berencana mengadakan sertifikasi kolektif pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sertifikasi pustakawan merupakan salah satu unsur pendukung akreditasi perpustakaan dan upaya peningkatan kompetensi pustakawan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan layanan perpustakaan. Sehubungan dengan hal tersebut peserta yang mengikuti sertifikasi pustakawan adalah pustakawan yang perpustakaanannya akan melaksanakan akreditasi dan pustakawan yang akan meningkatkan kompetensinya.

Tahun 2025 pelaksanaan sertifikasi pustakawan dilaksanakan pada tanggal 21 - 22 Agustus 2025 di BBPK (Balai Besar Pelatihan Kesehatan) Jakarta Kampus Hang Jebat yang mengambil klaster:

- a) Pelaksanaan Layanan Dasar Perpustakaan;
- b) Pelaksanaan Promosi Layanan Perpustakaan;
- c) Pelaksanaan Pengatalogan Deskriptif;
- d) Pengembangan Kemampuan Literasi Informasi;
- e) Pelaksanaan Pengembangan Koleksi Perpustakaan;
- f) Pelaksanaan Pengatalogan Subjek.

Adapun pustakawan dan pengelola perpustakaan yang mengikuti sertifikasi ini berasal dari berbagai unit sebagai berikut:

- a) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes
- b) Poltekkes Kemenkes Jambi
- c) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- d) RSAB Harapan Kita
- e) Poltekkes Kemenkes Semarang
- f) Rumah Sakit Otak DR. Drs. M. Hatta Bukit Tinggi
- g) Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung
- h) Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta
- i) RSUP Dr. Kariadi Semarang
- j) Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga
- k) Poltekkes Kemenkes Jakarta II
- l) Poltekkes Kemenkes Surakarta
- m) Poltekkes Kemenkes Surabaya
- n) Poltekkes Kemenkes Malang
- o) Poltekkes Kemenkes Denpasar
- p) Poltekkes Kemenkes Pontianak
- q) Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
- r) Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
- s) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

7. Bedah Buku Terbitan Kementerian Kesehatan

Bedah buku menjadi wadah diskusi interaktif untuk memahami lebih dalam suatu buku, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan, penelitian, atau inovasi di bidang kesehatan. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami dan menerapkan ilmu yang diperoleh dari buku yang dibahas. Kegiatan bedah buku, merupakan kegiatan perpustakaan Kementerian Kesehatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025, yang mengangkat 4 (empat) buku terbitan Kementerian Kesehatan yang terbagi dalam 4 (empat) triwulan. Kegiatan Bedah buku didaftarkan dalam kegiatan LMS Plataran Sehat, sebagai pembelajaran bernilai 2 jam Pelajaran pada tiap kegiatan.

Pada triwulan 1, telah dilaksanakan bedah buku Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan, merupakan pedoman yang mencakup perencanaan strategi komunikasi risiko untuk penanggulangan Kesehatan dengan memaparkan teori dan manajemen komunikasi risiko, serta perencanaan dan pendekatan strategi komunikasi publik melalui kehumasan dan pelibatan masyarakat. Buku pedoman ini bertujuan sebagai acuan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, lintas sektor, dan lintas program dalam merencanakan serta melaksanakan komunikasi risiko untuk penanggulangan krisis Kesehatan. Pedoman ini dikembangkan untuk pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, serta para pelaksana komunikasi risiko yang bertanggung jawab atas komunikasi pra krisis, tanggap darurat, serta pasca krisis Kesehatan di tingkat nasional dan daerah. Bedah Buku Pedoman ini akan mengundang narasumber yang berasal dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan praktisi, lintas sektor (BNPB, WHO, PMI), pemerhati, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas pada buku.

Gambar 3. 80 Pedoman Komunikasi Risiko



Buku dengan judul “Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan” yang dikeluarkan Biro Komunikasi dan Pelayanan publik dapat diakses di

<https://repository.kemkes.go.id/book/61>. Acara Bedah Buku dilaksanakan Kamis, 20 Maret 2025, secara daring dengan narasumber Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Frieda Subrata (Praktisi Komunikasi Risiko), dan dr. Corona Rintawan, SpEM (Ketua Bidang EMT MDMC PP Muhammadiyah). Acara ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal. Acara Bedah buku didaftarkan di LMS Kemenkes RI. Para peserta dari Kementerian Kesehatan mendapatkan sertifikat 2 JPL. Tercatat 436 peserta dari Kemenkes dan Non Kemenkes yang bergabung dalam acara ini.

Pada triwulan 2, akan melaksanakan bedah buku yang berjudul “Buku Saku bagi Orang Tua dan Pendamping Penyandang Disabilitas tentang Kesehatan Seksual dan Reproduksi”, yang diterbitkan tahun 2024 oleh Ditjen kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Ditjen Kesehatan Masyarakat. Buku ini merupakan salah satu sarana bagi orang tua dan pendamping untuk meningkatkan pengetahuan, cara dan trik yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai media KIE bagi tenaga kesehatan saat memberikan pelayanan atau kegiatan lain yang melibatkan orang tua/pendamping penyandang disabilitas.

Gambar 3. 81 Penerbitan “Buku Saku bagi Orang Tua dan Pendamping Penyandang Disabilitas tentang Kesehatan Seksual dan Reproduksi”



Buku Saku bagi Orang Tua dan Pendamping Penyandang Disabilitas tentang Kesehatan Seksual dan Reproduksi telah didesiminasikan dalam repository Kementerian Kesehatan sebagaimana terlampir dalam <https://repository.kemkes.go.id/book/908>. Pelaksanaan bedah buku merupakan kerja sama antara Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan, dilaksanakan pada Selasa, 8 Juli 2025 secara daring dengan narasumber Ketua Sentra Advokasi Perumpungan Difabel dan Anak (SAPDA); Ketua Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas (PORTADIN); dan Ketua Persatuan Orang Tua Anak dan Down Syndrome (POTADS). Acara ini dibuka oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik dan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan. Adapun kegiatan bedah buku Pada triwulan III dan IV tidak dilaksanakan, namun digantikan dengan kegiatan bibliobattle.

8. Benchmarking Perpustakaan Institusi Oleh Kementerian ESDM

Benchmarking perpustakaan ESDM dilakukan secara daring pada tanggal 21 Mei 2025. *Benchmarking* sebagai suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk membandingkan kinerja, layanan, proses, dan praktik terbaiknya dengan perpustakaan Kemenkes yang dianggap unggul atau dengan standar tertentu, dengan tujuan untuk pengelolaan layanan perpustakaan di lingkungan Kemenkes khususnya layanan *e-library* dan pengelolaan akun ISBN terpusat. *Benchmarking* dilakukan secara daring dengan dibuka oleh Dian Lorinsa, Koordinator Komunikasi, dan Layanan Informasi Publik, Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM memiliki 14 unit perpustakaan, 8 diantaranya telah memiliki pustakawan. Hal utama yang didiskusikan adalah pembangunan *e-library*, pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan akun ISBN, serta membuat aturan internal seperti aturan yang telah dimiliki Kemenkes, yakni Permenkes 58 Tahun 2015 Pasal 4, Permenkes 38 Tahun 2015, serta Permenkes 38 Tahun 2015 Pasal 4 ayat 5.

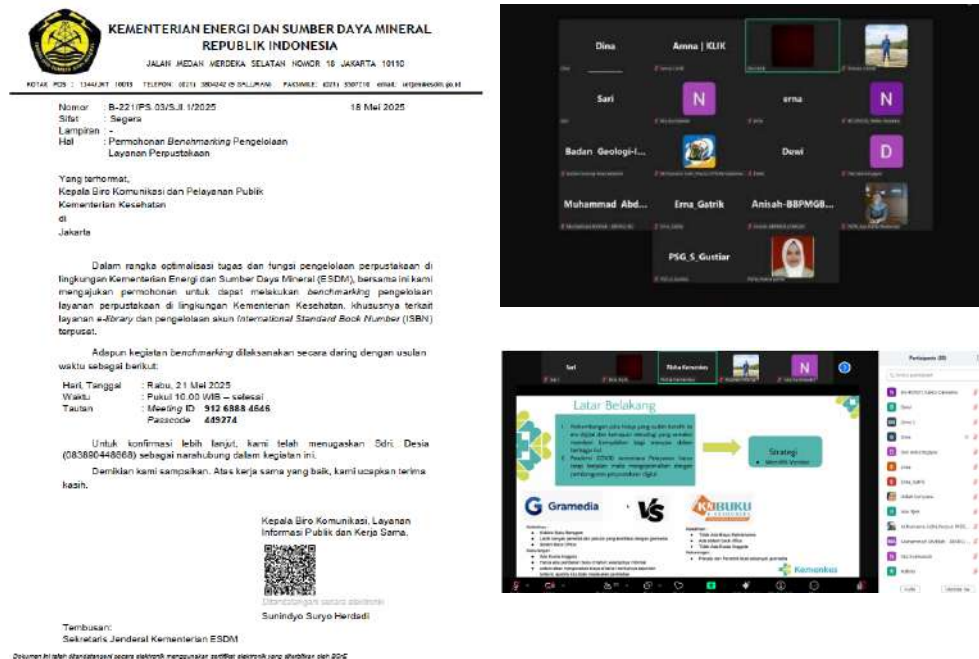
Aplikasi ISBN pada Kementerian Kesehatan, *launching* sejak Agustus 2024. Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki kewenangan pengurusan ISBN melalui Surat Edaran Sekjen tentang *Single Account* ISBN di Kemenkes. *Single Account* dikecualikan untuk Politeknik Kemenkes sebagai satuan kerja yang masuk dalam kategori Perguruan tinggi.

Politeknik Kemenkes RI diberi akun sendiri menimbang adanya kewenangan atau kebijakan rektor untuk mengelola lingkup organisasinya dan jenis terbitan yang berbeda sebagai luaran atau produk kampus. Hal itu juga berdasarkan rekomendasi Perpustakaan Nasional, bahwa diperbolehkan memiliki akun tersendiri sehingga proses pengajuan ISBN menggunakan akun masing-masing.

Dalam hal pengaturan ISBN, Kemenkes telah memiliki sistem sendiri yang dapat diakses pada laman isbn.kemenkes.go.id, didalamnya dibuat sesuai dengan kebutuhan Kemenkes dalam menyimpan informasi dan mengelola data dalam pengajuan ISBN ke Perpustakaan nasional.

Mengenai topik *e-library*, disampaikan bahwa Kemenkes memiliki *e-library* dan *e-repository* yang dikelola oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik. *e-library* berisi buku-buku umum terkait lingkup Kesehatan yang dapat diakses umum. Sedangkan untuk *e-repository* berisi seluruh terbitan dari Kementerian Kesehatan yang dikelola agar dapat disimpan dan dipergunakan sewaktu-waktu sehingga dapat mencegah hilangnya terbitan Kementerian Kesehatan.

Gambar 3. 82 Benchmarking Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan



Electronic Library Kesehatan (E-Likes) merupakan *e-library* milik Kemenkes, *e-library* tersebut menggunakan pihak ketiga *E-Likes* dapat diunduh pada aplikasi *Playstore* dan *Windows*. *E-repository* Kemenkes dibangun dengan menggunakan *google drive* sebagai *database* dan untuk mengaksesnya melalui *repository.kemenkes.go.id*. Saat ini *repository* hanya dapat diakses secara lokal dikarenakan terdapat celah keamanan saat dibuka untuk umum. Untuk saat ini *e-repository* difokuskan untuk mengumpulkan seluruh terbitan Kementerian Kesehatan baik dari pusat maupun dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan.

9. Benchmarking Kementerian Agama

Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagai unit layanan publik mempunyai tugas dan fungsi memberikan informasi mengenai pengelolaan perpustakaan kepada instansi atau lembaga. Perpustakaan Kementerian Agama berkunjung ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan tanggal 3 Juni 2025 untuk mengenal dan mempelajari pengelolaan perpustakaan yang akan diadopsi di instansinya, diantaranya pelaksanaan sertifikasi pustakawan secara mandiri, pembuatan aplikasi ISBN, pelaksanaan akreditasi pada perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Repository Kemenkes. Perpustakaan Kementerian Agama berada di bawah Dirjen Pendidikan Islam. Program yang telah dilakukan Perpus Kemenag antara lain *sharing session* di UPT yang punya pustakawan. Ada 20 UPT di BMPSDM, termasuk universitas.

Kegiatan perpustakaan di Kementerian Agama diantaranya melakukan *bibliobattle* 2 kali dalam 1 tahun dengan 5 kategori, bedah buku, pameran, *sharing session*, dan pembagian buku gratis. Perpustakaan Kemenag juga memiliki program nonton bareng (nobar) dan diskusi di teater mini dengan *snack* dan souvenir pada hari kunjung perpustakaan.

Gambar 3. 83 Benchmarking Kementerian Agama RI ke Perpustakaan Kementerian Kesehatan



10. Pengelolaan Perpustakaan Kementerian Kesehatan

a. Kunjungan Langsung Pemustaka Perpustakaan

Di akhir tahun 2021 Perpustakaan Kementerian Kesehatan telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai perpustakaan khusus dengan standar akreditasi A. Seiring dengan ditetapkannya Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagai Perpustakaan khusus dengan standar A, maka tahun 2022 Perpustakaan Kementerian Kesehatan telah melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perpustakaan Kementerian Kesehatan mulai membuka jam operasional pada pukul 07.00 s/d 16.00 (di hari kerja Senin s/d Kamis), sedangkan 07.00 s/d 16.30 (di hari Jumat), sedangkan hari Sabtu dan Minggu serta libur nasional layanan perpustakaan ditutup untuk pemustaka.

Perpustakaan Kementerian Kesehatan juga meningkatkan kualitas layanan dengan menjadikan perpustakaan digital. Berbagai aplikasi dikembangkan untuk memberikan layanan kepada pemustaka diantaranya aplikasi inlislite, electronic library Kesehatan (E-Likes), repository koleksi perpustakaan dan revitalisasi Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK).

Layanan perpustakaan Kementerian Kesehatan meliputi layanan simpan pinjam koleksi perpustakaan baik melalui kunjungan langsung maupun perpustakaan digital (E-Likes).

Tabel 3. 42 Laporan Pengunjung Offline Perpustakaan Kemenkes Bulan Januari s.d Desember 2025

Bulan	PNS Kemenkes Aktif	PNS Kemenkes Purnabakti	Masyarakat Umum	Pelajar/ Mahasiswa	Lain -lain	Jumlah
Januari	240	14	16	15	1	276
Februari	179	0	9	14	1	203
Maret	223	0	14	3	5	245
April	97	0	8	7	25	137
Mei	92	1	1	2	16	112
Juni	107	2	6	15	11	141
Juli	86	0	8	16	17	127
Agustus	99	2	12	11	10	134
September	114	1	18	13	13	159
Oktober	117	0	20	6	4	147
November	87	1	15	7	16	126
Desember	113	1	19	1	22	156
JUMLAH						1.963

Gambar 3. 84 Grafik Pengunjung Offline Perpustakaan Kemenkes



**Tabel 3. 43 Laporan Pengunjung E-Likes Perpustakaan Kemenkes
Bulan Januari s.d Desember 2025**

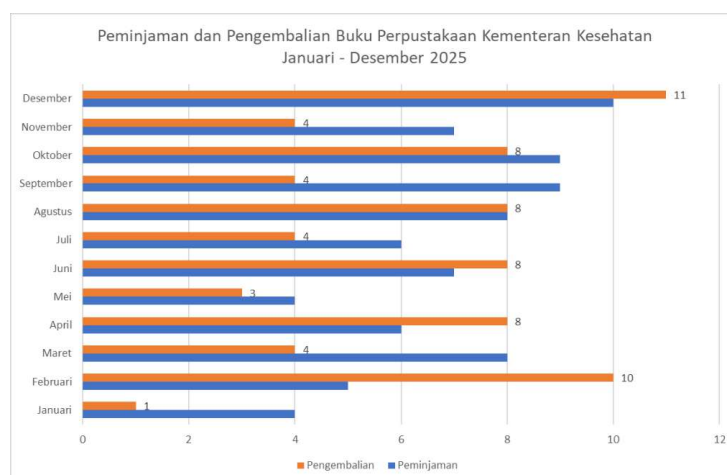
Bulan	Pendaftaran E-Likes	Pengunjung E-Likes	Pembaca E-Likes	Peminjam E-Likes	Jumlah
Januari	185	1.568	435	0	2.188
Februari	140	2.250	507	260	3.157
Maret	163	2.430	449	193	3.235
April	173	2.127	300	191	2.791
Mei	141	2.291	315	167	2.914
Juni	137	1.292	186	79	1.694
Juli	360	1.851	257	125	2.593
Agustus	434	2.069	291	125	2.919
September	620	2.933	354	153	4.060

Bulan	Pendaftaran E-Likes	Pengunjung E-Likes	Pembaca E-Likes	Peminjam E-Likes	Jumlah
Oktober	648	2.878	311	138	3.975
November	362	2.123	289	111	2.885
Desember	230	1.732	240	93	2.295
JUMLAH					35.066

Gambar 3. 85 Grafik Pengunjung E-Likes Perpustakaan Kemenkes



Gambar 3. 86 Grafik Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan Kemenkes



Gambar 3. 87 Dokumentasi Pengunjung Perpustakaan



Selain itu, Perpustakaan Kementerian Kesehatan mengadakan kegiatan untuk anak-anak pegawai Kemenkes yang dititipkan di serama tempat pengasuhan anak (TPA) pegawai Kementerian Kesehatan yang diberi nama pustakawan bercerita. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan perpustakaan kepada anak-anak sejak usia dini. Diharapkan anak-anak kelak akan tumbuh menjadi generasi yang mencintai perpustakaan dan gemar membaca. Acara Pustakawan Bercerita dilaksanakan rutin setiap bulan yang lokasi pelaksanaannya bergantian yaitu di Serama dan Perpustakaan Kemenkes. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah *story telling*, menyanyi dan lain sebagainya.

Gambar 3. 88 Kegiatan Pustakawan Bercerita



b. Permohonan Katalog dan Terbitan (KDT) dan *International Standard Book Number (ISBN)*

Biro Komunikasi dan Informasi Publik merupakan Penanggung Jawab dalam Pengajuan Nomor ISBN ke Perpustakaan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 38 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Kementerian Kesehatan. Perpustakaan Kementerian Kesehatan merupakan perpanjangan tangan Perpustakaan Nasional dalam menghimpun koleksi nasional.

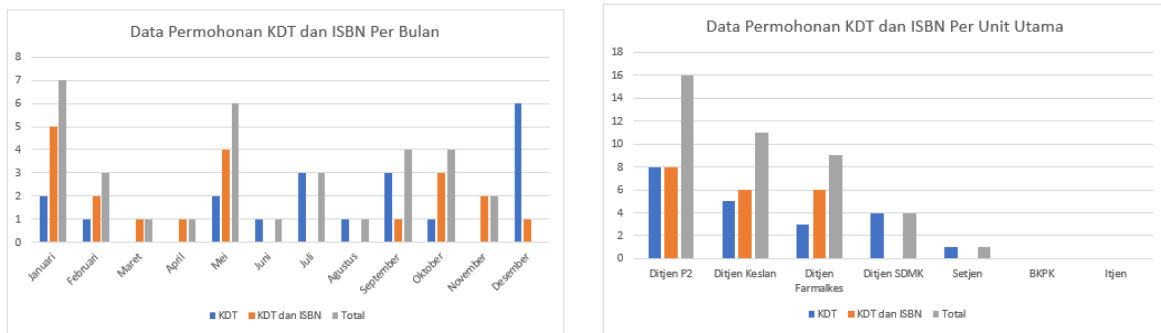
Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (International Standard Book Number) merupakan dasar dalam Permohonan KDT dan ISBN.

Pada Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (International Standard Book Number) juga mengatur persyaratan buku yang boleh mengajukan ISBN antara lain bukan laporan atau buku untuk lingkup kecil suatu institusi harus buku yang sasarannya masyarakat luas. Beberapa buku Kemenkes ada yang direkomendasikan cetak tanpa ISBN dikarenakan hanya untuk lingkup Kemenkes saja dan termasuk dalam jenis kategori terbitan yang terbit tanpa ISBN misalnya Modul. Buku-buku yang direkomendasikan cetak tanpa ISBN akan dibuatkan KDT (Katalog Dalam Terbitan).

Kementerian Kesehatan mengatur pengelolaan ISBN di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan menggunakan satu akun melalui Perpustakaan Kementerian Kesehatan di bawah koordinasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor HK.02.02/A/26954/2023 tentang Single Account Pengajuan International Standard Book Number (ISBN) untuk Penerbitan Buku di Lingkungan Kementerian Kesehatan. SE ini dikecualikan bagi Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mendapat kewenangan untuk memiliki akun tersendiri dalam pengajuan ISBN sendiri sebagai Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Perpustakaan Nasional.

Semua terbitan Kementerian Kesehatan wajib mencantumkan nomor KDT sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang penerbitan dan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan terbitnya Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*) menyebabkan tidak semua terbitan Kementerian Kesehatan memperoleh rekomendasi nomor ISBN oleh Perpustakaan Nasional, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya kriteria buku dalam mendapatkan nomor ISBN. Salah satu syarat sebuah buku mendapat nomor ISBN yaitu sasaran buku untuk masyarakat luas (bukan untuk lingkungan internal Lembaga), bukan modul, bukan merupakan laporan, hasil penelitian hasil kajian, memiliki jumlah halaman lebih dari 49 halaman. Pada Tahun 2025, yang merupakan jumlah keseluruhan pengajuan KDT dan ISBN sebanyak 40 judul.

Gambar 3. 89 Diagram Permohonan KDT dan ISBN Tahun 2025



11. Pathfinder, Infografis dan Literasi Informasi Perpustakaan Kemenkes

a. Pathfinder

Merupakan panduan yang disusun oleh pustakawan, yang berisikan daftar sumber informasi dalam berbagai bentuk, seperti buku, website, jurnal, jurnal online, bahkan video berdasarkan topik tertentu untuk dapat membantu pemustaka mendapatkan sumber informasi yang tepat mengenai topik tertentu. Pada Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI, pathfinder dibuat dengan berisikan informasi umum tentang topik, buku, artikel jurnal, video dan artikel berita. *Pathfinder* yang dimiliki oleh Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dibuat dalam format pdf dan dapat diakses pada website Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI (<https://perpustakaan.kemkes.go.id/>) dalam tampilan *Flipbook*. *Pathfinder* milik Perpustakaan Kementerian Kesehatan mengambil topik mengenai hari-hari besar kesehatan, informasi mengenai penyakit & hal kesehatan, serta informasi umum

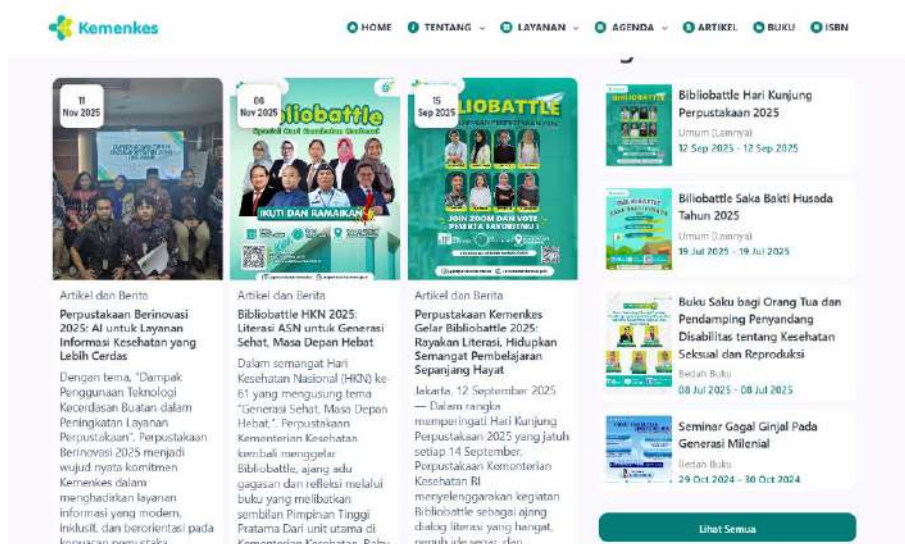
Tabel 3. 44 Rekapitulasi Topik Pathfinder Tahun 2025

No	Topik	Rilis
1	Human Metapneumovirus (HMPV)	28 April 2025
2	Kebersihan Kuku	28 April 2025
3	Khasiat Daun Salam	26 Juni 2025
4	Rabies	6 Juni 2025
5	Hantavirus	10 Juli 2025
6	Leptospirosis	4 September 2025
7	Demam Chikungunya	4 September 2025
8	Donor Asi	8 Oktober 2025
9	Hari Dokter Nasional	24 Oktober 2025
10	World AIDS Day	1 Desember 2025
11	Hari Disabilitas Internasional	3 Desember 2025

b. Promosi Perpustakaan

Promosi perpustakaan dilakukan melalui berbagai media, antara lain website dan media sosial Instagram. Konten promosi disajikan dalam bentuk rilis berita, infografis, foto, maupun video. Website perpustakaan yang dikelola oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat diakses melalui <https://perpustakaan.kemkes.go.id/>. Sepanjang Tahun 2025 telah merilis sebanyak 12 berita dan 126 konten digital terkait kegiatan perpustakaan. Rilis berita tersebut memuat informasi mengenai kegiatan, layanan, serta pengembangan perpustakaan, yang dipublikasikan sebagai upaya peningkatan keterbukaan informasi dan perluasan diseminasi informasi kepada publik, serta untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Gambar 3. 90 Dokumentasi Rilis berita Kegiatan Perpustakaan



Promosi perpustakaan lainnya, dilakukan dengan mengunggah konten di media sosial instagram dalam bentuk infografis dan video. Kegiatan ini merupakan sebuah representasi visual dari sebuah informasi atau data yang dibuat menjadi elemen visual (infografis). Infografis merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan data atau infografis yang dipadukan dengan berbagai macam objek visual. Fungsi utama dari infografis yaitu membuat audiens tertarik sehingga mereka mau menyimak informasi atau sebuah yang disajikan. Pada Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dibuat beberapa infografis dan diunggah melalui laman instagram milik Perpustakaan Kementerian kesehatan RI. Infografis yang diunggah biasanya membahas mengenai hari-hari besar kesehatan serta informasi-informasi kesehatan. Bahan infografis biasa didapatkan melalui koleksi Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dan sumber informasi digital seperti artikel jurnal dan artikel website.

c. Literasi Informasi

Literasi informasi merupakan kemampuan seorang individu untuk mengenali kapan informasi tersebut dibutuhkan serta untuk menemukan, mengevaluasi, efektif menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai format. Pustakawan sebagai *The Guardian of Information* harus mengetahui informasi apa yang dibutuhkan dan dapat ditawarkan kepada pustakawan.

Dalam konteks Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI, literasi informasi merujuk pada merupakan sebuah produk yang dibuat untuk memudahkan pemustaka mendapatkan informasi secara cepat dan sebagai sebuah referensi. Literasi Informasi di Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI dibuat dalam bentuk sebuah paket informasi yang berisikan sebuah jawaban umum dari sebuah pembahasan topik beserta informasi mengenai topik tersebut. Adapun tahapan dalam pembuatan literasi informasi yaitu: identifikasi kebutuhan informasi, penelusuran informasi, evaluasi informasi, analisis sintesis dan diseminasi informasi..

d. Bimbingan Pemustaka

Bimbingan pemustaka dilakukan Perpustakaan Kementerian Kesehatan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan audiens dalam mengakses dan memanfaatkan informasi kesehatan yang bertujuan untuk peningkatan literasi informasi. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman pencarian dan penggunaan sumber informasi yang relevan dalam mendukung tugas di lapangan, dan penguatan kapasitas mengenai pengetahuan terkait koleksi perpustakaan terkait kesehatan masyarakat yang dapat diakses melalui laman perpustakaan yaitu repository.kemkes.go.id dan <https://kubuku.id/download/electronic-library-kemenkes> sebagai aplikasi android.

Bimbingan pemustaka CPNS Kementerian Kesehatan merupakan rangkaian kegiatan *Onboarding Program* CPNS Kementerian Kesehatan. Kunjungan CPNS Kementerian Kesehatan ke perpustakaan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025. Bimbingan pemustaka CPNS Kemenkes ini bertujuan untuk memperkenalkan perpustakaan sebagai layanan publik yang memiliki tupoksi mendukung institusi dalam bidang informasi kesehatan. CPNS Kemenkes diperkenalkan koleksi perpustakaan dan aplikasi perpustakaan yang dapat di akses dan dimanfaatkan.

Gambar 3. 91 Dokumentasi Bimbingan Pemustaka



12. Pemeliharaan Aplikasi Perpustakaan Kementerian Kesehatan

Di era teknologi saat ini Perpustakaan Biro Komunikasi dan Informasi Publik menggunakan aplikasi untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada pemustakanya. Untuk menjalankan layanan perpustakaan pada saat ini Biro komunikasi memiliki 1 *server colocation* dan 3 *server hosting* di *data center* milik Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes. Dengan maraknya insiden siber yang terjadi akhir-akhir ini maka setiap aplikasi mutlak harus rutin diperbaharui dan dilakukan proses pencadangan secara rutin sepanjang tahun mengikuti perkembangan keamanan di bidang pemrograman. Hal ini diperlukan supaya bisa mengurangi dampak resiko insiden keamanan siber. Karena banyaknya faktor dan modul yang harus diperbaharui maka supaya lebih efisien dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga tidak tumpang tindih proses.

Tahun 2025 pemeliharaan aplikasi perpustakaan yang dikelola oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik yaitu *website* perpustakaan, KINK dan ISBN penganggarannya ada di Pusat Data dan Teknologi Informasi. Tim Kerja Pengelolaan Perpustakaan sudah menyiapkan KAK dan dokumen pendukung untuk pengadaannya. Daftar Perpustakaan yang telah bergabung dalam KINK (Katalog Induk Nasional Kesehatan) dapat dilihat pada <https://kink.kemkes.go.id/>. Jumlah Koleksi OPAC seluruh perpustakaan di lingkungan Kemenkes yaitu 331.548 judul, sedangkan jumlah koleksi repository sebanyak 114.734 judul.

13. Pengolahan Bahan Perpustakaan Kementerian Kesehatan Tahun 2025

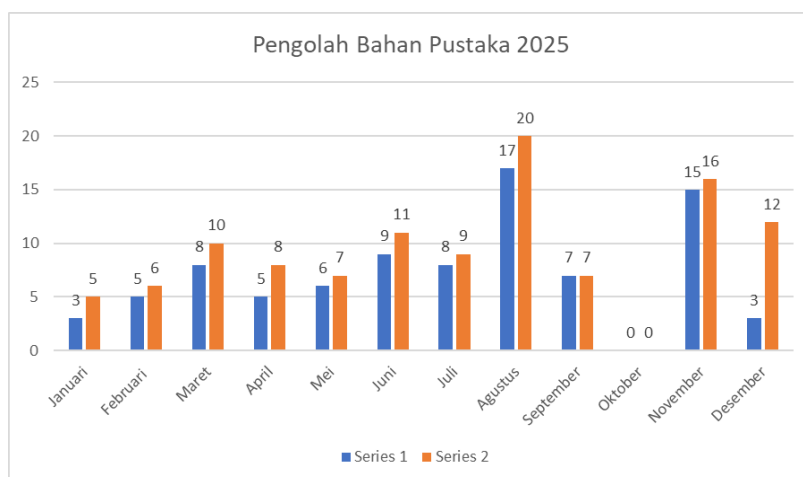
Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah pekerjaan mengolah bahan perpustakaan secara profesional dengan sistem yang baku agar mudah ditemukan kembali. Perpustakaan Kementerian Kesehatan menggunakan klasifikasi DDC (*Dewey Decimal Classification*) untuk menentukan nomor kelas suatu bahan pustaka. Sedangkan untuk menentukan tajuk subjek menggunakan *Medical Subject Heading* (Mesh).

Sistem pengolahan bahan perpustakaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pengolahan Bahan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Bahan perpustakaan yang telah diolah menggunakan sistem yang baku selanjutnya diinput (entri) kedalam sistem informasi perpustakaan yang terintegrasi.

Perpustakaan Kemenkes menggunakan INLIS (*Integrated Library System*) Lite. Inlislite merupakan perangkat lunak aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustnas sejak tahun 2011. INLISLite dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan.

Koleksi perpustakaan Kementerian Kesehatan bersumber dari pembelian dan hibah. Namun, tahun 2025 tidak ada pembelian sehingga koleksi hanya bersumber dari hibah yaitu pemberian pimpinan atau stakeholder terkait dan hasil serah simpan karya cetak yang berasal dari unit kerja yang menerbitkan karya cetak. Secara keseluruhan, data pengolahan untuk tahun 2025 adalah sebanyak 86 judul dan 111 eksemplar.

Gambar 3. 92 Data Pengolah Bahan Pustaka Tahun 2025



14. Bibliografi Terbitan Kemenkes

Bibliografi terbitan adalah daftar sistematis yang memuat seluruh karya atau dokumen yang diterbitkan oleh suatu lembaga, institusi, atau penerbit dalam kurun waktu tertentu. Di lingkungan perpustakaan dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, bibliografi terbitan berfungsi sebagai alat telusur resmi yang mendokumentasikan semua publikasi yang sudah dikeluarkan. Adapun fungsi utama dari penerbitan bibliografi antara lain:

a) Dokumentasi dan arsip resmi

Menghimpun rekam jejak seluruh publikasi lembaga (buku, modul, pedoman, laporan, majalah, jurnal, leaflet, dan lainnya).

b) Alat penelusuran

Memudahkan pengguna untuk menemukan informasi publikasi berdasarkan judul, pengarang, subjek, atau tahun terbit.

c) Kontrol bibliografi

Menjadi dasar untuk memastikan tidak ada duplikasi atau kekurangan data dalam koleksi perpustakaan.

d) Dasar pengembangan koleksi

Membantu pustakawan dalam menentukan kebutuhan pembaruan koleksi dan pemeliharaan bahan pustaka.

Tabel 3. 45 Bibliografi Terbitan Tahun 2025

No	Judul Terbitan	Pengarang/Unit	Tahun	Jumlah Halaman	Bentuk	Eks
1	Departemen Pulmonologi & Ilmu Kedokteran Respirasi FK UI - RS Persahabatan : Dulu, Kini, dan Kelak	Departemen Pulmonologi & Ilmu Kedokteran Respirasi FK UI - RS Persahabatan	2013	vii + 80	Buku	1
2	Bringing The Future Now : Partnership Report 2024	Kementerian Kesehatan	2024	130	Buku	1
3	Perkembangan Transformasi Kebijakan Kesehatan Di Indonesia : Dari Reformasi Hingga Pasca Vovid, 1999-2023	Kementerian Kesehatan	2024	xi + 673	Buku	2
4	Buku Saku Pasien Tuberkulosis Resistan Obat	Kementerian Kesehatan	2024	xii + 56	Buku	3
5	Laporan Tematik Survei Kesehatan Indonesia : Potret Indonesia Sehat	Kementerian Kesehatan	2024	x + 128	Buku	1
6	Petunjuk Teknis Investigasi Kontak Terintegrasi Terapi	Kementerian Kesehatan	2025	xvi + 78	Buku	2

No	Judul Terbitan	Pengarang/Unit	Tahun	Jumlah Halaman	Bentuk	Eks
	Pencegahan Tuberkulosis					
7	Buku Saku Tata Laksana Gangguan Penggunaan Napza di Puskesmas	Kementerian Kesehatan	2024	viii + 63	Buku	1
8	Petunjuk Teknis Pemberian Imunisasi Covid-19 Program	Kementerian Kesehatan	2024	xvi + 54	Buku	1
9	Pusat Infeksi Nasional RSPI Prof Dr Sulianti Saroso : Cerita Rasa Seribu Asa Setahun Pandemi Covid-19	Kementerian Kesehatan	2021	xii + 103	Buku	1
10	Pedoman Keselamatan Hayati (Biosafety) Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 4 dan 5	Kementerian Kesehatan	2025	xi + 146	Buku	1
11	Peta Jalan Eliminasi Malaria dan Pencegahan Penularan Kembali Di Indonesia Tahun 2025-2045	Kementerian Kesehatan	2025	xxiv+73	Buku	3
12	Roadmap for Malaria Elimination and Prevention of Reestablishment in Indonesia 2025-2045	Kementerian Kesehatan	2025	xxvi+73	Buku	3

15. Pameran Perpustakaan

Sebagai pembina perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, Biro Komunikasi dan Informasi Publik memiliki mandat untuk mendorong peningkatan literasi, penguatan budaya kerja berbasis pengetahuan (*knowledge-based working culture*), serta pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat informasi kesehatan yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pameran perpustakaan.

Pameran Perpustakaan diselenggarakan sebagai upaya untuk memperkenalkan layanan, koleksi, serta inovasi perpustakaan kepada pengunjung kegiatan. Melalui pameran ini, perpustakaan berperan aktif dalam mendukung peningkatan literasi informasi serta memperluas pemanfaatan sumber pengetahuan yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan pengguna.

Dalam tahun 2025, Perpustakaan Kementerian Kesehatan melaksanakan pameran sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama adalah pada tanggal 17 Agustus 2025 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI yang ke 80 dan Kegiatan Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK) di Buperta Cibubur Jakarta Timur, pameran perpustakaan kedua dilaksanakan pada tanggal 5 November 2025 di Auditorium Siwabessy gedung Sujudi Kemenkes yang bertepatan dengan agenda Bibliobattle Eselon II Kemenkes dan pameran perpustakaan ketiga dilaksanakan pada tanggal 07-09 Desember 2025 di Kartika Expo Balai Kartini yang bertepatan dengan pelaksanaan *Health Artificial Intelligence Festival (HAI FEST) 2025*. Pameran perpustakaan mendapat respons positif dari pengunjung yang ditunjukkan melalui tingginya minat untuk berinteraksi, bertanya, dan mencoba langsung layanan digital yang disediakan. Kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk membangun kedekatan antara perpustakaan dan masyarakat, sekaligus memperkuat citra perpustakaan sebagai pusat informasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, pameran perpustakaan berjalan dengan tertib dan lancar, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya promosi layanan perpustakaan dan penguatan budaya literasi. Diharapkan melalui kegiatan ini, pemanfaatan perpustakaan dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pengunjung dan pemangku kepentingan.

Gambar 3. 93 Pameran Perpustakaan di Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 dan kegiatan Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus (PPBK) di Buperta Cibubur



Gambar 3. 94 Pameran Perpustakaan di Auditorium Siwabessy Gedung Suyudi Kemenkes bertepatan dengan Bibliobattle Eselon II Kemenkes



Gambar 3. 95 Pameran Perpustakaan ketiga memperingati HKN ke 61 dan Health Artificial Intelligence Festival (HAI FEST) 2025 tanggal 07-09 Desember 2025 di Kartini Expo Balai Kartini



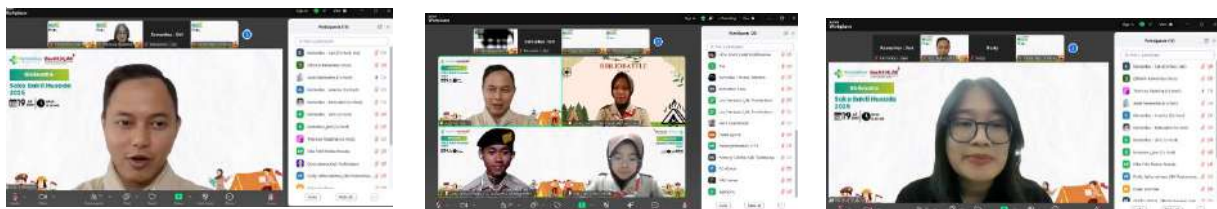
16. Bibliobattle dalam rangka Hari Saka Bakti Husada (SBH) ke-40 Tahun 2025

Dalam rangka peringatan hari Saka Bakti Husada (SBH) ke-40 tahun 2025, Biro Komunikasi dan Informasi Publik berkolaborasi dengan Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Ditjen Kesehatan Primer dan Rujukan menyelenggarakan kegiatan Bibliobattle SBH ke-40 Tahun 2025 dengan tema “Bersahabat dengan Buku, Sehatkan Jiwa Ragamu”. Kegiatan bibliobattle adalah kompetisi untuk mempresentasikan isi buku favorit bertema kesehatan, baik fiksi maupun non-fiksi secara menarik di depan peserta lain, yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan memperluas wawasan anggota SBH tingkat penegak dan pandega melalui diskusi buku secara interaktif. Pendaftaran peserta dibuka pada tanggal 7- 10 Juli 2025, dan pengumuman peserta terpilih pada tanggal 11 Juli 2025. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada 19 Juli 2025 secara daring (<https://s.kemkes.go.id/BibliobattleSBH2025>), yang diikuti oleh 3 peserta, yaitu:

- a) Dita Putri Rimba P (pangkalan SBH Puskesmas Tanah Kali Kedinding) dengan judul buku “Tentang Tubuhmu” karya DR. Gia Pratama
- b) Fadly Fathurrahman (pangkalan SBH Puskesmas Bojongsambir) dengan judul buku “Novel Egosentris” karya Syahid Muhammad
- c) Ghita Liyana (pangkalan SBH Puskesmas Jatirokeh) dengan buku yang berjudul “Tulisan Sastra” karya Tender Lova

Proses penjurian dilakukan dengan cara pemilihan secara daring yang diikuti 190 pemilih, dan suara terbanyak dinobatkan sebagai pemenang, yaitu Ghita Liyana sebagai favorit pertama dengan perolehan 64.2 %, Fadly Fathurrahman dengan 22.6%, dan Dita Putri Rimba Pranata 13.2%. Peserta akan mendapatkan hadiah dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Ditjen Kesehatan Primer dan Rujukan.

Gambar 3. 96 Proses Penjurian Bibliobattle Hari SakaBakti Husada (SBH) ke-40 Tahun 2025



17. Bibliobattle CASN dalam rangka Hari Kunjungan Perpustakaan Tahun 2025

Dalam rangka peringatan Hari Kunjungan Perpustakaan tahun 2025, penyelenggaraan kegiatan Bibliobattle CASN Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan pada Jumat 12 September 2025, dengan jumlah pendaftar yang menjadi kandidat peserta berjumlah 10 orang

yang berasal dari Ditjen SDM, BKPK, Ditjen Farmalkes, Sekretariat Jenderal, Ditjen Kesehatan Lanjutan, dan Inspektorat Jenderal, kemudian dipilih 1 orang yang akan mewakili tiap unit utama berdasarkan yang mendaftar terlebih dahulu sehingga didapatkan 7 orang peserta.

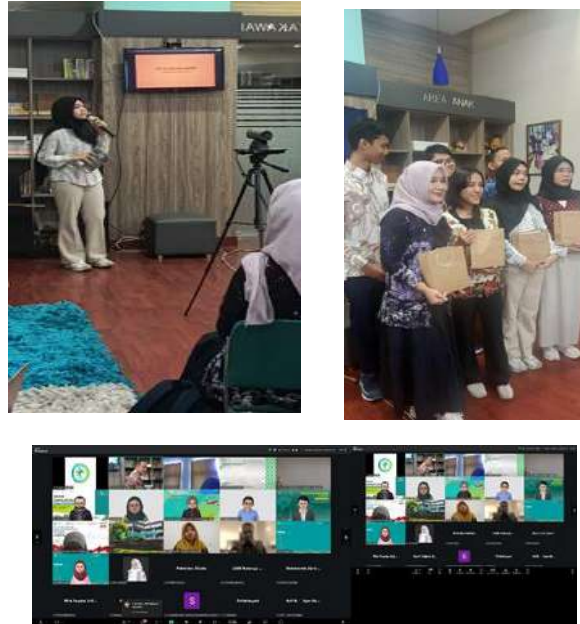
Technical Meeting dilaksanakan pada Rabu, 10 September 2025 yang membahas mekanisme pelaksanaan kegiatan bibliobattle, meliputi urutan tampil menggunakan roulette spinner secara langsung, waktu presentasi selama 7 menit, dan pemilihan pemenang dilakukan secara langsung. Kegiatan bibliobattle diikuti oleh 8 (delapan) CASN yang mewakili tiap unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan yaitu:

- a) Deandra Ananda Maisha (Ditjen Penanggulangan Penyakit) dengan buku berjudul “The Midnight Library” karya Matt Haig
- b) Anggi Wardhani Putri Hadau (Ditjen Kesprimkom) dengan buku berjudul “Negeri Di Ujung Tanduk” karya Tere Liye
- c) May Suharti (BKPK) dengan buku yang berjudul “You Do You” karya Fellexandro Ruby
- d) Hasna Fadhillah (Ditjen SDM) dengan buku berjudul “Perkumpulan Anak Luar Nikah” karya Grace Tioso
- e) Prasetyo Hilmi Lazuardi (Itjen) dengan buku berjudul “A Tales of Two Cities” karya Charles Dickens
- f) Aprilian Sumodiningrat (Setjen) dengan buku berjudul “ The Road to Wigan Pier” karya George Orwell
- g) Fahriza Ardiansyah (Ditjen Farmalkes) dengan buku berjudul “The Alchemist” karya Paulo Coelho
- h) Fadillah Puspa Nadinnjsa (Ditjen Keslan) dengan buku berjudul “Tentang Kamu” karya Tere Liye

Kegiatan dimulai dengan penampilan musik dari Timker Pengelolaan Perpustakaan, yang dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, untuk selanjutnya dilakukan penentuan urutan tampil dan presentasi 8 peserta. Dengan keterbatasan ruang perpustakaan Kemenkes, acara ini dilaksanakan secara hybrid dengan undangan yang bergabung pada zoom berjumlah 286 akun. Selanjutnya, penampilan seluruh peserta dibuka voting untuk memilih Peserta Favorit melalui link <https://etc.ch/6xEB>, dari 654 partisipan yang memilih diputuskan 3 besar dengan suara tertinggi, pertama May Suharti dari BKPK, kedua Fadhillah Puspa Nadinnjsa dari Ditjen Keslan, dan ketiga Prasetyo Hilmi Lazuardi dan Itjen. Antusiasme dari kegiatan bibliobattle CASN dalam rangka hari kunjung perpustakaan tahun 2025, cukup tinggi terlihat dengan jumlah undangan yang bergabung pada zoom dan jumlah partisipan yang melakukan voting. Kegiatan bibliobattle memberi dampak yang luar biasa

sebagai *sharing knowledge*, sarana membangun budaya literasi, promosi perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Gambar 3. 97 Pelaksanaan Bibliobattle CASN dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan Tahun 2025



18. Bibliobattle Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Tahun 2025 dengan tema “*Generasi Sehat, Masa Depan Hebat*”, Perpustakaan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Bibliobattle sebagai salah satu rangkaian kegiatan HKN. Kegiatan ini merupakan aktivitas literasi yang difokuskan pada penyampaian ulasan buku dan refleksi isi bacaan oleh peserta di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kegiatan Bibliobattle dilaksanakan pada Rabu, 5 November 2025, bertempat di Auditorium Siwabessy, Gedung Prof. Sujudi Lantai 2, dan dilaksanakan secara hybrid. Peserta yang hadir secara luring berjumlah 250 orang, sementara peserta daring tercatat 560 akun, dengan 1.153 partisipan mengikuti proses voting daring. Kegiatan ini diikuti oleh sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang mewakili unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Setelah seluruh peserta menyampaikan ulasan buku, dilakukan voting daring untuk menentukan peserta dengan perolehan suara terbanyak. Berdasarkan hasil voting dari 1.153 partisipan, ditetapkan tiga peserta dengan suara tertinggi, yaitu:

- a) dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H (BKPK);
- b) Dr. Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc (Ditjen Farmalkes);
- c) dr. Yanti Herman, SH., M.H.Kes (Ditjen Keslan).

Kegiatan Bibliobattle ini tercatat sebagai bagian dari Klaster 4 Transformasi Kesehatan: Public Awareness and Knowledge Sharing, dengan fokus pada pelaksanaan aktivitas berbagi pengetahuan melalui literasi. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan terdokumentasi dalam laporan kegiatan serta dokumentasi pendukung.

Gambar 3. 98 Pelaksanaan Bibliobattle Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025



19. Sosialisasi Penggunaan Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan

Sosialisasi Penggunaan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dilaksanakan pada Jumat, 10 Oktober 2025, pukul 08.45–11.00 WIB, bertempat di Ruang Naranta, Gedung Adhyatma Lantai 1, dan dilaksanakan secara luring. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik bekerja sama dengan silang.id sebagai narasumber, dengan peserta yang berasal dari petugas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berlokasi di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan.

Kegiatan dimulai pada pukul 08.45 WIB dan dibuka dengan penampilan musik pustakawan Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Selanjutnya disampaikan sambutan pembuka oleh perwakilan Biro Komunikasi dan Informasi Publik, yang menyampaikan latar belakang pelaksanaan kegiatan dalam konteks pelayanan publik bagi teman tuli. Sebelum penyampaian materi, seluruh peserta diarahkan untuk mengisi pre-test daring guna memperoleh gambaran awal pemahaman peserta terkait Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan dunia Tuli.

Sesi materi dibuka oleh narasumber dari silang.id, Mahesa Nayandra, dengan pengantar mengenai konsep dasar disabilitas melalui tiga paradigma utama, yaitu paradigma medis,

paradigma sosial-budaya, dan paradigma hak asasi manusia. Penjelasan disertai contoh situasi pelayanan kesehatan, antara lain terkait tata ruang layanan, prosedur triase, dan pola komunikasi yang dapat memengaruhi akses layanan bagi pasien Tuli.

Pada sesi berikutnya, disampaikan materi mengenai pemahaman dunia Tuli, termasuk perbedaan penggunaan istilah “Tuli” sebagai identitas budaya-linguistik dan “tunarungu” sebagai istilah medis. Narasumber menjelaskan implikasi penggunaan istilah tersebut dalam praktik pelayanan, serta memaparkan karakteristik budaya Tuli, seperti pentingnya komunikasi visual, pengaturan ruang interaksi, dan penggunaan sinyal visual dalam kondisi tertentu.

Materi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai inklusivitas dan aksesibilitas dalam pelayanan publik bagi masyarakat Tuli. Pada sesi ini dipaparkan sejumlah contoh praktik operasional yang dapat diterapkan di unit pelayanan, antara lain penggunaan juru bahasa isyarat, penyediaan takarir atau teks pada media edukasi audiovisual, pemanfaatan teknologi *voice-to-text*, serta penyesuaian cara komunikasi petugas layanan. Disampaikan pula contoh alur pelayanan sederhana dalam menghadapi pengguna layanan Tuli, seperti penyampaian informasi antrean secara visual dan pemberian penjelasan tertulis bila diperlukan.

Sesi pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dilaksanakan melalui praktik langsung, meliputi pengenalan abjad (spelling), angka dasar, dan frasa sederhana yang umum digunakan dalam pelayanan publik, seperti sapaan, instruksi antrean, dan ungkapan penutup. Peserta dipandu untuk mempraktikkan isyarat dasar secara bertahap, termasuk latihan mengeja nama dan menyusun kalimat singkat.

Selanjutnya dilaksanakan sesi praktik komunikasi pelayanan publik melalui simulasi dan *role-play* antara petugas layanan dan pengguna layanan Tuli. Praktik komunikasi dilengkapi dengan mini games berbasis bahasa isyarat, seperti tebak huruf dan pesan berantai, yang dilakukan secara berkelompok. Narasumber memberikan umpan balik teknis terkait penggunaan kontak mata, kejelasan gerakan, serta alternatif komunikasi non-verbal yang dapat digunakan dalam situasi pelayanan.

Pada sesi penutupan, peserta diminta mengisi post-test daring melalui tautan yang disediakan oleh Silang.id. Selama pengisian post-test, narasumber menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terkait pengembangan kebijakan layanan inklusif, termasuk isu administratif yang dihadapi tenaga kesehatan Tuli. Kegiatan ditutup oleh perwakilan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan penyampaian penutup dan pengarsipan dokumentasi kegiatan serta daftar hadir peserta.

Gambar 3. 99 Sosialisasi Penggunaan Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan



20. Fumigasi Perpustakaan Kemenkes

Perpustakaan Kementerian Kesehatan merupakan layanan publik yang memiliki banyak koleksi bahan pustaka berupa buku terbitan Kementerian Kesehatan. Dalam rangka melestarikan bahan pustaka, perlu dilakukan fumigasi di perpustakaan untuk mencegah, mensterilkan dan membasmi biota yang dapat merusak bahan pustaka. Sehubungan dengan hal tersebut perpustakaan melaksanakan fumigasi pada tanggal 31 Oktober sd 2 November 2025 yang difasilitasi oleh Biro Umum. Adapun ruang yang difumigasi adalah ruang pelayanan dan pustakawan.

Gambar 3. 100 Fumigasi Perpustakaan Kemenkes



21. *Grand Design* Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029

Penyusunan *Grand Design* Perpustakaan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman strategis dalam arah pembinaan dan pengembangan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, serta pencapaian pembangunan kesehatan nasional. Dilatarbelakangi dengan perlunya penguatan peran perpustakaan sebagai pusat repository, pusat layanan informasi kesehatan, serta simpul jejaring yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Perkembangan teknologi informasi, perubahan pola konsumsi informasi, serta tuntutan transformasi sistem kesehatan mengharuskan perpustakaan beradaptasi dan bertransformasi menuju layanan yang profesional, modern, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan pemustaka. Sebagai acuan keterkaitan antar transformasi Kemenkes dengan perpustakaan, perpustakaan harus selaras dengan transformasi internal sebagai tindak lanjut berakhirnya *Grand Design* 2022-

2024. *Grand Design* disusun melalui tahapan metodologis yang komprehensif, meliputi survei, observasi, wawancara, analisis lingkungan strategis, serta forum diskusi terarah, sehingga kebijakan dan strategi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. *Grand Design* ini mencakup arah kebijakan, strategi pembinaan, program prioritas, indikator kinerja, serta roadmap pengembangan perpustakaan lima tahun ke depan, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, optimalisasi koleksi, penyediaan sarana dan prasarana yang terstandar, peningkatan mutu layanan, serta penguatan pendanaan yang berkesinambungan.

Penyusunan *Grand Design* melalui tahapan pembahasan dengan pustakawan di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui FGD baik secara daring maupun luring yaitu 7 Maret 2025, 31 Oktober 2025 dan 28 November 2025. Pada FGD pertama, disampaikan form survei dan wawancara dan tata cara pengisiannya dengan sebelumnya membahas terkait kondisi teraktual masing-masing perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada FGD kedua, membahas hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa survei dan wawancara yang telah dilaksanakan dengan mendapatkan masukan terkait kebutuhan yang muncul dalam *Grand Design* tersebut. Pada FGD ketiga, dilaksanakannya finalisasi hasil penyusunan *Grand Design* yang sudah mencapai persentase 99 % dan menunggu persetujuan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Dalam *Grand Design* ini mencakup perpustakaan yang berada di lingkungan pusat, unit pelaksana teknis, rumah sakit vertikal, dan Politeknik Kesehatan Kemenkes, serta jejaring perpustakaan yang berafiliasi dalam ekosistem kesehatan nasional. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis kondisi faktual, penerapan Standar Nasional Perpustakaan, kajian terhadap regulasi yang berlaku, serta dinamika perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan literasi kesehatan masyarakat.

Visi yang ingin diwujudkan melalui *Grand Design* ini adalah “Perpustakaan Unggulan, Pusat Repository dan Jaringan Informasi Kesehatan.” Visi tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan utama yang mencakup: (1) penguatan kelembagaan perpustakaan, (2) peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, (3) pengembangan dan penguatan koleksi unggulan bidang kesehatan, (4) peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang modern dan inklusif, (5) penguatan layanan berbasis teknologi dan kebutuhan pengguna, serta (6) jaminan keberlanjutan pendanaan dan tata kelola.

Hasil analisis situasi menunjukkan bahwa perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan memiliki potensi besar berupa dukungan kelembagaan yang kuat, ketersediaan konten lokal yang kaya (laporan, hasil penelitian, karya ilmiah), serta jejaring nasional yang telah terbentuk. Namun, di sisi lain masih terdapat berbagai tantangan yang perlu segera ditangani, antara lain keterbatasan jumlah dan kompetensi pustakawan, belum meratanya

pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan, keterbatasan infrastruktur teknologi, pengelolaan koleksi yang belum terintegrasi, serta pemanfaatan perpustakaan yang belum optimal oleh pemangku kepentingan.

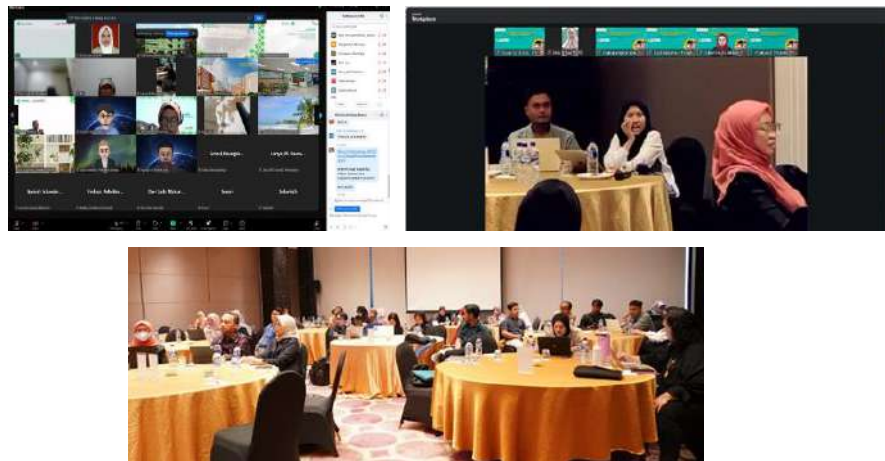
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, *Grand Design* ini menetapkan peta jalan (roadmap) pengembangan perpustakaan selama lima tahun, yang dibagi ke dalam lima fase utama, yaitu:

- a) Tahun 2025 – Fase Fondasi dan Standarisasi Awal Fokus pada penegasan kelembagaan, pemetaan kondisi perpustakaan, penyusunan standar teknis pengelolaan
- b) Pencanaan transformasi digital melalui penguatan Kemenkes Knowledge Network (KINK). Tahun 2026 – Fase Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi pustakawan melalui pendampingan akreditasi, pelatihan, sertifikasi pustakawan, serta penguatan forum kerja sama perpustakaan kesehatan (Fortakes).
- c) Tahun 2027 – Fase Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Menitikberatkan pada digitalisasi koleksi unggulan, implementasi KINK secara menyeluruh, integrasi dengan Indonesia One Search, serta pengembangan layanan digital dan program literasi digital kesehatan.
- d) Tahun 2028 – Fase Peningkatan Mutu dan Penguatan Daya Saing Berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, penataan sarana prasarana modern dan inklusif, penguatan kerja sama nasional dan internasional, serta penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan.
- e) Tahun 2029 – Fase Penguatan Reputasi dan Keberlanjutan Ditujukan untuk memantapkan peran perpustakaan sebagai pusat repository kesehatan nasional, memperluas pengakuan di tingkat nasional dan internasional, serta merumuskan kesinambungan kebijakan untuk periode berikutnya.
- f) Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan *Grand Design* ini, ditetapkan sejumlah indikator kinerja utama, antara lain persentase perpustakaan yang terakreditasi, persentase pustakawan yang tersertifikasi, tingkat digitalisasi koleksi unggulan, tingkat integrasi sistem informasi, cakupan layanan digital, serta tingkat kepuasan pengguna. Target utama yang ingin dicapai pada tahun 2029 meliputi:
 - a) Minimal 90% perpustakaan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan;
 - b) Minimal 70% koleksi unggulan terdigitalisasi dan terintegrasi dalam repository;
 - c) Seluruh perpustakaan terhubung dalam Kemenkes Knowledge Network (KINK);
 - d) Seluruh unit telah menyelenggarakan layanan berbasis digital dan hybrid;
 - e) Tingkat kepuasan pengguna mencapai minimal 85%;

- f) Perpustakaan Kementerian Kesehatan menjadi pusat rujukan nasional di bidang informasi dan literasi kesehatan.

Grand Design ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan yang mempertegas bahwa perpustakaan adalah bagian integral dari transformasi sistem kesehatan nasional. Dengan dukungan kebijakan pimpinan, penguatan SDM, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pengetahuan strategis yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Gambar 3. 101 Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Grand Design Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029



23. Pembinaan Pengembangan Kompetensi Pustakawan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia perpustakaan serta mendukung penguatan peran perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan, pada tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi bagi pustakawan dan pengelola perpustakaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai metode pembelajaran, baik daring, luring, maupun pembelajaran jarak jauh, dengan melibatkan kerja sama lintas unit dan instansi eksternal.

Kegiatan pertama adalah Bedah Buku “Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis” yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 20 Maret 2025 bekerja sama dengan P2KSN. Kegiatan ini diikuti oleh 37 orang pengelola perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan serta 250 peserta dari luar lingkungan Kementerian Kesehatan. Seluruh peserta memperoleh sertifikat setara 2 Jam Pelajaran, sebagai bentuk pengakuan atas peningkatan kompetensi yang diperoleh.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Juni 2025, diselenggarakan Workshop Basic of Information Literacy sebagai hasil kolaborasi antara Perpustakaan Kementerian Kesehatan dan Dinas Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Gedung Direktorat Jenderal SDM, Jalan Hang Jebat 3, Jakarta, dan diikuti oleh 38 peserta yang berasal dari Perpustakaan Rumah Sakit Vertikal, Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Perpustakaan Sekretariat BKPK, Perpustakaan Sekretariat Ditjen SDM, serta Perpustakaan Balai Pelatihan Kesehatan di wilayah Jakarta.

Pada tanggal 4 Juli 2025, dilaksanakan Webinar Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas yang dikhususkan bagi CPNS formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan melalui metode *distance learning*. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Balai Besar Pelatihan Kesehatan Batam dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik sebagai pembina jabatan fungsional pustakawan. Webinar ini diikuti oleh 23 orang CPNS Pustakawan dan 3 orang CPNS Asisten Perpustakaan, dengan narasumber Giri Inayah dan Jeni Helen Chronika S.

Selain itu, pada tanggal 4 Oktober 2025, diselenggarakan Webinar Research Data Management Plan dengan tema “*Menjadikan Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes sebagai Kurator dan Pengelola Riset Kesehatan*”. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Perpustakaan Universitas Padjadjaran, Bapak Nurmaya, dilaksanakan secara daring, dan diikuti oleh 78 peserta, sebagai hasil kerja sama Perpustakaan Kementerian Kesehatan, Sekretariat Ditjen SDM, dan P2KSN.

Kegiatan terakhir adalah Pelatihan Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan berbasis Massive Online Open Course (MOOC) yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI pada tanggal 14–24 Oktober 2025 dengan total 32 Jam Pelatihan. Peserta dari Kementerian Kesehatan berjumlah 45 orang pustakawan, dengan peran Perpustakaan Kementerian Kesehatan dalam melakukan sosialisasi dan pengumuman melalui grup WhatsApp. Secara keseluruhan, pelatihan ini diikuti oleh 34 peserta, dengan 34 sertifikat yang diterbitkan.

Secara total, jumlah peserta pengembangan kompetensi perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan pada tahun 2025 mencapai 201 orang, sehingga target pengembangan kompetensi tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1) Hal-hal yang Mempengaruhi Pencapaian Target

- a) Kecepatan respons dan tindak lanjut unit utama/UPT terhadap laporan SP4N LAPOR!.
- b) Konsistensi *monitoring* dan evaluasi kinerja triwulanan

- c) Kepatuhan pemberi layanan terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d) Efektivitas fungsi PPID unit utama dan UPT
- e) Penyesuaian pola media *monitoring* dan dinamika isu publik
- f) Kompetensi SDM (pustakawan, humas, admin layanan)
- g) Kepatuhan administrasi pengajuan KDT dan ISBN
- h) Tingkat pemanfaatan INLISLite
- i) Optimalisasi publikasi digital di tengah keterbatasan anggaran
- j) Koordinasi lintas unit dan dinamika agenda pimpinan

2) Permasalahan

- a) Belum seluruh unit menunjuk admin khusus SP4N LAPOR!.
- b) Pembaruan website PPID belum optimal.
- c) Kendala teknis Omnichannel Omnix memengaruhi layanan telepon.
- d) Peran humas UPT belum maksimal.
- e) Ketergantungan pada media organik.
- f) Ketidaklengkapan dokumen pengajuan KDT dan ISBN.
- g) Gangguan keamanan dan maintenance website perpustakaan.
- h) INLISLite dan OPAC tidak dapat diakses selama maintenance.
- i) Versi INLISLite belum kompatibel dengan infrastruktur server.
- j) Keterbatasan anggaran, peralatan, dan SDM peliputan.

3) Pemecahan Masalah

- a) Penetapan penanggung jawab SP4N LAPOR! di setiap unit
- b) *Monitoring* rutin buku registrasi permohonan informasi.
- c) Koordinasi teknis dengan pengelola website PPID dan Pusdatin.
- d) Penyesuaian sistem Omnix dengan jaringan Kemenkes.
- e) Kolaborasi lintas unit dan dukungan mitra pembangunan.
- f) Penguatan peran humas UPT dan program magang kreatif.
- g) Edukasi pemohon terkait persyaratan KDT dan ISBN.
- h) Optimalisasi publikasi digital sebagai alternatif kegiatan offline.
- i) Efisiensi produksi konten melalui template dan CMS.
- j) Berbagi dokumentasi antarunit kerja.

4) Rencana Tindak Lanjut

- a) Penegasan penunjukan admin SP4N LAPOR! di seluruh unit utama.
- b) Peningkatan keterbukaan informasi publik lintas kanal.
- c) Pelaporan dan koordinasi berkala terkait kendala Omnix.
- d) Penguatan jejaring kolaborasi lintas program dan sektor.
- e) Penyusunan Pedoman Media Sosial Kementerian Kesehatan.
- f) Transfer knowledge pustakawan pascasertifikasi.
- g) Penarikan data perpustakaan secara berkala sebagai mitigasi risiko.
- h) Sosialisasi tata cara pengajuan ISBN.
- i) Penyusunan *Grand Design* perpustakaan.
- j) Pemantauan kinerja melalui dashboard peliputan.

INOVASI KINERJA

a) Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK)

Inovasi Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK) lahir dari permasalahan struktural pengelolaan koleksi perpustakaan Kementerian Kesehatan yang tersebar di ratusan unit kerja dengan sistem otomasi dan server yang tidak terintegrasi. Kondisi sebelum inovasi menunjukkan fragmentasi data koleksi, keterbatasan akses lintas wilayah, serta rendahnya pemanfaatan koleksi ilmiah kesehatan secara nasional. Hal ini berdampak pada belum optimalnya peran perpustakaan sebagai pendukung pendidikan, penelitian, dan pengambilan kebijakan kesehatan.

Secara konseptual, KINK dirancang tidak hanya sebagai katalog induk, tetapi sebagai platform integrasi dan analitik nasional koleksi kesehatan. Melalui penerapan standar interoperabilitas OAI-PMH, KINK mengintegrasikan OPAC dan repositori institusi secara terpusat, memungkinkan pencarian lintas wilayah dan jenis dokumen. Keberadaan fitur validasi metadata, dashboard statistik nasional, *monitoring* konektivitas, serta API terbuka menunjukkan bahwa inovasi ini berorientasi pada tata kelola data, kualitas informasi, dan keberlanjutan sistem, bukan sekadar digitalisasi katalog.

Dari sisi dampak, pengembangan KINK hingga tahun 2025 menunjukkan pergeseran signifikan dari sistem terfragmentasi menuju ekosistem pengetahuan kesehatan nasional yang terintegrasi. Integrasi hingga 90 repositori memperkuat fungsi Perpustakaan Kemenkes sebagai simpul jejaring nasional dan mendukung pelaporan serta pengambilan kebijakan berbasis data. Inovasi ini juga secara langsung mengimplementasikan amanat UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sekaligus mendukung transformasi digital Kementerian Kesehatan dalam kerangka SAKIP.

b) Survei Kepuasan Pengguna Layanan

Inovasi Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) dikembangkan sebagai respons atas kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan publik yang terstandar, berkelanjutan, dan berbasis persepsi pengguna. Sebelum inovasi, pengukuran kepuasan layanan belum dilakukan secara sistematis dan belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan perbaikan layanan. Padahal, regulasi menuntut instansi pemerintah untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator penting kinerja pelayanan.

SKPL dirancang dengan pendekatan metodologis yang lebih kuat melalui pemetaan lokus, penunjukan dan pelatihan enumerator, serta kombinasi metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Pelaksanaan survei secara luring dengan kuesioner terstruktur berbasis barcode, wawancara mendalam, dan observasi lapangan meningkatkan validitas serta kedalaman data. Keterlibatan pihak akademik (UGM) memperkuat kredibilitas hasil survei dan memastikan proses berjalan sesuai standar ilmiah.

Secara strategis, SKPL tidak hanya menghasilkan nilai kepuasan, tetapi menjadi instrumen manajemen kinerja pelayanan publik. Hasil survei dimanfaatkan sebagai dasar identifikasi area perbaikan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, SKPL berkontribusi langsung pada penguatan budaya pelayanan prima, peningkatan transparansi, serta penyelarasan kinerja pelayanan dengan prinsip SAKIP yang berorientasi pada hasil dan dampak bagi masyarakat.

D. SUMBER DAYA/REALISASI ANGGARAN

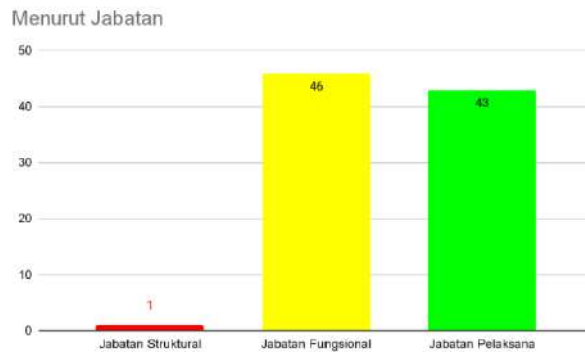
1. Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal sampai dengan Desember 2025 berjumlah 90 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurut Jabatan

1. Jabatan Struktural	: 1	orang
2. Jabatan Fungsional	: 46	orang
• Pranata Humas	: 33	orang
• Pustakawan	: 5	orang
• Pranata Komputer	: 1	orang
• Perencana	: 1	orang
• Arsiparis	: 2	orang
• Keuangan	: 4	orang
3. Jabatan Pelaksana	: 43	orang

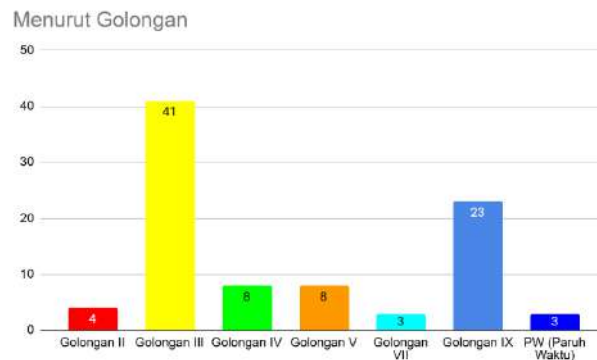
Gambar 3. 102 Diagram Jumlah Pegawai Menurut Jabatan



2. Menurut Golongan

1. Golongan II	: 4	orang
2. Golongan III	: 41	orang
3. Golongan IV	: 8	orang
4. Golongan V	: 8	orang
5. Golongan VII	: 3	orang
6. Golongan IX	: 23	orang
7. PW (Paruh Waktu)	: 3	orang

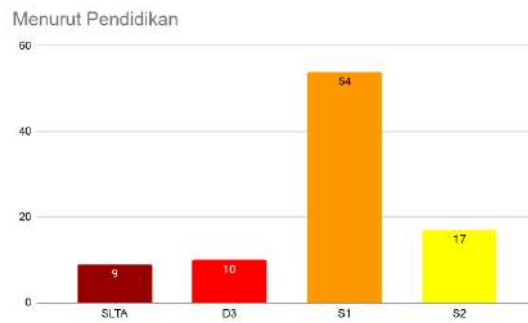
Gambar 3. 103 Diagram Jumlah Pegawai Menurut Golongan



3. Menurut Pendidikan

1. SLTA	: 9	orang
2. D3	: 10	orang
3. S1	: 54	orang
4. S2	: 17	orang

Gambar 3. 104 Diagram Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan



Berikut beberapa daftar pelatihan yang diikuti oleh pegawai Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025, antara lain:

Tabel 3. 46 Daftar Pelatihan Tahun 2025 Biro Komunikasi dan Informasi Publik

No	Nama Peserta	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan
1.	Prawito, SKM, MM	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan SDM dalam rangka Penguatan Regulasi dan Advokasi Hukum di Bidang Kesehatan Batch 18	21 Februari 2025
2.	Prawito, SKM, MM	Lokakarya Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2025	3 Maret 2025
3.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	NGOPI ASN (Ngobrol Pintar ASN) Kemenkes Seri 3 Membuat Desain Program Pengembangan Kompetensi	27 Februari 2025
4.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025
5.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	Lokakarya Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2025	3 Maret 2025
6.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	Komunitas Belajar Administrator Kesehatan seri 3	12 Maret 2025

No	Nama Peserta	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan
7.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	MOOC Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Batch I	12 – 31 Maret 2025
8.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	Global Learning Connect	14 – 16 Maret 2025
9.	Giri Inayah Abdullah, S.Sos, MKM	Bedah Buku Pedoman Komunikasi Risiko Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2025	20 Maret 2025
10.	Subkhan, S.Pd, MM	Open Class (AP Corner) Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025	27 Februari 2025
11.	Eka Purnamasari, S.Si	Webinar PusbinTalk Series #18: Sosialisasi Aplikasi Pendaftaran & Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana	30 Januari 2025
12.	Eka Purnamasari, S.Si	Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) “Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan” Tahun 2025	5 Februari 2025
13.	Eka Purnamasari, S.Si	Webinar Ekonomi Digital dan Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan	17 Februari 2025
14.	Eka Purnamasari, S.Si	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025
15.	Eka Purnamasari, S.Si	Sosialisasi Kebijakan Fungsional Perencana dan Kompetensi Jabatan Fungsional	4 Maret 2025
16.	Eka Purnamasari, S.Si	Global Learning Connect	14 – 16 Maret 2025

No	Nama Peserta	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan
17.	Eka Purnamasari, S.Si	Bedah Buku Pedoman Komunikasi Risiko Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2025	20 Maret 2025
18.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Kursus Cara Membuat Karyawan Lebih Produktif 3X Lipat dari Hendra Hilman International	16 Januari 2025
19.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Kursus Saya Pasti Bisa dari Merry Riana Group	16 Januari 2025
20.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025
21.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Lokakarya Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2025	3 Maret 2025
22.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	MOOC Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Batch I	12 – 31 Maret 2025
23.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Global Learning Connect	14 - 16 Maret 2025
24.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Workshop Pengembangan Kompetensi Bidang Informasi Teknologi Dasar Untuk Media Sosial Seri 1 Tips Mengelola Media Sosial Instansi Pemerintah yang Kekinian	19 Maret 2025
25.	Rina Wahyu Wijayani, SE, MKM	Bedah Buku Pedoman Komunikasi Risiko Untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2025	20 Maret 2025
26.	Galih Permana, SE, MKM	Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) “Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan” Tahun 2025	5 Februari 2025

No	Nama Peserta	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan
27.	Galih Permana, SE, MKM	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan I Tahun 2025	24 Februari 2025
28.	Kartika Indra S, S.Kom	Webinar Pemanfaatan Kerjasama dengan Lembaga Internasional: Mewujudkan ASN yang Berdaya Saing Global	20 Februari 2025
29.	Kartika Indra S, S.Kom	Webinar Implementasi Sistem Manajemen K3 Sebagai Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja	27 Februari 2025
30.	Kartika Indra S, S.Kom	Webinar Puasa dan Etos Kerja ASN	27 Februari 2025
31.	Kartika Indra S, S.Kom	NGOPI ASN (Ngobrol Pintar ASN) Kemenkes Seri 3 Membuat Desain Program Pengembangan Kompetensi	27 Februari 2025
32.	Kartika Indra S, S.Kom	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025
33.	Kartika Indra S, S.Kom	Lokakarya Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2025	3 Maret 2025
34.	Kartika Indra S, S.Kom	MOOC Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Batch I	12 – 31 Maret 2025
35.	Kartika Indra S, S.Kom	Webinar Flexible Working Arrangement (FWA): Antara Efisiensi dan Kinerja	13 Maret 2025
36.	Kartika Indra S, S.Kom	Global Learning Connect	14 – 16 Maret 2025
37.	Kartika Indra S, S.Kom	Webinar Work Life Balance: Kinerja Tinggi - Bahagia Sejati	20 Maret 2025

No	Nama Peserta	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan
38.	Endang Tri Widiyastuti, A.Md	Seminar Nasional Peran Record Center Arsip Dalam Meningkatkan Keamanan dan Aksesibilitas Data	17 Januari 2025
39.	Endang Tri Widiyastuti, A.Md	MOOC Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Batch I	12 – 31 Maret 2025
40.	Endang Tri Widiyastuti, A.Md	MMOC Pemberkasan Arsip Secara Elektronik Untuk Arsiparis di Kemenkes RI Batch 2	14 – 31 Maret 2025
41.	Reiza M. Iqbal, A.Md	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025
42.	Reiza M. Iqbal, A.Md	Global Learning Connect	14 – 16 Maret 2025
43.	Mochamad Nur Prasetyo, A.Md.Ak	Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) “Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan” Tahun 2025	5 Februari 2025
44.	Nida Khairani, A.Md.Ak	Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) “Coretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan” Tahun 2025	5 Februari 2025
45.	Mauliana Asri, S.Sos	MOOC E-Learning Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Level 3 Batch 2	10 Februari – 31 Maret 2025
46.	Mauliana Asri, S.Sos	Spirit Ramadhan Dalam Percepatan Perubahan Budaya Kerja Kementerian Kesehatan	28 Februari 2025
47.	Mauliana Asri, S.Sos	MOOC Perubahan Budaya Kerja Kemenkes Batch I	12 – 31 Maret 2025

No	Nama Peserta	Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan
48.	Mauliana Asri, S.Sos	Webinar Hari Pendengaran Sedunia, Changing Mindsets Empower Yourself Make Ear and Hearing Care A Reality For All	13 – 20 Maret 2025

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam mencapai kinerja, Biro Komunikasi dan Informasi Publik didukung oleh Sumber Daya Anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA – 024.01.1.465921/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 3. 47 Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025

Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Refocusing (Rp.)	Realisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
29.247.665.000	12.823.857.000	16.423.808.000	12.661.731.942	98,74

Sejalan dengan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Informasi Publik, proporsi anggaran terbesar dialokasikan tiap tahunnya untuk alokasi sasaran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Berita dan Publikasi. Biro Komunikasi dan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal unit kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 48 Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024-2025

Uraian Kegiatan	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	38.219.674.000	37.630.255.096	98,46	12.823.857.000	12.661.731.942	98,74

Tabel 3. 49 Rincian Realisasi Anggaran per Output

Program	Output	Pagu	Realisasi	%
Dukungan Manajemen, Kegiatan, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Penguatan Pengelolaan Layanan Publik	307.700.000	302.366.300	98,27
	Layanan Hubungan Masyarakat	12.516.157.000	12.359.365.642	98,75

Tabel 3. 50 Matriks Target Kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik TA 2025

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	T	R	T	R	T	R
				2023	2023	2024	2024	2025	2025
SEBELUM PENERBITAN RENCANA STRATEGIS									
1	Pengelolaan komunikasi publik dan informasi publik	Meningkatnya pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi	83	B06: 88,20 B12: 89,36	83	B06: 89,3 6 B12: 90,1 7	83	0
			Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	37	46	40	44	40	41
SESUDAH PENERBITAN RENCANA STRATEGIS									
1	Pengelolaan komunikasi publik dan	Meningkatnya pengelolaan komunikasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM						
			Indeks Kepuasan Pengguna	N/A	N/A	N/A	N/A	77	85,79

	informasi publik	dan informasi publik	Layanan Kementerian Kesehatan						
			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN						
			Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal	N/A	N/A	N/A	N/A	77	81,47
			Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan	37	46	40	44	40	41

Pada periode sebelum penerbitan Rencana Strategis, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi ditargetkan stabil pada angka 83 untuk tahun 2023–2025. Realisasi menunjukkan capaian yang konsisten melampaui target, yaitu 88,20 dan 89,36 pada 2023, serta 89,36 dan 90,17 pada 2024, yang mengindikasikan kualitas pengelolaan komunikasi publik dinilai sangat baik oleh masyarakat. Sementara itu, indikator Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan menunjukkan capaian yang lebih fluktuatif: dari target 37 UPT pada 2023 dengan realisasi 46, target 40 pada 2024 dengan realisasi 44, dan target 40 pada 2025 dengan realisasi 41. Fluktuasi ini mengindikasikan ketidaksamaan tingkat kesiapan dan konsistensi penerapan standar pelayanan antar-UPT.

Setelah penerbitan Rencana Strategis pada Oktober 2025, indikator kinerja mengalami penyesuaian dengan fokus pada kepuasan pengguna layanan. Pada tahun awal penerapan, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan ditargetkan 77 dan terealisasi

85,79, sedangkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal ditargetkan 77 dengan realisasi 81,47. Secara numerik, capaian tersebut melampaui target dan menunjukkan respons positif pengguna terhadap layanan. Namun, tingginya capaian pada tahun pertama belum sepenuhnya mencerminkan tren kinerja jangka panjang karena belum tersedianya data historis pembandingan dan masih berlangsungnya proses adaptasi metodologi survei serta pemahaman unit kerja terhadap indikator baru. Oleh karena itu, tantangan utama ke depan bukan pada pencapaian angka semata, melainkan pada konsistensi pengukuran, pemerataan kualitas layanan antarunit, serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana mempunyai peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelesaian tugas dan fungsi satuan organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Biro Komunikasi dan Informasi Publik terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor. Berdasarkan Data pada Neraca Laporan Barang Milik Negara Tahun 2025, nilai sarana dan prasarana yang dikelompokkan dalam akun neraca dapat dijelaskan dibawah ini:

Gambar 3. 105 Laporan Barang Milik Negara Tahun 2025

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - SUB SATKER POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TAHUN ANGGARAN 2025		
UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN		Tgl.Data : 11/01/26 12:36 PM
UAKPB : 024010199465921035KP KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL		Tgl.Cetak : 12/01/26 11:06 AM
		Halaman : 1
		Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_subsatker_poc
AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	42,041,443
132111	Peralatan dan Mesin	9,915,053,926
135121	Aset Tetap Lainnya	547,085,080
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8,729,906,081)
162151	Software	380,417,936
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	4,018,653,188
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3,773,264,598)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(380,417,936)
J U M L A H		2,019,662,958

Tabel 3. 51 Daftar Peralatan dan Mesin di Biro Komunikasi dan Informasi Publik

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	370.689.100
2	3020104001	Sepeda Motor	1	14.810.000
3	3060201004	Telephone Mobile	8	137.630.000
4	3100202006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	7.390.000
5	3100202017	Speaker Komputer	2	3.289.000
6	3100203017	External/ Portable Hardisk	3	25.549.000
7	3080111137	Tripod	7	35.971.650
8	3050103007	Mesin Fotocopy Folio	1	46.411.500
9	3050104002	Lemari Kayu	57	316.793.050
10	3050104004	Rak Kayu	7	51.150.000
11	3050201003	Kursi Besi/Metal	190	394.074.195
12	3050204004	A.C. Split	9	103.224.000
13	3060101022	Telephone Hybrid	1	8.827.500
14	3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	28.700.000
15	3050206020	Camera Video	7	191.927.000
16	3050206057	Vertikal Blind	1	17.737.500
17	3050205004	Teko Listrik	1	161.700
18	3050206012	Wireless	7	250.466.750
19	3060102120	Lighting Head Body	1	5.299.300
20	3060102129	Tas Kamera	2	3.221.750
21	3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film	2	11.000.000
22	3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	1	20.000.000
23	3100202001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	4	8.214.000

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
24	3080153053	Laboratory Air Conditioner 1,50 HP	1	19.800.000
25	3100102009	Tablet PC	1	21.756.000
26	3050201004	Kursi Kayu	2	15.800.000
27	3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.692.800
28	3060101003	Audio Mixing Stationer	3	99.680.520
29	3050206019	Stabilisator	1	3.496.500
30	3050206034	Tangga Aluminium	1	588.500
31	3050206036	Dispenser	5	15.173.400
32	3060101088	Voice Recorder	8	15.386.800
33	3060102118	Head Set	23	38.358.478
34	3060199999	Alat Studio Lainnya	3	3.135.000
35	3060102061	Lensa Kamera	12	387.600.000
36	3100202015	Auto Switch/Data Switch	5	14.744.400
37	3170122014	Microwave Heater	1	1.498.500
38	3030301064	Memori Programmer	5	10.878.000
39	3050104003	Rak Besi	2	187.437.250
40	3050105048	LCD Projector/Infocus	3	47.850.000
42	3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	11	108.570.000
42	3050201002	Meja Kerja Kayu	4	21.610.000
43	3060101008	Audio Monitor Active	2	14.307.500
44	3060102130	Lampu Blitz Kamera	3	20.574.000
45	3060201010	Facsimile	1	1.575.000
46	3060102045	Tripod Camera	5	17.575.000
47	3020201004	Lori Dorong	2	3.850.000
48	3050104016	Roll Opek	1	40.700.000

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
49	3050204001	Lemari Es	4	10.510.500
50	3060102016	Video Switcher	2	35.090.000
51	3050206007	Loudspeaker	2	11.779.416
52	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	3	59.433.000
53	3060102158	Monopod	2	3.509.500
54	3060102060	Camera Film	2	67.712.600
55	3100204001	Server	5	275.747.220
56	3100102003	Note Book	33	717.604.088
57	3170124001	Rolling Machine	1	6.875.000
58	3050201021	Pot Bunga	3	5.610.000
59	3050206014	Microphone	12	51.922.000
60	3060102128	Camera Digital	8	478.586.000
61	3060102034	Teleprompter	1	3.885.000
62	3080715005	Lighting Equipment	5	21.851.000
63	3150405006	Air Conditioning (AC)	9	156.873.200
64	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	37	186.443.330
65	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	27.597.800
66	3090405010	Digital Signature Pad	2	3.660.000
67	3030205002	Tool Kit Box	1	3.300.000
68	3080112025	Stabilizer	2	8.436.000
69	3100204038	Wireless IP Camera	2	54.000.000
70	3060102167	Drone	1	35.000.000
71	3020101003	Station Wagon	1	225.229.106
71	3050104001	Lemari Besi/Metal	15	64.900.640
72	3050201019	Meja Makan Kayu	2	5.280.000

No	Kode	Uraian	Jumlah	Nilai
73	3050201028	Workstation	70	585.526.000
74	3060101036	Microphone/Wireless MIC	11	190.365.000
75	3060102003	Camera Electronic	4	4.950.000
76	3050206002	Televisi	30	976.083.180
77	3060102164	Video Splitter	1	11.384.100
78	3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	1	123.527.273
79	3060102170	Gimbal Tripod	1	1.998.000
80	3100203002	Monitor	5	7.495.000
81	3100102001	P.C Unit	81	1.468.143.430
82	3100102002	Lap Top	18	310.180.500
83	3050201033	Sofa	1	24.975.000
84	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	642.678.400
85	3020104001	Sepeda Motor	1	14.801.000
86	3050104020	Lemari Display	1	2.201.000
87	3050201008	Meja Rapat	35	133.951.000
88	3050201014	Meja Resepsionis	3	16.972.000
89	3050105015	Alat Penghancur Kertas	3	23.825.500
90	3060102121	Lighting Mechanic	4	44.568.700
91	3060201001	Telephone (PABX)	2	29.079.600
92	6010101999	Buku Lainnya	4	9.435.000
93	6010101001	Monografi	2.39 6	537.650.080
Total			3252	10.462.300.706

Tabel 3. 52 Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 4

No	No.Kendaraan	Tahun	Jenis / Merk	Keterangan
1	B 1107 SQP	2013	Toyota Veloz	Kendaraan Operasional
2	B 1885 SQQ	2020	Mitsubishi XPander 1,5L	Kendaraan Operasional
3	B 2797 KQ	2007	Isuzu Turbo Grand Touring	Kendaraan Operasional

Tabel 3. 53 Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Roda 2

No.	No.Kendaraan	Tahun	Jenis/Merk	Keterangan
1.	B 611 SQP	2008	Honda Supra X 125	Operasional Subbag Adum

Dalam hal pengelolaan BMN Tahun 2025, Unit Kerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

Pengadaan BMN

Pengadaan laptop yang tercatat di aplikasi SAKTI melalui metode transfer online internal berupa laptop sebanyak 15 (lima belas) unit dengan nilai perolehan sebesar Rp. 213.286.500 (dua ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang tertuang di Berita Acara Serah Terima Barang.

Penghapusan/Lelang BMN

Biro Komunikasi dan Informasi Publik telah menghentikan Aset dari penggunaan untuk Peralatan mesin sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) buah dengan nilai Rp. 3.796.868.238 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan) dan Aset Tetap lainnya sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) buah dengan nilai Rp. 221.784.950 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

E. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Biro Komunikasi dan Informasi Publik dilaksanakan dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Instruksi tersebut mengamanatkan

seluruh Kementerian/Lembaga untuk melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja melalui identifikasi rencana belanja sesuai besaran efisiensi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, pada awal Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik memiliki pagu anggaran sebesar Rp29.247.665.000. Namun demikian, dilakukan penghematan/efisiensi (blokir) anggaran sebesar Rp21.847.885.000, yang mencakup blokir Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya (Kode A), sehingga pagu efektif yang dapat digunakan menjadi Rp7.399.780.000. Kondisi ini menuntut pelaksanaan anggaran dilakukan secara lebih selektif, efektif, efisien, dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan selama satu tahun anggaran.

Dengan keterbatasan pagu efektif tersebut, Biro Komunikasi dan Informasi Publik melakukan penajaman prioritas kegiatan yang secara langsung mendukung kebijakan dan program strategis Kementerian Kesehatan, khususnya dalam aspek publikasi, sosialisasi, dan pengelolaan komunikasi serta informasi publik. Penyesuaian anggaran dilakukan melalui beberapa kali revisi DIPA dan POK guna mengakomodasi kebutuhan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a)** Revisi DIPA DJA ke-1 tanggal 21 Februari 2025, berupa penerapan blokir/efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan efisiensi sebesar Rp21.847.885.000 dari pagu awal Rp29.247.665.000 sehingga pagu efektif menjadi Rp7.399.780.000.
- b)** Revisi DIPA Kanwil ke-2 tanggal 12 Maret 2025, terkait penyesuaian kegiatan advokasi pembiayaan kesehatan melalui sosialisasi kesehatan kepada masyarakat bersama mitra Komisi IX DPR RI. Revisi ini menambah pagu anggaran sebesar Rp2.927.200.000 sehingga pagu menjadi Rp32.174.865.000 dan pagu efektif meningkat menjadi Rp10.326.980.000.
- c)** Revisi POK ke-4 tanggal 12 April 2025, berupa optimalisasi belanja barang dan jasa serta pergeseran anggaran untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan pengelolaan komunikasi dan informasi publik, tanpa mengubah total pagu, sehingga pagu efektif tetap Rp10.326.980.000.
- d)** Revisi DIPA Kanwil ke-6 tanggal 04 Juni 2025, berupa revisi anggaran antar kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk mendukung kegiatan Sosialisasi Masyarakat, Survei Indeks Kepuasan Pengguna (IKP), dan advertorial. Revisi ini menambah pagu anggaran sebesar Rp2.658.667.000 menjadi Rp34.833.532.000, dengan pagu efektif sebesar Rp12.985.647.000.
- e)** Revisi DIPA ke-7 tanggal 24 Juni 2025, berupa pergeseran anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (7883) sebesar Rp2.646.550.000,

sehingga pagu berkurang menjadi Rp32.186.982.000 dan pagu efektif menjadi Rp10.339.097.000.

- f) Revisi DIPA ke-10 tanggal 03 September 2025, berupa penambahan anggaran sebesar Rp680.000.000, sehingga pagu menjadi Rp32.866.982.000 dan pagu efektif meningkat menjadi Rp11.019.097.000.
- g) Revisi DIPA ke-13 tanggal 22 Oktober 2025, berupa penambahan anggaran sebesar Rp1.804.760.000 untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan komunikasi dan informasi publik, sehingga pagu menjadi Rp34.671.742.000 dan pagu efektif menjadi Rp12.823.857.000.
- h) Revisi DIPA ke-14 tanggal 07 November 2025, berupa relaksasi blokir A sebesar Rp21.847.885.000 yang direalokasikan dalam rangka penyelesaian tunggakan bantuan iuran PBPU Tahun 2024, sehingga pagu anggaran yang dikelola Biro Komunikasi dan Informasi Publik menjadi Rp12.823.857.000.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan baik melalui penyesuaian perencanaan, optimalisasi belanja, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan, tanpa mengurangi capaian output utama dalam mendukung komunikasi dan informasi publik Kementerian Kesehatan. Biro Komunikasi dan Informasi Publik tetap mampu mengelola sumber daya anggaran secara optimal. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp12.661.731.942 atau sebesar 98,74% dari pagu Rp12.823.857.000. Tingginya tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien, tepat sasaran, serta selaras dengan prioritas kebijakan pemerintah, meskipun berada dalam kondisi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional.

Tabel 3. 54 Rincian Realisasi Anggaran Menurut Jenis Kegiatan TA 2025

PROGRAM	OUTPUT	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Penguatan Pengelolaan Layanan Publik	307.700.000	302.366.300	98,27
	Layanan Hubungan Masyarakat	12.516.157.000	12.359.365.642	98,75
		12.823.857.000	12.661.731.942	98,74

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

a. Efisiensi Sumber Dana

Efisiensi merupakan suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan pekerjaan dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan seperti tenaga, waktu dan biaya tetapi tetap dapat menghasilkan output sesuai dengan rencana atau target yang ingin dicapai, maka akan dinilai efisiensi.

Dalam mendukung dan melaksanakan Program Dukungan Manajemen Unit Organisasi Sekretariat Jenderal, berikut analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Tahun 2025 terurai dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 55 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Capaian IKK

Target Output	Pagu Anggaran (PAKi)	Realisasi Anggaran (RAKi)	Capaian Keluaran (Cki)	Efisiensi
100%	Rp 12,823,857,000	Rp 12,661,731,942	100%	1.26%

Efisiensi Sumber Daya Anggaran untuk setiap capaian Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rumus Efisiensi : } E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus efisiensi yang digunakan, hasil perhitungan Biro Komunikasi dan Informasi Publik menunjukkan angka efisiensi sebesar **1,26%**. Persentase positif mengindikasikan keberhasilan dalam melaksanakan program kegiatan dengan tingkat penghematan anggaran sebesar 1,24% dari total anggaran yang seharusnya dibutuhkan berdasarkan capaian output yang direncanakan. Angka ini mencerminkan bahwa biro mampu memanfaatkan anggaran secara efisien, di mana realisasi anggaran lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran yang dikalikan dengan capaian output. Meskipun ini merupakan indikator efisiensi yang cukup baik, penting untuk memastikan bahwa efisiensi ini tidak mengorbankan kualitas keluaran (output) atau berdampak negatif terhadap hasil (*outcome*) yang diharapkan.

b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dengan jumlah pegawai eksisting 90 orang dari kebutuhan ideal 100 orang, capaian kinerja yang telah mencapai 100% menunjukkan bahwa secara agregat organisasi mampu

bekerja efisien dan target kinerja dapat dipenuhi dengan sumber daya yang tersedia. Kondisi ini mencerminkan adanya optimalisasi peran pegawai, pemanfaatan sistem kerja yang adaptif, serta dukungan proses dan teknologi yang membantu pencapaian kinerja meskipun terjadi kekurangan SDM secara kuantitatif.

Namun demikian, capaian kinerja secara makro belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi beban kerja di tingkat individu dan unit. Kekurangan 10% SDM berimplikasi pada ketimpangan distribusi tugas, peningkatan intensitas kerja pada fungsi-fungsi tertentu, serta potensi penurunan kualitas dan keberlanjutan kinerja dalam jangka menengah–panjang. Oleh karena itu, penambahan SDM tetap diperlukan bukan semata untuk meningkatkan capaian kinerja, melainkan untuk pemerataan beban kerja, penguatan fungsi strategis, mitigasi risiko kelelahan pegawai, dan menjaga konsistensi kualitas layanan agar capaian kinerja dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Tabel 3. 56 Matriks Keterkaitan Indikator dan Rincian Output

Uraian Kinerja	Belanja		Kinerja		% Capaian
	Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	
ISS 33. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan					
IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes					
IKK 33.1.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal					
2042.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp12.516.157.000	Rp12.359.365.642	392 Layanan	392 Layanan	100%
IKK 33.1.15 Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan					
2042.BAH.060 Penguatan Pengelolaan Layanan Publik	Rp307.700.000	Rp302.366.300	160 Layanan	160 Layanan	100%

Berdasarkan matriks keterkaitan indikator dan rincian output, output 2042.EBA.958 (Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi) secara langsung mendukung pencapaian IKK 33.1.1 (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal), yang pada gilirannya berkontribusi terhadap IKP 33.1 (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes) dan ISS 33 (Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes). Dari sisi belanja, realisasi anggaran sebesar Rp12,36 miliar dari pagu Rp12,52 miliar menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi dan efisien. Kinerja output tercapai 392 layanan dari target 392 layanan (100%), yang menandakan bahwa alokasi belanja telah dikonversi secara optimal menjadi layanan nyata yang berdampak langsung pada kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal.

Sementara itu, output 2042.BAH.060 (Penguatan Pengelolaan Layanan Publik) berperan sebagai pendukung utama IKK 33.1.15 (Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik dalam pelaksanaan standar interaksi pelayanan). Realisasi anggaran sebesar Rp302,37 juta dari pagu Rp307,70 juta juga mencerminkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Dari sisi kinerja, target 160 layanan berhasil direalisasikan seluruhnya (100%), yang menunjukkan efektivitas belanja dalam mendorong peningkatan kepatuhan dan kualitas standar layanan di UPT. Secara keseluruhan, keterkaitan belanja dan kinerja pada kedua output tersebut menunjukkan adanya *alignment* yang kuat antara penggunaan anggaran, pencapaian IKK, dan kontribusinya terhadap IKP serta ISS, sehingga belanja tidak hanya terserap optimal tetapi juga menghasilkan dampak kinerja yang terukur dan relevan secara strategis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

Secara umum, matriks kinerja menunjukkan bahwa kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik pada TA 2025 tetap terjaga dan bahkan melampaui target, baik sebelum maupun sesudah pengesahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Perubahan indikator kinerja tidak menurunkan capaian, melainkan memperkuat orientasi pengukuran dari kepuasan terhadap produk komunikasi menuju kepuasan pengguna layanan secara lebih komprehensif, sejalan dengan prinsip SAKIP yang berorientasi pada hasil dan dampak. Adapun capaian kinerja Biro Komunikasi dan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

Sebelum pengesahan Renstra (indikator lama):

- a) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pengelolaan berita dan publikasi mencapai 89,67 dari target 83, menunjukkan kualitas pengelolaan komunikasi publik yang sangat baik.
- b) Jumlah UPT Kemenkes dengan kategori baik mencapai 41 UPT dari target 40, menandakan kepatuhan unit terhadap standar interaksi pelayanan relatif konsisten meskipun belum sepenuhnya merata.

Sesudah pengesahan Renstra (indikator baru):

- a) IKP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Kesehatan terealisasi 85,79 dari target 77, mencerminkan persepsi positif pengguna terhadap layanan Kemenkes secara umum.
- b) IKK Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal mencapai 81,47 dari target 77, menunjukkan kinerja layanan internal yang melampaui standar yang ditetapkan.
- c) IKK Jumlah UPT berkategori baik tetap konsisten pada 41 UPT, yang mengindikasikan keberlanjutan capaian meskipun kerangka indikator berubah.

Selain capaian kinerja yang diukur melalui indikator formal, peningkatan kualitas kinerja di bidang komunikasi dan informasi publik pada tahun 2025 juga tercermin dari berbagai apresiasi eksternal, antara lain diraihnya Gold Winner Kategori Pelayanan Publik pada ajang Makaravox PR Award Universitas Indonesia untuk sektor Informasi Pelayanan Publik, penghargaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai salah satu instansi teraktif dalam mengamplifikasikan narasi tunggal melalui media sosial resmi, serta Predikat Informatif kategori kementerian yang diraih PPID Kementerian Kesehatan dengan nilai 95,37 pada

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Publik.

B. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi perbaikan pola kerja dan capaian kinerja, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah untuk memastikan peningkatan kinerja dapat dipertahankan secara berkelanjutan serta berdampak pada pemerataan kualitas layanan. Rencana tindak lanjut ini disusun untuk memperkuat kolaborasi lintas unit, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan tata kelola layanan publik dan informasi, serta memperkuat sistem *monitoring* kinerja agar selaras dengan prinsip SAKIP yang berorientasi pada hasil dan dampak. Rencana tindak lanjut difokuskan pada beberapa hal yaitu:

- a) Perbaikan pola kerja kolaboratif dan penguatan tata kelola kinerja, melalui penyusunan rencana kerja bersama, peningkatan kapasitas SDM, serta pembentukan forum komunikasi lintas unit berbasis hasil survei kepuasan/IKM.
- b) Penguatan pembinaan dan pemerataan kualitas layanan UPT dilakukan melalui sinergi dengan Unit Eselon I, pemetaan kesiapan UPT, pelaksanaan *self-assessment*, serta survei dan evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik secara bertahap dan terukur.
- c) Optimalisasi pengelolaan pengaduan dan layanan informasi publik ditempuh melalui penegasan penunjukan admin SP4N LAPOR!, peningkatan keterbukaan informasi lintas kanal, serta koordinasi berkelanjutan terkait dukungan sistem layanan (Omnix).
- d) Peningkatan efektivitas komunikasi publik dan diseminasi informasi dilakukan melalui penguatan jejaring lintas program dan sektor, penyusunan Pedoman Media Sosial, serta pemanfaatan dashboard peliputan untuk pemantauan kinerja secara *real-time*.
- e) Penguatan layanan dan tata kelola perpustakaan dilaksanakan melalui *transfer knowledge* pustakawan pascasertifikasi, mitigasi risiko sistem dengan penarikan data berkala, sosialisasi pengajuan ISBN, dan penyusunan *Grand Design* perpustakaan sebagai arah pengembangan jangka panjang.